## LAPORAN KINERJA

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020





**TAHUN 2020** 

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU







## PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU INSPEKTORAT

Jalan WAD DUHA Rey IV No. (0513) 6707585 Pulang Pisau 74811 Email: Sekretarisitkabpp@gmail.com

# PERNYATAAN TELAH DIREVIU Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

INSPEKTORAT

Pulang Pisau, 19 Maret 2021

NSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU

SAPRI JUNJUNG, SE., MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016

**TAHUN 2020** 

## IKHTISAR EKSEKUTIF







### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 merupakan gambaran kinerja dari seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau termasuk pengukuran dan evaluasi serta hasil analisis kinerja terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2020. Laporan Kinerja ini juga menjelaskan berkaitan dengan; perencanaan dan pengendalian yang dilakukan pada tahun 2020; capaian kinerja atas pencapaian dan pengendalian yang telah ditetapkan; serta realisasi anggaran yang dicapai dari msing-masing program/kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan ditetapkannya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau pasangan EDY PRATOWO, S.Sos., M.M. dan PUDJIRUSTATY NARANG sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau terpilih Periode Tahun 2018-2023, selanjutnya oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada hari Senin, 24 September 2018 di Istana Isen Mulang Palangka Raya dilaksanakan Pelantikan Kepala Daerah terpilih.



Foto: Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau periode 2018-2023



Pelaksanaan reformasi birokrasi dan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tahun 2020, yang dibuktikan dengan diraihnya beberapa prestasi, yaitu:

- Opini Wajar Tanpa Pengecualian "WTP" sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 (5 tahun berturut-turut). Sebagai wujud terjaganya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
- 2. Kategori "C" pada tahun 2018 dengan skor AKIP 48,21, menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,17 dari tahun sebelumnya (2017) skor 46,04 (untuk penilaian SAKIP tahun 2019 belum di rilis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

Secara umum Laporan Kinerja Tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dari 21 (dua puluh satu) sasaran dapat diikhtisarkan bahwa:

- ② 4 (empat) sasaran berkategori "Sangat Memuaskan",
- © 14 (empat belas) sasaran berkategori "Memuaskan",
- © 1 (satu) sasaran berkategori "Baik",
- ② 2 (dua) sasaran berkategori "Kurang", yaitu sebagai berikut:

NO	SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI CAPAIAN
1	Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	86,15	Memuaskan
2	Meningkatnya layanan kelistrikan	95,85	Memuaskan
3	Meningkatnya Akses Air Bersih	98,38	Memuaskan
4	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	98,40	Memuaskan
5	Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	98,00	Memuaskan
6	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni	96,72	Memuaskan



NO	SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI CAPAIAN
7	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	94,33	Kurang
8	Meningkatnya produksi pertanian	95,24	Kurang
9	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap	99,22	Memuaskan
10	Meningkatnya Status Lingkungan Hidup	115,04	Sangat Memuaskan
11	Menurunnya luasan kebakaran hutan dan lahan	519,82	Sangat Memuaskan
12	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	100,72	Sangat Memuaskan
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	97,16	Memuaskan
14	Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam ekonomi local	93,59	Memuaskan
15	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap ekonomi local	2,23	Kurang
16	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	61,98	Baik
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100,00	Memuaskan
18	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	103,33	Sangat Memuaskan
19	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	80,35	Memuaskan
20	Meningkatnya peran organisasi keagamaan	97,00	Memuaskan
21	Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	36,21	Kurang
	Rata-rata pencapaian (%)	108,09	"SANGAT MEMUASKAN"



Berdasarkan tabel di atas terlihat adanya keberhasilan yang ditunjukkan dengan capaian indikator sasaran lebih dari seratus persen, tetapi ada juga sasaran yang capaiannya kurang dari 50% (lima puluh) persen, seperti untuk sasaran 15, dan sasaran 21 dengan kategori kurang, penyebabnya adalah perolehan realisasi dari indikatornya belum memperoleh penilaian atau belum di rilis atau belum di publikasikan. Hal tersebut tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau guna memperbaiki pelaksanaan kinerja di masa mendatang.

Pulang Pisau, 22 Maret 2021
BUPATI PULANG PISAU,
ttd

H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.





## Lambang Daerah Kabupaten Pulang Pisau

### a. Bentuk Lambang

Segi Empat.

### b. Warna Lambang

Warna dasar adalah hijau daun. Warna bingkai adalah merah.

### c. Isi Lambang

Dalam lambang terdapat 8 (delapan) unsur lambang, yaitu :

Bintang;

Rumah Betang;

Padi;

Kapas;

Perahu;

Rantai Perekat;

Sungai, Mandau, Sumpit dan Perisai;

Motto Daerah bertuliskan " HANDEP HAPAKAT ".

#### d. Arti Lambang

Warna dasar hijau daun

Warna dasar hijau daun melambangkan kemakmuran dan kesuburan.

Bintang

Bintang berwarna kuning, yang melambangkan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumah betang

Rumah betang adalah rumah panjang bertiang tinggi yang merupakan tempat tinggal keluarga Suku Dayak.

Padi

Padi adalah pangan, yang melambangkan kemakmuran.

Kapas

Kapas adalah sandang, yang melambangkan kesejahteraan.

Perahu

Perahu adalah alat transportasi utama yang digunakan oleh Suku Dayak dan masyarakat yang melambangkan Pulang Pisau sebagai kota Pelabuhan dan keterbukaan.

Rantai berwarna merah

Rantai berwarna merah, yang melambangkan adanya 6 (enam) Kecamatan yang mulanya berdiri di Kabupaten Pulang Pisau, yang bersatu padu dan bahu membahu dalam kebersamaan membangun dengan dilandasi semangat keberanian dan tekat yang kuat.

#### Garis gelombang

Garis gelombang berjumlah 3 (tiga) berwarna biru yang melambangkan air yang melewati Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan sumber kehidupan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau.

Motto

Motto Kabupaten Pulang Pisau adalah "HANDEP HAPAKAT" pada pita berwarna merah putih, artinya adanya persatuan dan kesatuan semua komponen masyarakat serta terbuka dengan tidak membedakan agama, suku, dan warna kulit, dalam falsafah hidup gotong royong, sebagaimana kehidupan masyarakat Suku Dayak dalam Rumah Betang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dua buah jendela

Dua buah jendela kiri kanan dan dua buah lubang angin di atas pintu adalah melambang tahun kelahiran Kabupaten Pulang Pisau ("2002").

#### Anak tangga

Anak tangga sebanyak "10" adalah melambangkan tanggal lahirnya Kabupaten Pulang Pisau. *Tiang Rumah Betang* 

Tiang Rumah Betang sebanyak "4" adalah melambangkan bulan lahirnya Kabupaten Pulang Pisau.

Butir Kapas

Jumlah Butir Kapas sebanyak 42 buah dan butir padi sebanyak 42 buah, sehingga berjumlah 84 buah, adalah melambangkan jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau pada awal berdirinya.

#### Mandau, Sumpit dan Perisai

Mandau, Sumpit dan Perisai yang ada berada di depan pintu rumah betang adalah merupakan senjata khas suku Dayak, yang melambangkan "Semangat Isen Mulang", yaitu siap menghadapi tantangan apapun (pantang mundur).

**TAHUN 2020** 

## DAFTAR 1S1





## DAFTAR ISI

KHTISAR EKSEKUTIF i	
ARTI LAMBANG v	
DAFTAR ISI v	ii
DAFTAR TABEL v	ii
DAFTAR GAMBAR x	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	
B. MAKSUD DAN TUJUAN	<u>.</u>
C. KOND <mark>I</mark> SI UMUM KABUPATEN PULANG PISAU 2	<u>.</u>
D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj) 1	. 5
BAB II PERENC <mark>A</mark> NAAN KINERJA	
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 1	6
DAERAH (RPJMD) TAHUN 2018 - 2023	
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 2	7
C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 2	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3	3
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN 8	0
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 8	2
AMPIRAN	

**TAHUN 2020** 

# DAFTAR TABEL



## DAFTAR TABEL

N	o.	Teks	Halaman
Tabel	1.1	Jumlah Kecamatan, Ibu Kota, Luas Wilayah dan jumlah Desa/Kelurahan masing-masing Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau	4
Tabel	1.2	Jumlah Penduduk pada masing-masing Kecamatan berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Pulang Pisau	5
Tabel	1.3	Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau	9
Tabel	1.4	Rekapitulasi PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2018, 2019 & 2020	10
Tabel	1.5	Rekapitulasi PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Golongan/Ruang Per Desember 2019	12
Tabel	1.6	Rekapitulasi PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Golongan/Ruang Per Desember 2020	13
Tabel	2.1	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kab. Pulang Pisau Tahun 2018-2023	24
Tabel	2.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 (Perubahan)	27
Tabel	2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 – 2023	30
Tabel	3.1	Urutan Kategori Penilaian Capaian Kinerja	34
Tabel	3.2	Ringkasan Rata-rata Pencapaian Kinerja Program Tahun 2020	35
Tabel	3.3	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 1	37
Tabel	3.4	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi	38

	Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 1	
Tabel 3.5	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 2	39
Tabel 3.6	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 2	39
Tabel 3.7	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 3	40
Tabel 3.8	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 3	41
Tabel 3.9	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 4	42
Tabel 3.10	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 4	42
Tabel 3.11	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 5	43
Tabel 3.12	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 5	43
Tabel 3.13	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 6	44
Tabel 3.14	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 6	45
Tabel 3.15	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 7	46
Tabel 3.16	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadan realisasi Tahun 2019 dan Realisasi	47

		Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 7	
Tabel	3.17	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 8	48
Tabel	3.18	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 8	48
Tabel	3.19	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 9	49
Tabel	3.20	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 9	49
Tabel	3.21	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 10	51
Tabel	3.22	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 10	52
Tabel	3.23	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 11	54
Tabel	3.24	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 11	55
Tabel	3.25	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 12	58
Tabel	3.26	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 12	58
Tabel	3.27	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 13	60
Tabel	3.28	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi	60

		Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 13	
Tabel	3.29	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 14	62
Tabel	3.30	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 14	63
Tabel	3.31	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 15	64
Tabel	3.32	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 15	64
Tabel	3.33	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 16	66
Tabel	3.34	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 16	66
Tabel	3.35	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 17	68
Tabel	3.36	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 dan Realisasi Tahun 2018 terhadap realisasi Tahun 2017 Untuk Sasaran 17	69
Tabel	3.37	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 18	69
Tabel	3.38	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 18	70
Tabel	3.39	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2019 Untuk Sasaran 19	72

Tabel 3.40	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 terhadap realisasi Tahun 2017 Untuk Sasaran 19	72
Tabel 3.41	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 20	74
Tabel 3.42	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 20	75
Tabel 3.43	Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 21	76
Tabel 3.44	Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 21	76
Tabel 3.45	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau periode 1 Januari s/d 31 Desember 2020	79

**TAHUN 2020** 

## DAFTAR GAMBAR





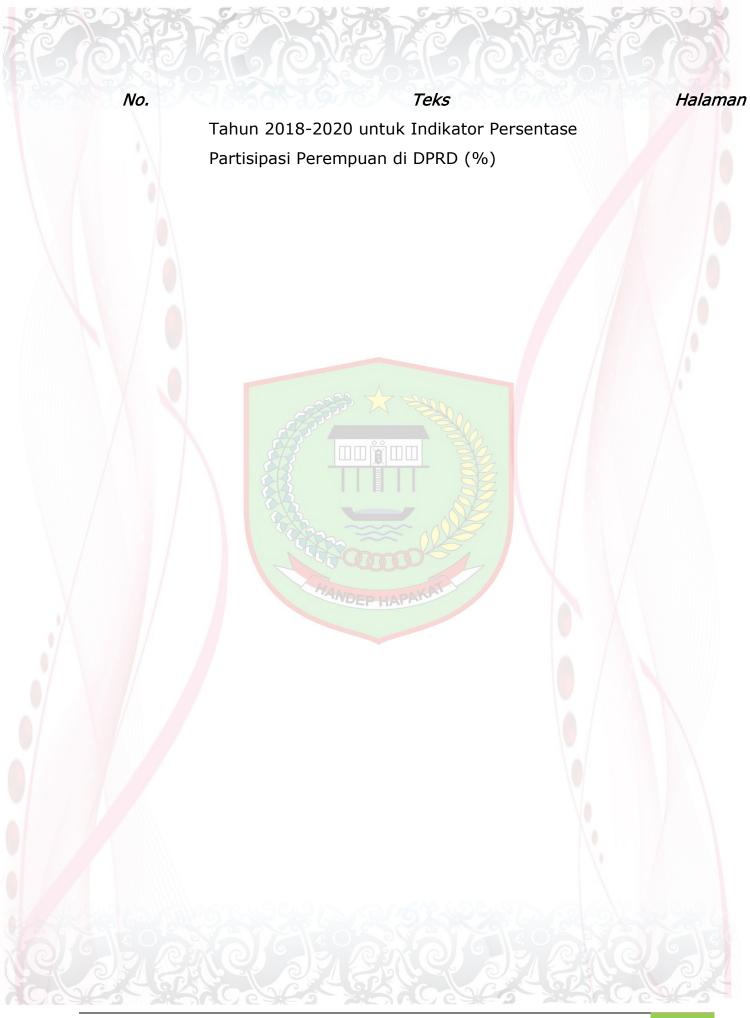
## DAFTAR GAMBAR

No		Teks	<i>Hala<mark>man</mark></i>
Gambar	1.1	Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Pulang Pisau	4
Gambar	1.2	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pulang Pisau	6
Gambar	1.3	Statistik Jumlah PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau	11
		Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2018	
Gambar	1.4	Statistik Jumlah PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau	11
		Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2019	
Gambar	1.5	Statistik Jumlah PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau	12
		Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2020	
Gambar	1.6	Statistik Jumlah PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau	13
		Berdasarkan Tingkat Golongan/Ruang Per Desember	
		2019	
Gambar	1.7	Statistik Jumlah PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau	14
		Berdasarkan Tingkat Golongan/Ruang Per Desember	
		2020	
Gambar	3.1	Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	38
		2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	
		Tahun 2018-2020 untuk Indikator Proporsi Panjang	
		Jalan dalam Kondisi Baik (%)	
Gambar	3.2	Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	40
		2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	
		Tahun 2018-2020 untuk Indikator Persentase Rumah	
		Tangga yang menggunakan listrik (%)	
Gambar	3.3	Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	41
		2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	

No.	Teks	Halaman
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Persentase	
	Penduduk berakses Air Bersih (%)	
Gambar 3.4	Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	42
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Persentase Irigasi	
	Kabupaten Pulang Pisau dalam Kondisi Baik (%)	
Gambar 3.5	Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	44
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Ketaatan	
	pembangunan terhadap RTRW (%)	
Gambar 3.6	Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	45
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Rasio Permukiman	
	Layak Huni (%)	
Gambar 3.7	Diag <mark>r</mark> am Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	47
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Persentase	
	Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB (%)	
Gambar 3.8	Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	48
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Kontribusi	
	Pertanian dalam arti luas dalam PDRB (%)	
Gambar 3.9	Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	50
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Produksi Perikanan	
	(Ton/Tahun)	
Gambar 3.10	Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	<i>53</i>
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	

No.	Teks	Halaman
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Status Mutu Air	
	(%)	
Gambar 3.11	Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	<i>5</i> 4
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Indeks Kualitas	
	Udara (%)	
Gambar 3.12	Diagram Perbandingan Perolehan Realisas <mark>i T</mark> ahun	<i>55</i>
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Jumlah Hotspot	
	(Titik)	
Gambar 3.13	Diag <mark>r</mark> am Perbandingan Perolehan Rea <mark>l</mark> isasi Tahun	56
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Luas Kebakaran	
	(Ha)	
Gambar 3.14	Diag <mark>r</mark> am Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	59
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Rata-rata Lama	
	Sekolah (Tahun)	
Gambar 3.15	Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	59
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Tingkat Partisipasi	
	Angkatan Kerja (%)	
Gambar 3.16	Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	61
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Angka Harapan	
	hidup (Tahun)	
Gambar 3.17	Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	63
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	

No.	Teks	Halaman
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Jumlah Koperasi	
	Aktif (Koperasi)	
Gambar 3.18	Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	65
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Jumlah Kunjungan	
	Wisata (Orang)	
Gambar 3.19	Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	67
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Tingkat	
	Pengangguran Terbuka (%)	
Gambar 3.20	Diag <mark>r</mark> am Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	70
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Persentase	
	Perangkat Daerah Yang menerapkan e-government	
	(%)	
Gambar 3.21	Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	73
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Nilai SAKIP	
	(Kategori)	
Gambar 3.22	Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	75
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Jumlah Rumah	
	Ibadah (Unit)	
Gambar 3.23	Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	77
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	
	Tahun 2018-2020 untuk Indikator Jumlah Medali	
	Olahraga (Medali)	
Gambar 3.24	Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun	78
	2018-2019-2020 terhadap target kinerja RPJMD	



**TAHUN 2020** 

## BAB I PENDAHULUAN







### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung jawab tertentu dan diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas tersebut. Untuk melaksanakan mandat tersebut diperlukan adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja ini juga merupakan upaya berbaikan dan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya, hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

### A. LATAR BELAKANG

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 adalah adanya keinginan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk mewujudkan *Good governance*, berlandaskan pada *TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999* tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Perwujudan *Good governance* ini diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.



Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 antara lain menyebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B.** MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas seseorang atau pimpinan kolektif lembaga/instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah. Oleh karena itu LKj juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik.

Bagian akhir dari SAKIP adalah penyusunan Laporan Kinerja (LKj). LKj disusun pada akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, dimana capaian kinerja dikomunikasikan kepada para *stakeholders* (Kementrian PAN dan RB, DPRD dan Masyarakat).

LKj memiliki dua fungsi utama sekaligus. *Pertama*, LKj merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. *Kedua*, LKJ merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja *(performance improvement)* organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

## C. KONDISI UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

### 1. Kondisi Geografis

Secara Geografis Kabupaten Pulang Pisau terletak di daerah khatulistiwa, yaitu antara 10° sampai 0° Lintang Selatan dan 110° sampai 120° Bujur Timur.



Wilayah Kabupaten Pulang Pisau memiliki potensi strategis dalam konstelasi wilayah yang lebih luas, yaitu:

- Terletak di jalan trans Kalimantan, sehingga dapat memberikan dampak yang besar terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Pulang Pisau pada masa yang akan datang.
- 2. Kabupaten Pulang Pisau yang secara geografis berdekatan dengan Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan daerah penyangga atau hinterland bagi pengembangan wilayah ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3. Implikasi tidak langsung mengakibatkan Pulang Pisau sebagai ibukota Kabupaten Pulang Pisau, menjadi wilayah yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi pola dan jalur pergerakan kegiatan penduduk menuju ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini mempunyai wilayah dengan luas 998.001 Ha atau sekitar 6,50 % dari luas Kalimantan Tengah (15.356.400 Ha).

Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau dikepalai oleh Bupati dan Wakil Bupati yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 8 kecamatan yang terdiri dari 95 desa dan 4 kelurahan. Ibukota Kabupaten Pulang Pisau terletak di Pulang Pisau.

Secara administratif wilayah Kabupaten Pulang Pisau berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas

b. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan

Kota Palangka Raya

c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas

d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa



Tabel 1.1

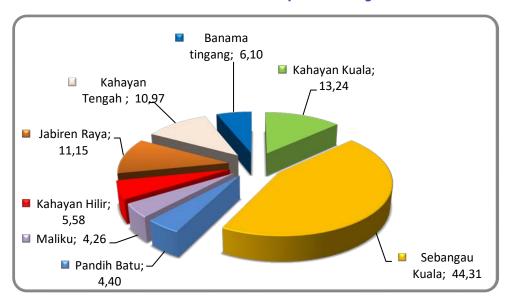
Jumlah Kecamatan, Ibu Kota, Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan masing-masing
Kecamatan di Kabupaten
Pulang Pisau

No.	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase (%) Terhadap	Jumlah
NO.			(Ha)	Luas Wilayah	Desa/Kelurahan
1.	Kahayan Kuala	Bahaur Basantan	132.124	13,24	12
2.	Sebangau Kuala	Sebangau Permai	442.254	44,31	8
3.	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	43.873	4,40	16
4.	Maliku	Maliku Baru	42.561	4,26	15
5.	Kahayan Hilir	Pulang Pisau	55.640	5,58	7
6.	Jabiren Raya	Jabiren	111.232	11,15	8
7.	Kahayan Tengah	Bukit Rawi	109.475	10,97	14
8.	Banama Tingang	Bawan	60.842	6,10	15
	Jumlah	•	998.001	100,00	95

Sumber Data RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023

Kecamatan Sebangau Kuala merupakan wilayah kabupaten terluas di Kabupaten Pulang Pisau dengan luas 442.254 Ha atau sekitar 44,31 persen terhadap luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan wilayah terkecil di Kabupaten Pulang Pisau adalah Kecamatan Maliku yaitu seluas 42.561 Ha atau 4,26 persen terhadap luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Gambar 1.1
Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Pulang Pisau





### 2. Penduduk Kabupaten Pulang Pisau

Penduduk Kabupaten Pulang Pisau tahun 2020 sebanyak 133.376 jiwa yang terdiri atas 69.169 jiwa penduduk laki-laki dan 64.207 jiwa penduduk perempuan. Berikut jumlah penduduk Kabupaten Pulang Pisau pada masing-masing kecamatan berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk pada masing-masing Kecamatan berdasarkan jenis kelamin Kabupaten

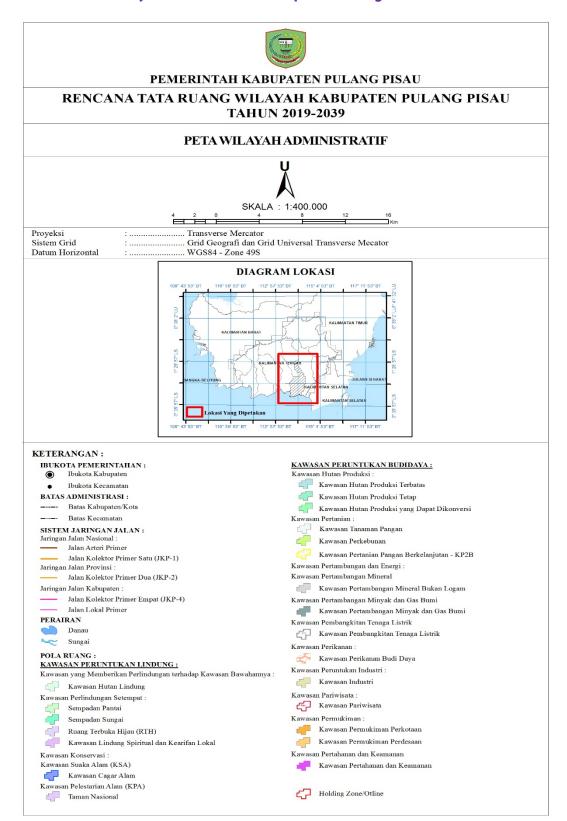
Pulang Pisau

No.	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
			Laki-Laki	Perempuan	renduduk
1.	Kahayan Kuala	Bahaur Basantan	10.327	9.589	19.916
2.	Sebangau Kuala	Sebangau Permai	3.646	3.004	6.650
3.	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	10.687	10.070	20.757
4.	Maliku	Maliku Baru	13.511	12.439	25.950
5.	Kahayan Hilir	Pulang Pisau	16.425	15.525	31.950
6.	Jabiren Raya	Jabiren	4.788	4.327	9.115
7.	Kahayan Tengah	Bukit Rawi	4.670	4.411	9.081
8.	Banama Tingang	Bawan	5.115	4.842	9.957
Jumlah			69.169	64.207	133.376

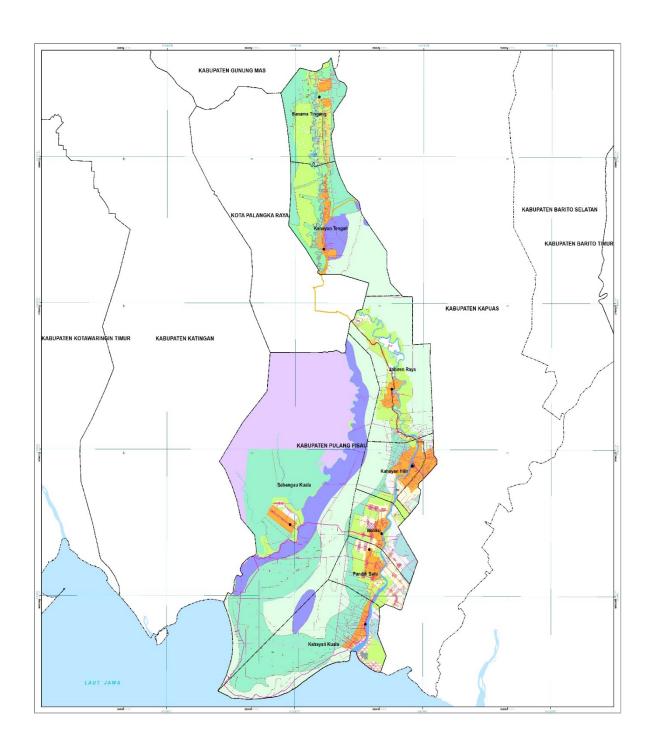
Sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pulang Pisau.



## Gambar 1.2 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Pulang Pisau









### 2. Sejarah Berdirinya Kabupaten Pulang Pisau

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, membuka peluang untuk melaksanakan otonomi daerah yang selama pemerintahan sebelumnya relatif tertutup. Peluang ini dimanfaatkan dengan baik oleh tokoh-tokoh masyarakat, Pemerintah dan Kabupaten DPRD Kabupaten (Induk), Pemerintah dan DPRD Povinsi KalimantanTengah, sehingga Pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukkan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180).

Kabupaten Pulang Pisau terbentuk melalui UU No. 5 Tahun 2002 tersebut, memberi kesempatan kepada warga masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau untuk lebih berperan dalam meningkatkan harkat, martabat dan kualitas hidup dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya daerah sebagai bagian dari budaya Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 2002, dikatakan bahwa Kabupaten Pemekaran diberi kesempatan mengembangkan diri selama 3 tahun dan setelah itu tidak lagi memperoleh dukungan pendanaan dari kabupaten induk. Dengan demikian periode 3 tahun tersebut merupakan masa kritis dan harus dimanfaatkan secara maksimal bagi kelangsungan keberadaan Kabupaten Pulang Pisau.

### 3. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah membentuk lembaga perangkat daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, yang meliputi: kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) maka pada tanggal 22 Desember 2016 telah ditetapkan Peraturan



Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

Adapun susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

No.	Susunan Perangkat Daerah			
1	Sekretariat Daerah			
2	Sekretariat DPRD			
3	Inspektorat			
4	Dinas Pendidikan			
5	Dinas Kesehatan			
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
8	Satuan Polisi Pamong Praja			
9	Dinas Sosial			
10	Dinas Perhubungan			
11	Dinas Lingkungan Hidup			
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
18	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian			
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga			
22	Dinas Pertanian			
23	Dinas Perikanan			
24	Dinas Ketahanan Pangan			
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
26	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
30	Kecamatan			



### 4. Personalia

Berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, Nomor: 800/77/BKPP/II/2021, tanggal 3 Februari 2021, perihal Data Kepegawaian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020, Jumlah pegawai Kabupaten Pulang Pisau per Desember 2020 adalah sebanyak 3216 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 jumlah pegawainya sebanyak 3353 orang, maka dalam hal ini mengalami pengurangan, dikarenakan adanya PNS yang pensiun, meninggal dunia dan mutasi PNS antar daerah pada tahun 2020 yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1.4

Rekapitulasi PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Jenjang
Pendidikan Per Desember 2018, 2019 & 2020

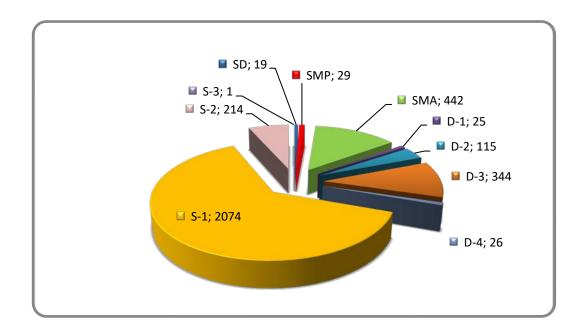
Tingkat Pendidikan		Jumlah Pegawai Tahun 2018	Jumlah Pegawai Tahun 2019	Jumlah Pegawai Tahun 2020
1	SD	19	17	16
2	SMP	29	25	20
3	SMA/SMK	442	406	354
4	D – 1	25	24	11
5	D-2	115	98	70
6	D-3	344	408	410
7	D-4	26	28	38
8	S – 1	2074	2136	2079
9	S – 2	214	210	217
10	S – 3	1	1	1
Jumlah		3289	3353	3216

Sumber Data: BKPP Kab. Pulang Pisau



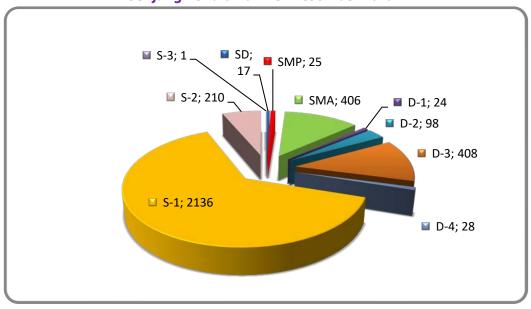
Gambar 1.3

Statistik Jumlah PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Jenjang
Pendidikan Per Desember 2018



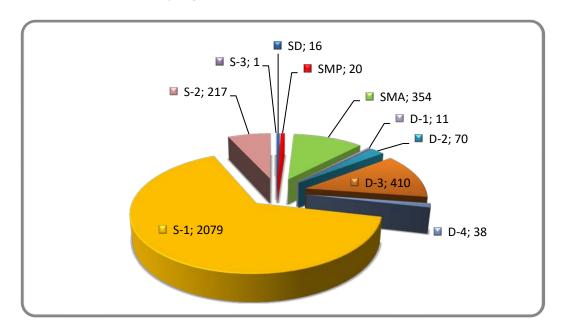
Gambar 1.4

Statistik Jumlah PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Per Desember 2019





Gambar 1.5 Statistik Jumlah PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2020

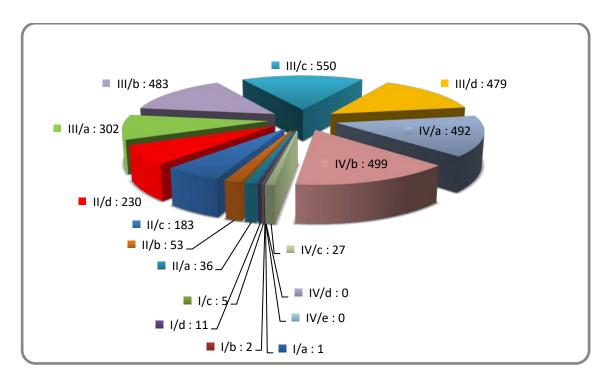


Tabel 1.5 Rekapitulasi PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan **Golongan/Ruang Per Desember 2019** 

No.	Ruang	Golongan				Jumlah
INO.		- 1	II	III	IV	Juliliali
1	Α	1	36	302	492	831
2	В	2	53	483	499	1037
3	С	5	183	550	27	765
4	D	11	230	479	0	720
5	Е	0	0	0	0	0
J	umlah	19	502	1814	1018	3353





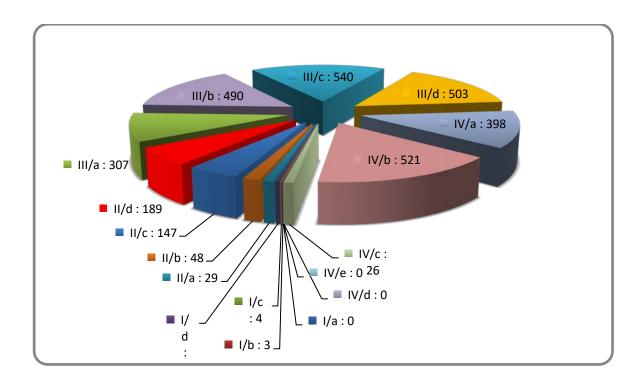


Tabel 1.6 Rekapitulasi PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan **Golongan/Ruang Per Desember 2020** 

No.	Buone	Golongan				Jumlah
	Ruang	ı	II	III	IV	Julillali
1	Α	0	29	307	398	734
2	В	3	48	490	521	1062
3	C	4	147	540	26	717
4	D	11	189	503	0	703
5	E	0	0	0	0	0
Jumlah		18	413	1840	945	3216



Gambar 1.7 Statistik Jumlah PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Tingkat Golongan/Ruang Per Desember 2020





D.

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj)

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau ini dilakukan dengan membentuk fokus grup, yang berperan dalam merumuskan kembali atau menguraikan lebih lanjut rumusan sasaran yang tertuang dalam Rencana Stratejik / Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018–2023 menjadi sasaran yang lengkap dengan indikator kinerjanya. Kegiatan tahun 2020 yang sudah dilaksanakan oleh perangkat daerah akan dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

#### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

#### **LAMPIRAN**

- PERJANJIAN KINERJA
- LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU

# LAPORAN KINERJA Kabupaten Pulang Pisau

**TAHUN 2020** 

# BAB 11 PERENCANAAN KINERJA







#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dimulai dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023 yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur pemerintah dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menetapkan Rencana Strategis 2018-2023 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2018-2023. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau senantiasa bertumpu pada nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rumusan nilai luhur di Bumi Handep Hapakat.

# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2018 – 2023

RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai landasan atau pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023.



RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023 sendiri disusun dengan menganalisa beberapa hal penting yang menggambarkan pencapaian pembangunan beberapa tahun terakhir, sebagai pijakan dalam pengambilan kebijakan yang akan datang. Bertolak dari gambaran capaian pembangunan beberapa tahun terakhir yang meliputi kondisi daerah dan pengelolaan keuangan daerah, maka akan dapat diidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan pembangunan.

Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja.

Komponen-komponen RPJMD tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pernyataan Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pulang Pisau selama lima tahun (2018-2023) adalah sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu:

VISI

YANG INOVATIF, MAJU, BERKEADILAN, DAN SEJAHTERA

Visi di atas terdiri atas 4 frase (bagian), yaitu Inovatif, Maju,Berkeadilan dan Sejahtera yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :



#### a. Inovatif

Memiliki makna bahwa pemerintah daerah bersama masyarakat dan dunia usaha maupun melakukan inovasi yang mana daerah di masa kini dan masa depan akan selalu berorientasi pada kemampuan melakukan inovasi-inovasi. Inovasi diperlukan sebagai bentuk kemampuan daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Inovasi Daerah diharapkan berbentuk inovasi tata kelola Pemerintah Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### b. Maju

Memiliki makna bahwa kualitas sumber daya manusia yang terus membaik yang ditandai dengan terus membaiknya angka IPM Kabupaten Pulang Pisau, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta daya saing dan daya Tarik daerah yang terus membaik. Upaya secara terus menerus untuk menciptakan SDM yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan, berlandaskan iman menjadi hal yang sangat penting. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

#### c. Berkeadilan

Diartikan bahwa segala upaya dan hasil berbagi sektor pembangunan dirasakan masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Pelayanan pemerintah yang prima merupakan syarat penting untuk dapatmendorong proses pembangunan daerah secara cepat, adil dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintah berjalan secara demokrasi, tata hukum, transparan, menerapkan system perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan. Membaiknya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap sarana dan prasarana publik yang baik serta berkembangnya wilayah-wilayah hilir/pesisir infrastruktur perkotaan dan pedesaan yang baik.



#### d. Sejahtera

Diartikan segala upaya pemanfaatan potensi daerah oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah memberikan peningkatan taraf kehidupan masyarakat secara ekomomis dan sosial, dan sejahtera lahir dan batin. Sebelum kondisi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang mampu bekerja dan memperoleh pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar, meliputi sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan secara layak dan memadai, sehingga dapat memacu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pulang Pisau serta menurunkan angka kemiskinan masyarakat.

#### 2. Pernyataan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk pencapaian visi diatas ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu sebagai berikut:



#### MISI

- 1. Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman.
- 2. Peningkatan Produktivitas Hasil Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan.
- 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
- 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- 5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan.
- 6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (Good and Clean Governance).
- 7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan.

#### 3. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melakukan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam mewujutkan visi Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang inovatif, maju, berkeadilan dan sejahtera melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sarana yang akan dicapai.

Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksana setiap urusan Pemerintahan Daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:



#### **TUJUAN**

- 1) Meningkatkan sebaran infrastruktur pembangunan wilayah;
- 2) Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Ekonomi Hijau;
- 3) Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan Daya Saing Masyarakat Pulang Pisau;
- 5) Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan;
- 6) Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik;
- 7) Meningkatkan peran Masyarakat Dalam Pembangunan.



#### 4. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangka daerah. Sasaran dari tujuan pembangunan diatas adalah sebagai berikut:

#### **SASARAN**

- 1) Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi;
- 2) Meningkatnya layanan kelistrikan;
- 3) Meningkatnya Akses Air Bersih;
- 4) Meningkatnya kualitas jaringan irigasi;
- 5) Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang;
- 6) Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni;
- 7) Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan;
- 8) Meningkatnya produksi pertanian;
- 9) Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap;
- 10) Meningkatnya Status Lingkungan Hidup;
- 11) Menurunnya luasan kebakaran hutan dan lahan;
- 12) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
- 13) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- 14) Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam ekonomi lokal;



- 15) Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap ekonomi lokal;
- 16) Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat;
- 17) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- 18) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- 19) Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah;
- 20) Meningkatnya peran organisasi keagamaan;
- 21) Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

#### 5. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. IKU Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 – 2023 yang terdapat dalam BAB VIII halaman 1-3.

IKU Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat *outward looking* yaitu perspektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan peran utama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perspektif kedua bersifat *inward looking* yang menunjukkan manfaat bagi *stakeholders* internal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis.



Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*).

#### Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Perda Nomor 02 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kab. Pulang Pisau Tahun 2018-2023

#### Tujuan 1 : Meningkatkan sebaran infrastruktur pembangunan wilayah

Sasaran 1.1. Meningkatny	a jaringan jalan yang handal dan terintegrasi
Indikator Kinerja Utama	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)
Sasaran 1.2. Meningkatny	a layanan kelistrikan
Indikator Kinerja Utama	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (%)
Sasaran 1.3. Meningkatny	a Akses Air Bersih
Indikator Kinerja Utama	Persentase Penduduk berakses Air Bersih (%)
Sasaran 1.4. Meningkatny	a kualitas jaringan irigasi
Indikator Kinerja Utama	Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau dalam Kondisi Baik (%)
Sasaran 1.5. Meningkatny	a kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang
Indikator Kinerja Utama	Ketaatan pembangunan terhadap RTRW (%)
Sasaran 1.6. Meningkatny	a akses masyarakat terhadap rumah layak huni
Indikator Kinerja Utama	Rasio Permukiman Layak Huni (%)



#### Tujuan 2 : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Ekonomi Hijau

Sasaran 2.1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan		
Indikator Kinerja Utama	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB (%)	

Sasaran 2.2. Meningkatnya produksi pertanian	
Indikator Kinerja Utama	Kontribusi Pertanian dalam arti luas dalam PDRB (%)

Sasaran 2.3. Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap	
Indikator Kinerja Utama	Produksi perikanan (Ton/Tahun)

#### Tujuan 3 : Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sasaran 3.1. Meningkatnya Status Lingkungan Hidup	
Indikator Kinerja Utama	Status Mutu Air
	Indeks Kualitas Udara

Sasaran 3.2. Menurunnya luasan kebakaran hutan dan lahan		
Indikator Kinerja Utama	Jumlah Hotspot (Titik)	
	Luas Kebakaran (Ha)	

#### Tujuan 4 : Meningkatkan Daya Saing Masyarakat Pulang Pisau

Sasaran 4.1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		
Indikator Kinerja Utama	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	
	TPAK – Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	

Sasaran 4.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pulang pisau	
Indikator Kinerja Utama	Angka harapan hidup (Tahun)



#### Tujuan 5 : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan

Sasaran 5.1. Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam ekonomi lokal		
Indikator Kinerja Utama Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)		
Sasaran 5.2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap ekonomi lokal		
Indikator Kinerja Utama	Jumlah kunjungan wisata (Orang)	

Sasaran 5.3. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	
Indikator Kinerja Utama	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

#### Tujuan 6 : Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran 6.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	
Indikator Kinerja Utama	Opini BPK terhadap LKPD (Opini)

Sasaran 6.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
Indikator Kinerja Utama	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e- government (%)

Sasaran 6.3. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	
Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP (Kategori)	

#### Tujuan 7 : Meningkatkan peran Masyarakat Dalam Pembangunan

Sasaran 7.1. Meningkatnya peran organisasi keagamaan	
Indikator Kinerja Utama Jumlah Rumah Ibadah (Unit)	

Sasaran 7.2. Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	
Indikator Kinerja Utama	Jumlah medali olahraga (Medali)
	Persentase Partisipasi Perempuan di DPRD (%)



#### B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini di tahun 2020 disusun perjanjian kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat *outcome*.

Pada tahun 2020, perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renstra yang telah dimodifikasi, perjanjian kinerja atau dokumen Penetapan Kinerja yang memuat 25 (dua puluh lima) indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur tercapainya delapan sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020
(Perubahan)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)	75,98
2.	Meningkatnya layanan kelistrikan	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (%)	94,20
3.	Meningkatnya Akses Air Bersih	Persentase Penduduk berakses Air Bersih (%)	65,56
4.	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau dalam Kondisi Baik (%)	60,80
5.	Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	Ketaatan pembangunan terhadap RTRW (%)	100,00
6.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni	Rasio Permukiman Layak Huni (%)	0,61



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB (%)	9,10
8.	Meningkatnya produksi pertanian	Kontribusi Pertanian dalam arti luas dalam PDRB (%)	38,50
9.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap	Produksi perikanan (Ton/Tahun)	24.125,42
10.	Meningkatnya Status	Status Mutu Air	5,00
	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	84,00
11.	Menurunnya luasan	Jumlah Hotspot (Titik)	1.065,00
	kebakaran hutan dan lahan	Luas Kebakaran (Ha)	10,65
12.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,77
		TPAK – Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,21
13.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pulang pisau	Angka harapan hidup (Tahun)	70,03
14.	Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam ekonomi lokal	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)	156,00
15.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap ekonomi lokal	Jumlah kunjungan wisata (Orang)	11.000,00
16.	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,63
17.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap LKPD (Opini)	WTP/100%
18.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-government (%)	81,08
19.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP (Kategori)	CC/60%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
20.	Meningkatnya peran organisasi keagamaan	Jumlah Rumah Ibadah (Unit)	533,00
21.	Meningkatnya peran	Jumlah medali olahraga (Medali)	30,00
	pemuda dan perempuan	Persentase Partisipasi	29,00
	dalam pembangunan	Perempuan di DPRD (%)	

Target di atas merupakan target perjanjian kinerja yang disesuaikan dengan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

#### C. Strategi dan Arah Kebijakan

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pulang Pisau yaitu Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2018 sampai dengan 2023. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran- sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pulang Pisau ditunjukkan pada Tabel 2.3.



Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 - 2023

Misi 1 : Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasaran Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman	
Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan layanan infrastruktur	Meningkatkan kualitas sarana prasarana serta
yang menjangkau seluruh wilayah	konektivitas jalan dan jembatan
	Pengembangan layanan jaringan kelistrikan
	Meningkatkan layanan air bersih melalui jaringan air
	minum perkotaan dan perdesaan
	Meningkatkan kualitas sarana prasarana jaringan
	irigasi
	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang
	terhadap RTRW
Peningkatan layanan transportasi	Optimalisasi fungsi pelabuhan laut
yang terjangkau	Peningkatan jaringan simpul transportasi
Peningkatan penanganan	Pengembangan sistem pembiayaan dan
perumahan, permukiman dan	penyediaan perumahaan
pertanahan	Penataan dan peningkatan kualitas permukiman
	sil Sumberdaya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan
Strategi	Arah Kebijakan
Mendorong hilirisasi komoditi	Pengembangan kawasan industri
unggulan daerah	Peningkatan kemitraan dengan pelaku ekonomi
Peningkatan daya saing produk	Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana
pertanian dalam arti luas	pertanian dan perikanan
	Peningkatan penerapan teknologi tepat guna
	Pemberdayaan kelompok tani dan nelayan
Misi 3 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan	
Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas pengelolaan	Pengendalian pencemaran udara dan air
lingkungan hidup dan mitigasi	Penegakan hukum terhadap pelanggaran
bencana	peraturan LH



	Restorasi Gambut	
	Peningkatan Ketangguhan Masyarakat dalam	
	mitigasi bencana	
Misi 4 : Peningkatan Kualitas Sumber		
Strategi	Arah Kebijakan	
Peningkatan Kualitas pelayanan	Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan	
pendidikan	Pemerataan penempatan tenaga pendidik (guru)	
•	Meningkatkan kualitas guru melalui sertifikasi	
Peningkatan aksesibilitas dan	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	
kualitas pelayanan kesehatan	Pemerataan penempatan tenaga kesehatan	
masyarakat		
,	asyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan	
Strategi	Arah Kebijakan	
Pengembangan ekonomi	Pemberdayaan koperasi dan UMKM	
kerakyatan		
Peningkatan kualitas pengelolaan	Peningkatan pengelolaan destinasi wisata	
wisata	Peningkatan pengelolaan seni budaya	
	Peningkatan promosi paket wisata	
Peningkatan kualitas penanganan	Peningkatan sarana dan prasarana layanan PMKS	
PMKS	Peningkatan pembinaan keterampilan PMKS	
Peningkatan kualitas angkatan kerja	Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja	
Misi 6 : Mewujudkan aparatur pemer	intah yang bersih, berwibawa dan profesional (Good	
and Clean Governance)		
Strategi	Arah Kebijakan	
Penerapan reformasi birokrasi dan	Revolusi Mental Aparatur	
peningkatan pelayanan public	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
	Penerapanan <i>e-goverment</i> pada instansi	
	pemerintah	
Misi 7 : Pemberdayaan organisasi ke	eagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan	
dalam pembangunan		
Strategi	Arah Kebijakan	
	Pemberian bantuan kegiatan keagamaan	
L		



Peningkatan kualitas layanan	Pemberian insentif pada tokoh adat, pemuka
keagamaan	agama dan guru agama
Peningkatan kualitas pemberdayaan	Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan
pemuda dan olahraga	olahraga
	Peningkatan kualitas pembinaan terhadap
	organisasi kepemudaan
Peningkatan kualitas pemberdayaan	Peningkatan pembinaan kelembagaan perempuan
perempuan	Peningkatan pembinaan perempuan dalam
	keluarga

# LAPORAN KINERJA Kabupaten Pulang Pisau

**TAHUN 2020** 

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA







#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas itu sendiri menurut Mardiasmo (2006:3) diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju good governance berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan mindset dan cultureset penyelengaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (output) menjadi berorientasi kinerja (outcome) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja menjawab pertanyaan untuk apa individu ada, untuk apa organisasi ada, dan untuk apa pemerintah ada?

Dalam tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan 25 (dua puluh lima) indikator, yang termasuk dalam 21 (dua puluh satu) sasaran. Laporan Kinerja tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen RKPD 2020 (sesuai dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020). Indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai, serta juga membandikan target RPJMD yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja output, indikator kinerja hasil dari seluruh kegiatan maupun indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.



Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kabupaten Pulang Pisau menetapkan interpretasi/kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian ratarata atas indikator kinerja menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Urutan Kategori Penilaian Capaian Kinerja

Rentang Capaian (persentase)	Interpretasi
> 100	Sangat Memuaskan
> 80 - 100	<b>Memuaskan,</b> Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
>60 - 80	<b>Baik,</b> Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
> 40 - 60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
> 0 - 40	<b>Kurang,</b> Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.



#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan dokumen RKPD dan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau memiliki 21 (dua puluh satu) Sasaran dan 25 (dua puluh lima) Indikator yang harus dilaksanakan.

Dari 21 (dua puluh satu) Sasaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

- © 4 (empat) sasaran berkategori "Sangat Memuaskan",
- © 14 (empat belas) sasaran berkategori "Memuaskan",
- 🕝 1 (satu) sasaran berkategori "Baik",
- ② 2 (dua) sasaran berkategori "Kurang", yaitu sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2:

Tabel 3.2
Ringkasan Rata-rata Pencapaian Kinerja Program Tahun 2020

No	SASARAN	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	INTERPRETASI	Tabel dan halaman
1	Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	86,15	MEMUASKAN	Tabel 3.3 Halaman 37
2	Meningkatnya layanan kelistrikan	95,85	MEMUASKAN	Tabel 3.5 Halaman 39
3	Meningkatnya Akses Air Bersih	98,38	MEMUASKAN	Tabel 3.7 Halaman 40
4	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	98,40	MEMUASKAN	Tabel 3.9 Halaman 42
5	Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	98,00	MEMUASKAN	Tabel 3.11 Halaman 43
6	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni	96,72	MEMUASKAN	Tabel 3.13 Halaman 44
7	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	94,33	MEMUASKAN	Tabel 3.15 Halaman 46
8	Meningkatnya produksi pertanian	95,24	MEMUASKAN	Tabel 3.17 Halaman 48
9	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap	99,22	MEMUASKAN	Tabel 3.19 Halaman 49
10	Meningkatnya Status Lingkungan Hidup	115,04	SANGAT MEMUASKAN	Tabel 3.21 Halaman 51



No	SASARAN	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	INTERPRETASI	Tabel dan halaman
11	Menurunnya luasan kebakaran hutan dan lahan	519,82	SANGAT MEMUASKAN	Tabel 3.23 Halaman 54
12	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	100,72	SANGAT MEMUASKAN	Tabel 3.25 Halaman 58
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	97,16	MEMUASKAN	Tabel 3.27 Halaman 60
14	Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam ekonomi lokal	93,59	MEMUASKAN	Tabel 3.29 Halaman 62
15	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap ekonomi lokal	2,23	KURANG	Tabel 3.31 Halaman 64
16	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	61,98	BAIK	Tabel 3.33 Halaman 66
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100,00	MEMUASKAN	Tabel 3.35 Halaman 68
18	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	103,33	SANGAT MEMUASKAN	Tabel 3.37 Halaman 69
19	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	80,35	MEMUASKAN	Tabel 3.39 Halaman 72
20	Meningkatnya peran organisasi keagamaan	97,00	MEMUASKAN	Tabel 3.41 Halaman 74
21	Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	36,21	KURANG	Tabel 3.43 Halaman 76
	Rata-rata pencapaian (%)	<i>"108,09"</i>	"SANGAT MEMUASKAN"	



MISI 1

#### Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman.

# Tujuan : Meningkatkan sebaran infrastruktur pembangunan wilayah.

Untuk mewujudkan *Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman* dirumuskan 6 (enam) sasaran yang harus dicapai, yaitu:

- 1. Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi;
- 2. Meningkatnya layanan kelistrikan;
- 3. Meningkatnya Akses Air Bersih;
- 4. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi;
- 5. Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang;
- 6. Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni.

#### Sasaran 1:

#### Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi;

Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Penanggung jawab atas pencapaian sasaran *Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi* tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020
Untuk Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian
1	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	75,98	65,46	86,15
	Rata-rata pencapaian (%)				86,15



Tabel 3.4
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi
Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018
Untuk Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	71,60	72,28	65,46

Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa persentase jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,88% yakni dari 71,60% di tahun 2018 menjadi 72,28% di tahun 2019. Untuk tahun 2020 mengalami penurunan dari 65,46% dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 3.1

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 – 2020 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020
Untuk Indikator Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)



Semakin tinggi nilai proporsi panjang jaringan jalan akan memberikan dampak yang baik bagi penduduknya ataupun bagi daerah itu sendiri. Pembangunan wilayah akan terhambat karena tidak didukung oleh infrastruktur jaringan jalan yang memadai/dipengaruhi oleh akses jaringan jalan yang rusak.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat diketahui kondisi jalan dan status jalan sebagai sarana pendukung peningkatan investasi dan perdagangan di Kabupaten Pulang Pisau.



#### Sasaran 2:

#### Meningkatnya layanan kelistrikan;

Rumah tangga pengguna listrik adalah persentase rumah tangga yang memanfaatkan listrik sebagai penerangannya.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran *Meningkatnya layanan kelistrikan* tersebut adalah Sekretariat Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Sasaran tersebut selanjutnya dirumuskan dalam indikator kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020
Untuk Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian
1	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	%	94,20	90,29	95,85
	Rata-rata pencapaian ( % )				95,85

Tabel 3.6
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi
Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018
Untuk Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	%	93,59	89,60	90,29

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa daerah di Kabupaten Pulang Pisau yang belum mendapatkan fasilitas penerangan yang berasal dari PLN.

Dari tabel 3.6, bahwa rumah tangga teraliri listrik mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 4,26% dibandingkan tahun 2018 dan terjadi peningkatan di tahun 2020 sebesar 0,69% dibandingkan tahun 2019.



Gambar 3.2

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 – 2020 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020
Untuk Indikator Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (%)



#### Sasaran 3:

#### Meningkatnya Akses Air Bersih;

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Fasilitas air minum merupakan hal penting karena sangat menentukan kualitas air minum itu sendiri.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran *Meningkatnya akses air bersih* tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sasaran tersebut selanjutnya dirumuskan dalam indikator kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020
Untuk Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian
1	Persentase Penduduk berakses Air Bersih	%	65,56	64,50	98,38
	Rata-rata pencapaian (%)				98,38



Tabel 3.8
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi
Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018
Untuk Sasaran 3

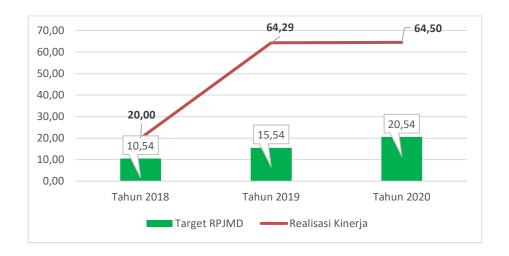
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Persentase Penduduk berakses Air Bersih	%	20,00	64,29	64,50

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa daerah di Kabupaten Pulang Pisau sudah mendapatkan akses air bersih yang berasal dari PDAM.

Dari tabel 3.8, bahwa penduduk berakses air bersih sudah mengalami peningkatan di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 3.3

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 – 2020 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020
Untuk Indikator Persentase Penduduk berakses Air Bersih (%)



#### Sasaran 4:

#### Meningkatnya kualitas jaringan irigasi;

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga



kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran *Meningkatnya kualitas jaringan irigasi* tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sasaran tersebut selanjutnya dirumuskan dalam indikator kinerja pada tahun 2020 yaitu:

Tabel 3.9

Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020
Untuk Sasaran 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian
1	Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau dalam Kondisi Baik	%	60,80	59,83	98,40
	Rata-rata pencapaian (%)				98,40

Tabel 3.10

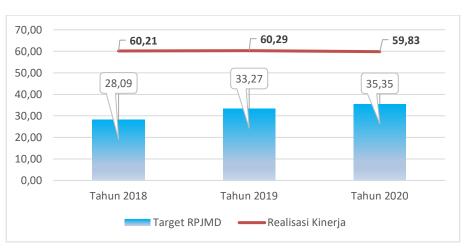
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi
Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018
Untuk Sasaran 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau dalam Kondisi Baik	%	60,21	60,29	59,83

Gambar 3.4

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 – 2020 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020

Untuk Indikator Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau dalam Kondisi Baik (%)





#### Sasaran 5:

#### Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang;

Proses penyusunan RTRW, baik Propinsi, Kabupaten dan Kota terus berjalan sampai saat ini. Sejauh ini progress penyusunan RTRW mulai menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, dan tiap tahapan dalam proses penyusunan RTRW terdata dengan baik pada Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran *Menjaga kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang* tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sasaran tersebut selanjutnya dirumuskan dalam beberapa indikator kinerja pada tahun 2020 yaitu:

Tabel 3.11

Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020

Untuk Sasaran 5

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian
1	Ketaatan pembangunan terhadap RTRW	%	100,00	98,00	98,00
	Rata-rata pencapaian (%)				98,00

Tabel 3.12
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi
Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018
Untuk Sasaran 5

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Ketaatan pembangunan terhadap RTRW	%	98,00	98,00	98,00

Jika diperhatikan pada Tabel 3.12, melalui sasaran *Menjaga kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang* di Kabupaten Pulang Pisau tetap yaitu sebesar 98,00% di tahun 2020.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Pulang Pisau masih belum taat dikarenakan belum bertambahnya jumlah persentase ketaatan terhadap RTRW.



Gambar 3.5

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 – 2020 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020
Untuk Indikator Ketaatan pembangunan terhadap RTRW (%)



#### Sasaran 6:

#### Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni;

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio Permukiman Layak Huni adalah pebandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang dihuni terhadap keseluruhan luas permukiman.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran *Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni* tersebut adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sasaran tersebut dirumuskan ke beberapa indikator kinerja tahun 2020 yaitu:

Tabel 3.13
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020
Untuk Sasaran 6

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian
1	Rasio Permukiman Layak Huni	%	0,61	0,59	96,72
Rata-rata pencapaian (%)					



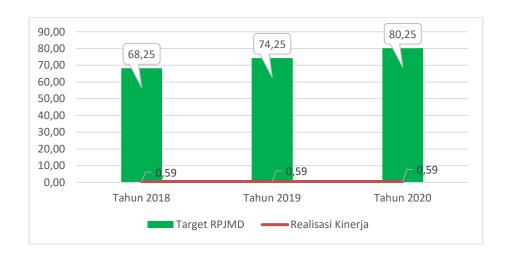
Tabel 3.14
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi
Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018
Untuk Sasaran 6

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Rasio Permukiman Layak Huni	%	0,59	0,59	0,59

Dari data pada tabel 3.14 dapat dilihat tidak mengalami peningkatan, bahwa ketersediaan data rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas wilayah permukiman kumuh dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman.

Angka Target sebesar 0,61% diperoleh dari Luas Wilayah Permukiman Kumuh sebesar 98,00 Ha (berdasarkan SK Bupati dari hasil Proyeksi Per Kecamatan) dibagi Luas Wilayah Permukiman sebesar 16.000,00 Ha. Sedangkan angka Realisasi sebesar 0,59% diperoleh dari Luas Wilayah Permukiman Kumuh sebesar 98,00 Ha (berdasarkan SK Bupati dari hasil Proyeksi Per Kecamatan) dibagi Luas Wilayah Permukiman sebesar 16.557,84 Ha (BPS 2019). Sampai dengan tahun 2020 jumlah permukiman kumuh di Kabupaten Pulang Pisau masih berada di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Maliku dengan jumlah luas 0,25 km². Sehingga rasio permukiman layak huni tahun 2020 masih sama dengan tahun 2019.

Gambar 3.6
Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 – 2020 terhadap target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020
Untuk Indikator Rasio Permukiman Layak Huni (%)





MISI

2

Peningkatan Produktivitas Hasil Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan

# Tujuan : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Ekonomi Hijau.

Untuk *Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia* dirumuskan 7 (tujuh) sasaran yang harus dicapai, yaitu :

- 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan;
- 2. Meningkatnya produksi pertanian;
- 3. Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap.

### Sasaran 7:

#### Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan;

Indikator yang umum dipakai untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi makro suatu daerah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat.

Tabel 3.15

Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2019\*)

Untuk Sasaran 7

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian	
1	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB	%	9,00*)	8,49*)	94,33	
	Rata-rata pencapaian (%)					

<sup>\*)</sup> Angka target dan realisasi yang disajikan tuhun 2019, karena angka realisasi tahun 2020 belum rilis dari BPS Pulang Pisau (sumber data dari Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau-terlampir)



**Tabel 3.16** 

# Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 7

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Persentase Kontribusi Industri	%	8,95	8,49	0,00
	Pengolahan pada PDRB				

Untuk realisasi tahun 2020, tidak dapat disajikan karena akan di rilis pada akhir bulan maret 2021 oleh BPS Pulang Pisau (data dari Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau).

Gambar 3.7

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 terhadap target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020

Untuk Indikator Persentase Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB (%)



## Sasaran 8:

#### Meningkatnya produksi pertanian;

Naik turunnya PDRB biasa juga disebut pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB atas dasar harga konstan karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan kata lain dengan mempergunakan harga konstan, pengaruh inflasi telah ditiadakan. Semakin tinggi kenaikan PDRB, maka makin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.



Tabel 3.17
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020
Untuk Sasaran 8

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian	
1	Kontribusi Pertanian dalam arti luas dalam PDRB	%	38,25*)	36,43*)	95,24	
Rata-rata pencapaian (%)						

<sup>\*)</sup> Angka target dan realisasi yang disajikan tuhun 2019, karena angka realisasi tahun 2020 belum rilis dari BPS Pulang Pisau (sumber data dari Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau-terlampir)

Tabel 3.18
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi
Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018
Untuk Sasaran 8

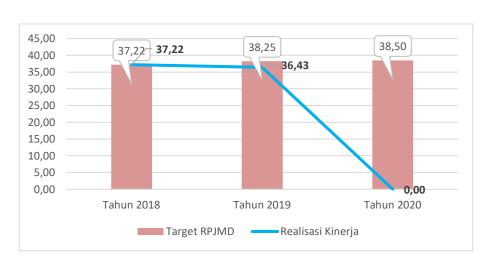
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Kontribusi Pertanian dalam arti luas	%	37,22	36,43	0,00
	dalam PDRB				

Untuk realisasi tahun 2020, tidak dapat disajikan karena akan di rilis pada akhir bulan maret 2021 oleh BPS Pulang Pisau (berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau).

Gambar 3.8

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 terhadap target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020

Untuk Indikator Kontribusi Pertanian dalam arti luas dalam PDRB (%)





## Sasaran 9:

#### Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap;

Produksi Perikanan adalah jumlah produksi ikan dalam satuan ton berbagi target daerah dalam satuan ton dikalikan 100.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran *Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap* adalah Dinas Perikanan. Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.19
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020
Untuk Sasaran 9

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian
1	Produksi perikanan	Ton / Tahun	24.125,42	23.938,12	99,22
	Rata-rata pencapaian (%)				99,22

Tabel 3.20
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi
Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018
Untuk Sasaran 9

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Produksi perikanan	Ton / Tahun	23.493,99	23.589,20	23.938,12

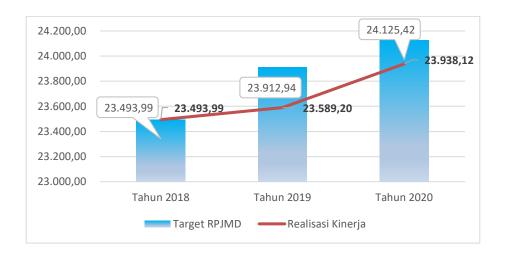
Untuk sektor perikanan terjadi peningkatan di tahun 2020, dari rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2020 yaitu sebesar 23.938,12 ton/thn.



Gambar 3.9

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 – 2020 terhadap target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020

Untuk Indikator Produksi perikanan (Ton/Tahun)





MISI

#### Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan

# Tujuan : Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Untuk *Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan* dirumuskan 2 (dua) sasaran yang harus dicapai, yaitu:

- 1. Meningkatnya Status Lingkungan Hidup;
- 2. Menurunnya luasan kebakaran hutan dan lahan.

# Sasaran 10:

#### Meningkatnya Status Lingkungan Hidup;

Penentuan status mutu air dapat menggunakan Metode *Pollution Index* (PI). Tujuan perhitungan PI adalah untuk menggambarkan secara utuh kualitas air sungai yang ada di lokasi studi. Prosedur perhitungan berpedoman pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Dalam mengetahui pengolahan data dan perhitungan Index Kualitas Udara (IKU) adalah melalui verifikasi data, tabulasi data, perhitungan IKU.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran *Meningkatnya status lingkungan hidup* adalah Dinas Lingkungan Hidup. Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.21

Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020
Untuk Sasaran 10

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian		
1	Status Mutu Air		5,00	4,29	116,55		
2	Indeks Kualitas Udara		84,00	95,36	113,52		
	Rata-rata pencapaian (%)						



Tabel 3.22
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi
Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018
Untuk Sasaran 10

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Status Mutu Air		5,94	4,92	4,29
2	Indeks Kualitas Udara		98,60	92,47	95,36

Pengelolaan kualitas air atas dasar *Pollution Index* (PI) ini dapat memberi masukan pada pengambil keputusan agar dapat menilai kualitas badan air untuk suatu peruntukkan serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kualitas jika terjadi penurunan kualitas akibat kehadiran senyawa pencemar. PI mencakup berbagai kelompok parameter kualitas yang independent dan bermakna. Dengan menggunakan metode PI ini, nilai indeks pencemaran terhadap mutu air dapat dikategorikan menjadi:

Nilai PI	Kategori		
<b>0</b> ≤ <b>PI</b> ≤ <b>1,0</b> Memenuhi Baku Mutu (Kondisi Baik)			
1,0 < PI ≤ 5,0	Cemar Ringan		
5,0 < PI ≤ 10	Cemar Sedang		
PI > 10	Cemar Berat		

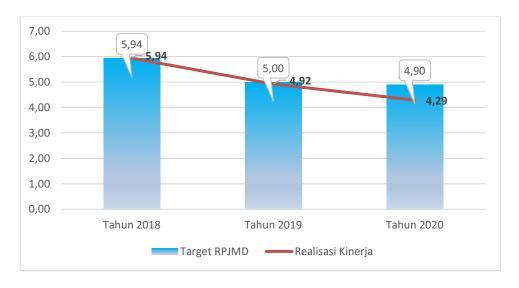
Jika diperhatikan pada Tabel 3.21, di dalam data disebutkan bahwa status pencemaran mutu air di Kabupaten Pulang Pisau dengan realisasi nilai 4,29% (di tahun 2020) masuk kategori Cemar Ringan, angka ini menunjukan peningkatan status mutu air dibandingkan tahun 2019 dengan realisasi nilai 4,92% yang masuk kategori Cemar Ringan, yang artinya bahwa status mutu air di Kabupaten Pulang Pisau semakin membaik.



Gambar 3.10

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 – 2020 terhadap target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020

Untuk Indikator Status Mutu Air (%)



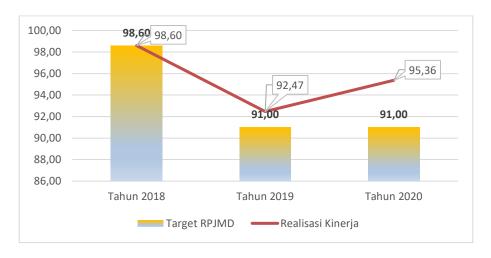
Untuk Indeks Kualitas Udara jika diperhatikan pada Tabel 3.21, disebutkan bahwa Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Pulang Pisau dengan realisasi nilai 95,36% (di tahun 2020) masuk klasifikasi nilai *Unggul*. Dalam hal ini menunjukan terjadinya peningkatan Indeks Kualitas Udara dibandingkan tahun 2019 dengan realisasi nilai 92,47 dengan masih pada klasifikasi nilai *Unggul*, dan mengalami penurunan Indeks Kualitas Udara dibandingkan tahun 2018 dengan realisasi nilai 98,60 dengan masih pada klasifikasi nilai *Unggul* yang artinya bahwa Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Pulang Pisau masih tetap dalam klasifikasi nilai *Unggul*. Berikut klasifikasi nilai Indeks Kualitas Udara:

Indeks Kualitas Udara						
Unggul			X	>	90	
Sangat Baik	82	<	X	≤	90	
Baik	74	<	X	≤	82	
Cukup	66	≤	X	≤	74	
Kurang	58	≤	X	<	66	
Sangat Kurang	50	≤	X	<	58	
Waspada			X	<	50	



Gambar 3.11

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 – 2020 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020
Untuk Indikator Indeks Kualitas Udara (%)



# Sasaran 11:

### Menurunnya luasan kebakaran hutan dan lahan;

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran *Meningkatkan luasan kebakaran hutan dan lahan* adalah Dinas Lingkungan Hidup.

Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.23
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjajian) Tahun 2020
Untuk Sasaran 11

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian			
1	Jumlah Hotspot	Titik	1.065,00	105,00	1.014,29			
2	Luas Kebakaran	На	10,65	42,00	25,36			
	Rata-rata pencapaian (%)							



Tabel 3.24
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi
Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018
Untuk Sasaran 11

	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Ī	1	Jumlah Hotspot	Titik	1.105,00	6.344,00	105,00
ĺ	2	Luas Kebakaran	На	11,05	10,68	42,00

Beberapa indikator yang umum dipergunakan dalam mengukur tingkat kebakaran hutan dan lahan antara lain Titik Panas (hotspot) dan luasan tapak bakar (luas kebakaran hutan dan lahan). Pada tahun 2018 jumlah hotspot di Kabupaten Pulang Pisau mencapai 1.105,00 titik dengan luas tapak bakar mencapai 11,05 Ha. Sedangkan untuk tahun 2019 jumlah hotspot di Kabupaten Pulang Pisau mencapai 6.344,00 titik dengan luas tapak bakar seluas 10,68 Ha. Untuk tahun 2020 jumlah hotspot mencapai 105,00 titik dengan luas tapak bakar seluas 42,00 Ha.

Gambar 3.12

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 – 2020 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020
Untuk Indikator Jumlah Hotspot (Titik)

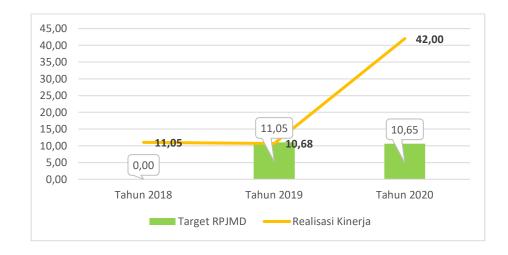


Semakin sedikit titik hotspot maka potensi luasan bencana kebakaran hutan dan lahan semakin sedikit, hotspot sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, semakin panas maka potensi kemunculan hotspot juga semakin tinggi, 1 titik hotspot menandakan areal seluas 1 grid atau 1 km<sup>2</sup>.



Gambar 3.13

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 – 2020 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020
Untuk Indikator Luas Kebakaran (Ha)



Kebakaran kawasan hutan yang tertangani di Kabupaten Pulang Pisau mengalami peningkatan sebesar 0,37% di tahun 2019 dari 11,05 ha (tahun 2018) menjadi 10,68 ha (tahun 2019). Untuk tahun 2020 kebakaran kawasan hutan yang tertangani mengalami peningkatan sebesar 42,00%.



MISI



#### Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

#### Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Masyarakat Pulang Pisau.

Untuk *Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri* dirumuskan 2 (dua) sasaran yang harus dicapai, yaitu:

- 1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
- 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

## Sasaran 12:

#### Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;

Secara umum Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 Tahun ke atas di Kabupaten Pulang Pisau sampai tahun 2020 mencapai 9,18 Tahun atau mengalami peningkatan dari tahun 2019 mencapai 8,74 Tahun atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 (7,67 Tahun, sebagaimana data di bawah ini).

Sedangkan untuk keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, yaitu penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Keterlibatan ini bisasanya disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan jumlah penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran *Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat* adalah Dinas Pendidikan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2020 sebagai berikut:



Tabel 3.25

Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020

Untuk Sasaran 12

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,77	9,18	104,68
2	TPAK – Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,21	72,77	96,76
	Rata-rata pencapaian ( % )				100,72

Tabel 3.26
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi
Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018
Untuk Sasaran 12

	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Ī	1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,67	8,74	9,18
ĺ	2	TPAK – Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	74,72	75,31	72,77

Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Pulang Pisau baru mampu menempuh Pendidikan sampai dengan kelas 3 SMP atau putus sekolah dikelas 1 SMU (sebagaimana data yang tersaji pada Tabel 3.26 di atas).

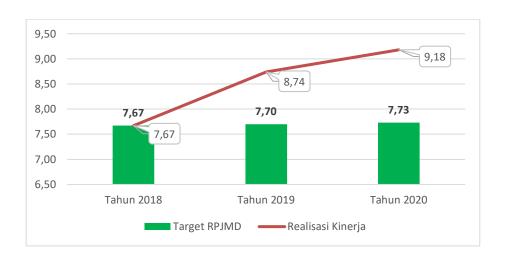
Berdasarkan pada Tabel 3.26, jika dibandingkan realisasi selama periode tahun 2018-2019, melalui sasaran *Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat* di Kabupaten Pulang Pisau bahwa TPAK mengalami peningkatan sebesar 0,79% dari 74,72% menjadi 75,31%. Untuk realisasi di periode tahun 2019-2020, bahwa TPAK mengalami penurunan sebesar 3,37% dari 75,31% menjadi 72,77%.

Artinya bahwa pada tahun 2018 diumpamakan dari perwakilan 100 orang yang masuk kategori usia kerja, sekitar 74 orang diantaranya termasuk angkatan kerja yang aktif secara ekonomis baik bekerja maupun menganggur. Sedangkan untuk tahun 2019 bahwa diumpamakan dari perwakilan 100 orang yang masuk kategori usia kerja, sekitar 75 orang diantaranya termasuk angkatan kerja yang aktif secara ekonomis baik bekerja maupun menganggur. Dan di tahun 2020 bahwa diumpamakan dari perwakilan 100 orang yang masuk kategori usia kerja, sekitar 72 orang diantaranya termasuk angkatan kerja yang aktif secara ekonomis baik bekerja maupun menganggur.



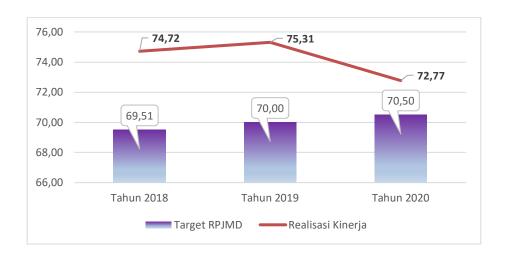
Gambar 3.14

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 – 2020 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020
Untuk Indikator Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)



Gambar 3.15

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020
Untuk Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)



Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil peningkatan keterampilan kerja masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau mengalami penurunan di akhir tahun 2020, dikarenakan dampak covid-19 yang mengakibatkan jumlah penduduk yang bekerja (PYB) menurun dan jumlah penganggur (P) bertambah.



# Sasaran 13:

#### Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

Angka harapan hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor kesehatan.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran *Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat* adalah Dinas Kesehatan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.27

Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020
Untuk Sasaran 13

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian
1	Angka harapan hidup	Tahun	70,03	68,04	97,16
	Rata-rata pencapaian ( % )				97,16

Tabel 3.28
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi
Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018
Untuk Sasaran 13

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Angka harapan hidup	Tahun	67,75	67,90	68,04

Jika diperhatikan pada Tabel 3.28, Di dalam data disebutkan bahwa Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Pulang Pisau sebesar 68,04 tahun pada tahun 2020.

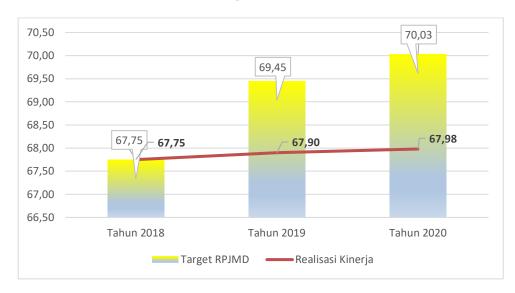
Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2018-2020 mengalami peningkatan di tahun tahun 2020, artinya Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berhasil dalam program / kegiatan meningkatkan angka harapan hidup.



Gambar 3.16

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 – 2020 terhadap target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020

Untuk Indikator Angka Harapan Hidup (Tahun)





#### MISI 5

# Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan

#### Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan.

Untuk *Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan* dirumuskan 2 (dua) sasaran yang harus dicapai, yaitu:

- 1. Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam ekonomi lokal;
- 2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap ekonomi lokal;
- 3. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat.

# Sasaran 14:

#### Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam ekonomi lokal;

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Data persentase Koperasi Aktif yang bersumber dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi penanggung jawab atas pencapaian sasaran *Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam ekonomi lokal* Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.29

Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020

Untuk Sasaran 14

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian
1	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	156,00	146,00	93,59
	Rata-rata pencapaian (%)				93,59



**Tabel 3.30** 

# Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 14

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	138,00	140,00	146,00

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Pulang Pisau setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020. Peningkatan terjadi pada tahun 2020, peningkatan persentase koperasi aktif menunjukkan bahwa peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi daerah kabupaten menjadi penting.

Semakin banyak koperasi aktif, maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Saat ini ekonomi daerah sudah banyak yang berazaskan koperasi. Azas koperasi dipilih karena tujuan dari koperasi yang bertujuan untuk mesejahterakan anggota. Dengan demikian keberadaan koperasi harus didukung oleh pemerintah, sehingga terjadi simbiosis mutualisme antara pemerintah dan koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah.

Gambar 3.17

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 – 2020 terhadap target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020

Untuk Indikator Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)





# Sasaran 15:

#### Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap ekonomi lokal;

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istrihat, budaya, petualangan. Kabupaten Pulang Pisau sebagai bagian dari keindahan alam Indonesia selalu berusaha menggali dan mengembangkan potensi wilayah dalam bidang pariwisata.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran *Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap ekonomi lokal* adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.31

Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020
Untuk Sasaran 15

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian
1	Jumlah kunjungan wisata	Orang	11.000,00	245,00	2,23
	Rata-rata pencapaian (%)				2,23

Tabel 3.32

Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi
Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018
Untuk Sasaran 15

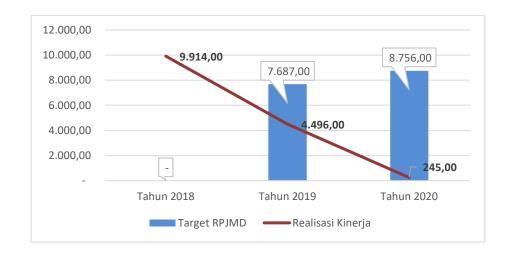
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Jumlah kunjungan wisata	Orang	9.914,00	4.496,00	245,00

Kunjungan Wisata menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun yang ke Kabupaten Pulang Pisau. Kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Pulang Pisau merupakan barometer keberhasilan pariwisata Kabupaten Pulang Pisau. Wisatawan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Wisatawan Manca Negara (Wisman) dan Wisatawan Nusantara (Winus).



Gambar 3.18

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 – 2020 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020
Untuk Indikator Jumlah kunjungan wisata (Orang)



Untuk tahun 2020 dunia pariwisata mengalami kelesuan atau banyaknya tempat wisata yang ditutup untuk umum akibat dari pandemic global covid-19. Adapun jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada Tabel 3.32 di atas.

### Sasaran 16:

#### Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat;

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi bergeraknya roda pembangunan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Pada urusan Ketenagakerjaan indikator yang dijelaskan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran *Meningkatnya kesejahteraan masyarakat* adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2020 yaitu:



# Tabel 3.33 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 16

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,63	2,63	61,98
	Rata-rata pencapaian (%)				61,98

# Tabel 3.34 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 Untuk Sasaran 16

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,15	1,74,00	2,63

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam usia angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik atau penduduk yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan.

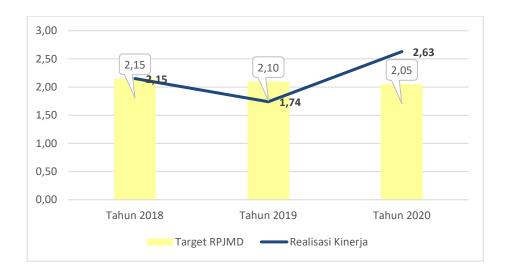
Dari tabel 3.34 di atas bahwa realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2018-2019 mengalami penurunan TPT dari 2,15% tahun 2018 menjadi 1,74% tahun 2019, yang artinya pengangguran di Kabupaten Pulang Pisau berhasil dikurangi.

Untuk periode tahun 2019-2020 realisasi ada mengalami peningkatan TPT dari 1,74% tahun 2019 menjadi 2,63% tahun 2020, yang artinya pengangguran di Kabupaten Pulang Pisau menjadi bertambah akibat covid-19 yang menyebabkan jumlah penganggur bertambah.



Gambar 3.19

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 – 2020 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020
Untuk Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (%)



Artinya bahwa pada tahun 2018 dari perwakilan 100 orang yang masuk kategori angkatan kerja, 2 diantaranya menganggur dan 98 orang lainnya bekerja, pada tahun 2019 dari perwakilan 100 orang yang masuk kategori angkatan kerja, 1 diantaranya menganggur dan 99 orang lainnya bekerja. Di tahun 2020 seumpama dari perwakilan 100 orang yang masuk kategori angkatan kerja, 2 diantaranya menganggur dan 98 orang lainnya bekerja.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran belum mampu memberikan hasil yang positif di tahun 2020, karena jika semakin tinggi nilai pengangguran terbuka, akan semakin tinggi beban bagi daerah.



MISI 6 Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (Good and Clean Governance)

#### Tujuan : Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik.

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (*Good and Clean Governance*) dirumuskan 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai, yaitu:

- 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- 3. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.

### Sasaran 17:

#### Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran *Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah* adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sasaran ini dimaksudkan agar mendapatkan pernyataan profesional dari BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kapatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.35

Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020
Untuk Sasaran 17

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian
1	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP/100%	WTP/100%	100,00
	Rata-rata pencapaian (%)				100,00



**Tabel 3.36** 

#### Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018 dan Realisasi Tahun 2018 terhadap realisasi Tahun 2017

#### **Untuk Sasaran 17**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP/100%	WTP/100%	WTP/100%

Jika diperhatikan pada Tabel 3.36, selama periode tahun 2017 sampai tahun 2019, melalui sasaran *Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah* di Kabupaten Pulang Pisau sudah dapat diukur sampai tahun 2019.

Untuk pembanding baru dapat disajikan dengan realisasi capaian tahun 2017 sampai dengan realisasi capaian sampai tahun 2019 yang telah mengalami peningkatan sebesar 100,00% yakni dari opini Wajar Tanpa Pengecualian/unqualified opinion (WTP) menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian/unqualified opinion (WTP).

Hal ini menunjukkan pencapaian hasil atas peningkatan akuntabilitas keuangan daerah di Kabupaten Pulang Pisau sudah memenuhi target mulai tahun 2017 sampai tahun 2019.

Untuk tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menargetkan untuk opini BPK dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian/unqualified opinion (WTP).

### Sasaran 18:

#### Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran *Meningkatnya kualitas pelayanan publik* adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 3.37** 

#### Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020 Untuk Sasaran 18

ı	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian
	1	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e- government	%	81,08	83,78	103,33
	Rata-rata pencapaian (%)					



Tabel 3.38

Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018

Untuk Sasaran 18

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang	%	0,00	16,22	83,78
	Menerapkan e-government				

Dari tabel 3.38 di atas bahwa Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-government belum didapati mengalami penurunan maupun peningkatan dikarenakan baru terealisasi mulai tahun 2019. Untuk angka 16,22% diperoleh dari hasil pembagian antara jumlah realisasi sebanyak 6 perangkat daerah yang menerapkan e-government dibagi jumlah keseluruhan perangkat daerah sebanyak 37 dikalikan 100%.

Untuk tahun 2020 sudah mengalami peningkatan jumlah perangkat daerah yang menerapkan e-government sebesar 83,78% dari sebanyak 37 perangkat daerah.

Gambar 3.20

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 – 2020 terhadap
target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020

Untuk Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-government (%)





### Sasaran 19:

# Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah;

Keberadaan SAKIP sebagai sistem manajemen kinerja instansi pemerintah di Indonesia sebenarnya merupakan bentuk amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang didalamnya memberikan amanat untuk mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja dalam sebuah sistem. Sistem ini dibutuhkan dalam rangka mendorong terciptanya anggaran berbasis kinerja yang diyakini sebagai paradigma pengelolaan keuangan paling efektif untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang berkinerja tinggi. SAKIP mencoba mengintegrasikan berbagai sistem dalam manajemen pemerintahan di Indonesia. Berbagai sistem tersebut antara lain sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengukuran, sistem pelaporan, dan sistem evaluasi yang kelimanya diatur dengan berbagai peraturan perundangan dan oleh berbagai instansi yang berbeda.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran *Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas* pelaksanaan pembangunan daerah dikoordinir oleh Bappeda & Litbang, Inspektorat Kabupaten, serta Sekretariat Daerah pada Bagian Organisasi beserta seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Dalam hal ini komponen yang menjadi penilaian dibagi ke dalam 5 (lima) unsur yang memiliki bobot nilai bervariasi yaitu:

- Perencanaan Kinerja, bobot nilai 30% (dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dibantu seluruh Organisasi Perangkat Daerah);
- 2. Pengukuran Kinerja, bobot nilai 25% (menjadi tanggung jawab dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah bersama Inspektorat Kabupaten beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah);
- 3. Pelaporan Kinerja, bobot nilai 15% (menjadi tanggung jawab dari Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah yang dijadikan contoh penilaian);



- 4. Evaluasi Kinerja, bobot nilai 10% (menjadi tanggung jawab dari Inspektorat dan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan);
- 5. Capaian Kinerja, bobot nilai 20% (menjadi tanggung jawab bersama/seluruh stake holders/perangkat daerah);

Sasaran ini dimaksudkan agar aparatur pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dapat menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.39

Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2019
Untuk Sasaran 19

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian
1	Nilai SAKIP	Kategori	CC 00*)	49.31*\	80,35
	Rata-rata pencapaian (%)				

<sup>\*)</sup> Angka target dan realisasi yang disajikan tahun 2018, karena realisasi tahun 2019 belum rilis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Tabel 3.40
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 terhadap realisasi Tahun 2017
Untuk Sasaran 19

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1	Nilai SAKIP	Kategori	C	C	0,00*)
			46,04	48,21	

Jika diperhatikan pada Tabel 3.40, selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, melalui sasaran *Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah* Kabupaten Pulang Pisau belum menunjukkan peningkatan yang besar.

Perbandingan realisasi tahun 2017 sampai dengan realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,13% dari nilai 46,04 menjadi 48,21 yakni dari kategori "C" dengan interpretasi "Kurang" tetap di kategori "C" dengan interpretasi "Kurang".

Untuk realisasi penilaian tahun 2019 belum rilis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.



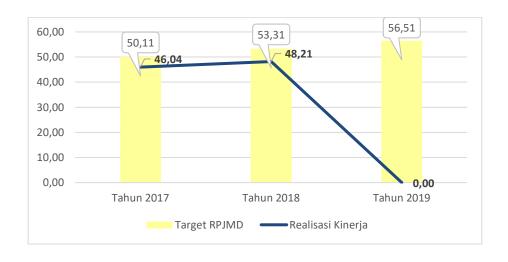
Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau belumlah maksimal, yang menempatkan sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

Perubahan Penilaian dan Pengkategorian SAKIP melalui Kementerian PAN-RB membagi instansi pemerintah menjadi tujuh kategori berdasarkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Ketujuh kategori tersebut, yaitu:

No	Kategori	Semula	Menjadi	Interpretasi
1	AA	> 85 - 100	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	Α	> 75 - 85	> 80 – 90	<b>Memuaskan</b> , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	ВВ	-	> 70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	В	> 65 - 75	> 60 - 70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	СС	> 50 - 65	> 50 - 60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	С	> 30 - 50	> 30 - 50	<b>Kurang,</b> Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Gambar 3.21

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Kinerja Tahun 2017 – 2018 – 2019
target kinerja RPJMD Tahun 2017 – 2019
Untuk Indikator Nilai SAKIP (Kategori)





MISI **7** 

# Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan

#### Tujuan : Meningkatkan peran Masyarakat Dalam Pembangunan.

Untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya dirumuskan 2 (dua) sasaran yang harus dicapai, yaitu:

- 1. Meningkatnya peran organisasi keagamaan;
- 2. Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

### Sasaran 20:

#### Meningkatnya peran organisasi keagamaan;

Secara garis besar, pembangunan bidang agama ditujukan untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kerukunan umat beragama yang dinamis baik intern maupun antarumat beragama, dan turut memajukan kesejahteraan masyarakat terutama melalui pendidikan agama dan keagamaan serta pengembangan lembaga sosial keagamaan.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran *Meningkatnya peran organisasi keagamaan* adalah Sekretariat Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.41

Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020

Untuk Sasaran 20

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian	
1	Jumlah Rumah Ibadah	Unit	533,00	517,00	97,00	
	Rata-rata pencapaian (%)					



Tabel 3.42
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018
Untuk Sasaran 20

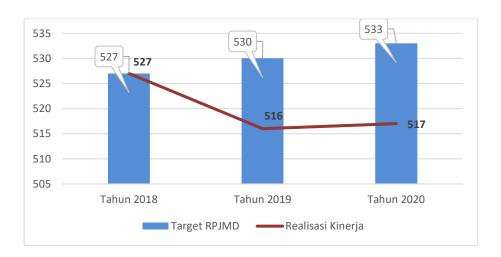
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Jumlah Rumah Ibadah	Unit	527,00	516,00	517,00

Jika diperhatikan pada Tabel 3.42, selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, melalui sasaran *Meningkatnya peran organisasi keagamaan* di Kabupaten Pulang Pisau sudah mampu menunjukkan peningkatan untuk indikator jumlah rumah ibadah.

Gambar 3.22

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 – 2020 terhadap target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020

Untuk Indikator Jumlah Rumah Ibadah (Unit)



# Sasaran 21:

#### Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Salah satu langkah pemuda untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik adalah dengan partisipasi aktif pemuda Indonesia dalam upaya pembangunan masyarakat.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran *Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan* adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga.



Sasaran ini dimaksudkan untuk dapat mengasah daya kepeloporan dan kepemimpinan serta peran serta aktif dalam pembangunan masyarakat, kaum muda harus diberi stimulan berupa kesempatan yang sebesar-besarnya dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun organisasi kepemudaan itu sendiri baik dalam tingkatan lokal maupun nasional. Sebab dalam organisasi inilah mental, ketangguhan, dan sumbangsih pemikiran seorang pemuda dapat diasah melalui program-program nyata di organisasi tersebut. Penanggung jawab atas pencapaian sasaran *Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan* adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.43
Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Tahun 2020
Untuk Sasaran 21

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjakin	Realisasi	Persentase capaian			
1	Jumlah medali olahraga	Medali	30,00	0,00	0,00			
2	Persentase Partisipasi Perempuan di DPRD	%	29,00	21,00	72,41			
	Rata-rata pencapaian (%)							

Tabel 3.44
Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2020 terhadap realisasi Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2019 terhadap realisasi Tahun 2018
Untuk Sasaran 21

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Jumlah medali olahraga	Medali	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2	Persentase Partisipasi Perempuan di DPRD	%	28,00	29,00	21,00	0,00	0,00

Jika diperhatikan pada Tabel 3.44, selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, melalui sasaran *Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan* di Kabupaten Pulang Pisau belum mampu menunjukkan peningkatan terutama di tahun 2019 dengan jumlah medali olahraga sebanyak 14 medali. Untuk tahun 2020 dunia olahraga mengalami kelesuan atau banyaknya efent/pertandingan olahraga yang tidak bisa dilaksanakan akibat dari pandemic global covid-19.

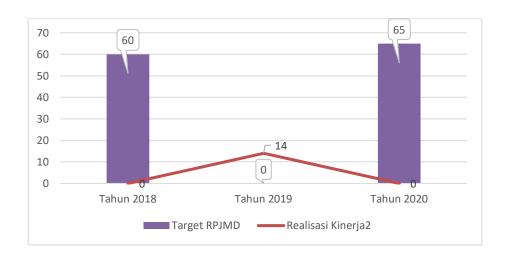


Sedangkan untuk persentase partisipasi perempuan di DPRD sebesar 28,00% di tahun 2019 meningkat di tahun 2019 sebesar 29,00% dan menurun di tahun 2020 sebesar 21%.

Gambar 3.23

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 – 2020 terhadap target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020

Untuk Indikator Jumlah medali olahraga (Medali)



Persentase wanita di DPRD menunjukkan angka 28,00% (tahun 2018) diperoleh dari jumlah anggota DPRD perempuan di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 7 orang dibagi jumlah keseluruhan anggota DPRD di Kabupaten Pulang Pisau 25 orang dikalikan 100.

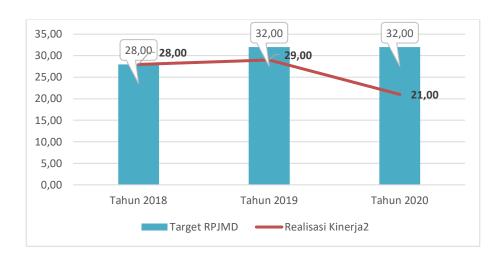
Sasaran ini dimaksudkan agar peran perempuan dan partisipasinya dalam pembangunan pada Kabupaten Pulang Pisau dapat ditingkatkan lebih baik lagi sehingga dapat terwujud kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan.



Gambar 3.24

Diagram Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2018 – 2019 – 2020 terhadap target kinerja RPJMD Tahun 2018 – 2020

Untuk Indikator Persentase Partisipasi Perempuan di DPRD (%)





# B. Laporan Realisasi Anggaran

Data Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Pulang Pisau untuk tahun anggaran 2020 adalah tersaji pada tabel dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari pelaporan kinerja ini:

**Tabel 3.45** 

#### PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2020

-- Sebagai kelengkapan data keseluruhannya, Tabel 3.45 kami sajikan pada Lampiran Tambahan laporan kinerja ini. --

Sumber data dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 8 Pebruari 2021.

# LAPORAN KINERJA Kabupaten Pulang Pisau

**TAHUN 2020** 

# BAB IV PENUTUP







### BAB IV PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2020 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Stratejik Pembangunan Daerah / RPJM Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 – 2023 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 – 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau ini disamping merupakan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2020, juga dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran telah diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 – 2023.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah:

4 (empat) sasaran berkategori "Sangat Memuaskan";

14 (empat belas) sasaran berkategori "Memuaskan";

1 (satu) sasaran berkategori "Baik";

2 (dua) sasaran berkategori "Kurang", dan ;

Dengan penilaian secara mandiri, pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam tahun 2020. Realisasi tahun 2020 dari 21 (dua puluh satu) sasaran strategis dengan keseluruhan 25 (dua puluh lima) IKU, realisasi tahun 2020 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran 1 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≤ 100%.



Sasaran 2	:	dari 1 IKU, sebanyak	1 IKU capaiannya ≤ 100%.
Sasaran 3	:	dari 1 IKU, sebanyak	1 IKU capaiannya ≤ 100%.
Sasaran 4	:	dari 1 IKU, sebanyak	1 IKU capaiannya ≥ 100%.
Sasaran 5	:	dari 1 IKU, sebanyak	1 IKU capaiannya ≤ 100%.
Sasaran 6	:	dari 1 IKU, sebanyak	1 IKU capaiannya ≤ 100%.
Sasaran 7	:	dari 1 IKU, sebanyak	1 IKU capaiannya ≤ 100%.
Sasaran 8	:	dari 1 IKU, sebanyak	1 IKU capaiannya ≤ 100%.
Sasaran 9	:	dari 1 IKU, sebanyak	1 IKU capaiannya ≤ 100%.
Sasaran 10	:	dari 2 IKU, sebanyak	2 IKU capaiannya ≥ 100%.
Sasaran 11	:	dari 2 IKU, sebanyak	1 IKU capaiannya ≥ 100%.
			1 IKU capaiannya ≤ 50%.
Sasaran 12	:	dari 2 IKU, sebanyak	1 IKU capaiannya ≥ 100%.
			1 IKU capaiannya ≤ 100%.
Sasaran 13	:	dari 1 IKU, sebanyak	1 IKU capaiannya ≤ 100%.
Sasaran 14	:	dari 1 IKU, sebanyak	1 IKU capaiannya ≤ 100%.
Sasaran 15	:	dari 1 IKU, sebanyak	1 IKU capaiannya ≤ 50%.
Sasaran 16	:	dari 1 IKU, sebanyak	1 IKU capaiannya ≥ 50%.
Sasaran 17	:	dari 1 IKU, sebanyak	1 IKU capaiannya = 100%.
Sasaran 18	:	dari 1 IKU, sebanyak	1 IKU capaiannya = 100%.
Sasaran 19	:	dari 1 IKU, sebanyak	1 IKU capaiannya ≤ 100%.
Sasaran 20	:	dari 1 IKU, sebanyak	1 IKU capaiannya ≤ 100%.
Sasaran 21	:	dari 2 IKU, sebanyak	1 IKU capaiannya = 0%, dan
			1 IKU capaiannya ≥ 50%.

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Serta ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat adanya masa pandemic covid-19 selama tahun 2020. Kita semua berharap Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.



#### STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2020, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun Anggaran 2021, yaitu sebagai berikut:

- Telah memuat/menyajikan target RPJMD sebagai pembanding terhadap realisasi tahun 2020, sebagai pemenuhan dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2019 (realisasi tahun sebelumnya).
- 2. Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan agar lebih berfokus pada pencapaian hasil dengan menetapkan hubungan yang logis dan matematis antara input dan output suatu kegiatan, bukan hanya semata berorientasi pada terlaksananya / selesainya kegiatan saja.
- 3. Untuk mengarahkan agar segala kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah tertuju pada pencapaian sasaran dan sesuai dengan target kinerja yang diharapkan, perlu dirumuskan indikator sasaran yang lebih bersifat outcome dan secara konsisten menjadi fokus kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan selama periode renstra / RPJM, serta dirumuskan sistem pengumpulan data kinerjanya dan perlunya dilakukan review / evaluasi secara berkala atas capaian kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah.
- 4. Terus meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas aparatur daerah Kabupaten Pulang Pisau baik dari segi teknis maupun manajerial sehingga dapat menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5. Meningkatkan efisiensi dan efektiftas dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan.
- 6. Melaksanakan dan memantapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program seluruh unit kerja dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektifitas dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.



- 7. Akan mengalokasikan anggaran yang diperlukan kepada unit-unit pelayanan publik yang belum tersedia pada tahun anggaran 2021, agar hasil penilaian kinerjanya meningkat.
- 8. Melaksanakan kegiatan di tahun 2021 yang tertunda di tahun 2020 akibat pandemic covid-19, baik secara daring atau zoom meeting (akibat tidak dapat dilakukannya kegiatan secara terbuka atau tatap muka).

Akhirnya dengan rampungnya penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, sehingga dapat memberikan unpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap pengembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kabupaten Pulang Pisau pada khususnya dapat lebih bermanfaat.

----000----

## LAPORAN KINERJA Kabupaten Pulang Pisau

**TAHUN 2020** 

## LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG SAKIP TAHUN 2020

- 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
- 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 (Perubahan)
- 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020
- 4. RENCANA KINERJA TAHUN 2020
- 5. RENCANA AKSI TAHUN 2020
- 6. PENGUKURAN KINERJA 2020







## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.

Jabatan : Bupati Pulang Pisau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pulang Pisau, 27 Maret 2020

**BUPATI PULANG PISAU,** 

ttd

#### LAMPIRAN LAPORAN KINERJA

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KABUPATEN PULANG PISAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		, í		
	MISI 1	Percepatan Peningkatan Sara Ruang dan Permukiman		
	TUJUAN	Meningkatkan sebaran infras	truktur peml	pangunan wilayah
1.	Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)	75,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Meningkatnya layanan kelistrikan	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (%)	94,20	Sekretariat Daerah / Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
3.	Meningkatnya Akses Air Bersih	Persentase Penduduk berakses Air Bersih (%)	22,56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau dalam Kondisi Baik (%)	63,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	Ketaatan pembangunan terhadap RTRW (%)	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni	Rasio Permukiman Layak Huni (%)	0,62	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	MISI 2	Peningkatan Produktivitas Ha Lingkungan Berkelanjutan		,
	TUJUAN	Meningkatkan Kemandirian E	konomi Berb	pasis Ekonomi Hijau
7.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB (%)	9,10	Dinas Pertanian
8.	Meningkatnya produksi pertanian	Kontribusi Pertanian dalam arti luas dalam PDRB (%)	38,50	Dinas Pertanian
9.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap	Produksi perikanan (Ton/Tahun)	24.125,42	Dinas Perikanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(-)	(=)	(3)	( . /	(3)
	MISI 3	Peningkatan kualitas Sumbe	r Daya Alam	dan Lingkungan
	TUJUAN	Peningkatan kualitas Lingkur	ngan Hidup y	ang Berkelanjutan
10.	Meningkatnya Status Lingkungan	Status Mutu Air	5,00	Dinas Lingkungan Hidup
10.	Hidup	Indeks Kualitas Udara	84,00	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Meningkatnya UMKM	Jumlah Hotspot (Titik)	1.065,00	Dinas Lingkungan Hidup
11.		Luas Kebakaran (Ha)	10,65	Dinas Lingkungan Hidup
	MISI 4	Peningkatan Kualitas Sumbe	r Daya Manu	sia
	TUJUAN	Meningkatkan Daya Saing Ma	asyarakat Pu	lang Pisau
12.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,73	Dinas Pendidikan
12.	masyarakat	TPAK – Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pulang pisau	Angka harapan hidup (Tahun)	70,03	Dinas Kesehatan
	MISI 5	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan		
	TUJUAN	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan		
14.	Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam ekonomi lokal	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)	150,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap ekonomi lokal	Jumlah kunjungan wisata (Orang)	11.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16.	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,63	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	MISI 6	Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (Good and Clean Governance)		
TUJUAN		Meningkatkan Tata kelola Pe	merintahan	
17.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap LKPD (Opini)	WTP	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-government (%)	81,08	Dinas Komunikasi dan Informatika, Stasistik dan Persandian
19.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP (Kategori)	CC / 60,00	Sekretariat Daerah / Bagian Organisasi
	MISI 7	Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan		
	TUJUAN	Meningkatkan peran Masyarakat Dalam Pembangunan		
20.	Meningkatnya peran organisasi keagamaan	Jumlah Rumah Ibadah (Unit)	533,00	Sekretariat Daerah / Bagian Kesra
		Jumlah medali olahraga (Medali)	30,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
21.	Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di DPRD (%)	29,00	Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI PULANG PISAU,

ttd



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 (Perubahan)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.

Jabatan : Bupati Pulang Pisau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pulang Pisau, 7 Desember 2020

**BUPATI PULANG PISAU,** 

ttd

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 KABUPATEN PULANG PISAU (Perubahan)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(-)	(=/	(0)	( . /	(0)	
	MISI 1	Percepatan Peningkatan Sara Ruang dan Permukiman	Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman		
	TUJUAN	Meningkatkan sebaran infras	truktur peml	pangunan wilayah	
1.	Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)	75,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2.	Meningkatnya layanan kelistrikan	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (%)	94,20	Sekretariat Daerah / Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
3.	Meningkatnya Akses Air Bersih	Persentase Penduduk berakses Air Bersih (%)	65,56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4.	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau dalam Kondisi Baik (%)	60,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5.	Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	Ketaatan pembangunan terhadap RTRW (%)	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
6.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni	Rasio Permukiman Layak Huni (%)	0,61	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	MISI 2	Peningkatan Produktivitas Hasil Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan			
	TUJUAN	Meningkatkan Kemandirian E	konomi Berb	pasis Ekonomi Hijau	
7.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB (%)	9,00	Dinas Pertanian	
8.	Meningkatnya produksi pertanian	Kontribusi Pertanian dalam arti luas dalam PDRB (%)	38,25	Dinas Pertanian	
9.	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan (Ton/Tahun)	24.125,42	Dinas Perikanan	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(*/		(2)
	budidaya dan tangkap			
	MISI 3	Peningkatan kualitas Sumbe	r Daya Alam	dan Lingkungan
	TUJUAN	Peningkatan kualitas Lingkur	ngan Hidup y	, ,
10.	Meningkatnya Status Lingkungan	Status Mutu Air	5,00	Dinas Lingkungan Hidup
10.	Hidup	Indeks Kualitas Udara	84,00	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Meningkatnya UMKM	Jumlah Hotspot (Titik)	1.065,00	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Mennigkatilya OMKM	Luas Kebakaran (Ha)	10,65	Dinas Lingkungan Hidup
	MISI 4	Peningkatan Kualitas Sumbe	r Daya Manu	sia
	TUJUAN	Meningkatkan Daya Saing Ma	asyarakat Pu	lang Pisau
12.	Meningkatnya	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,77	Dinas Pendidikan
12.	kualitas pendidikan masyarakat	TPAK – Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pulang pisau	Angka harapan hidup (Tahun)	70,03	Dinas Kesehatan
	MISI 5	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan		
	TUJUAN	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan		
14.	Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam ekonomi lokal	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)	156,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap ekonomi lokal	Jumlah kunjungan wisata (Orang)	11.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16.	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,63	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	MISI 6	Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (Good and Clean Governance)		
	TUJUAN	Meningkatkan Tata kelola Pe	merintahan y	
17.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap LKPD (Opini)	WTP	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-government (%)	81,08	Dinas Komunikasi dan Informatika, Stasistik dan Persandian
19.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP (Kategori)	CC / 60,00	Sekretariat Daerah / Bagian Organisasi
	MISI 7	Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan		
	TUJUAN	Meningkatkan peran Masyarakat Dalam Pembangunan		
20.	Meningkatnya peran organisasi keagamaan	Jumlah Rumah Ibadah (Unit)	533,00	Sekretariat Daerah / Bagian Kesra
		Jumlah medali olahraga (Medali)	30,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
21.	Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di DPRD (%)	29,00	Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

### INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(5)
	MISI 1	Percepatan Peningkatan Sarana dan P Ruang dan Permukiman	rasarana Wilayah, Tata
	TUJUAN	Meningkatkan sebaran infrastruktur pe	embangunan wilayah
1.	Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Meningkatnya layanan kelistrikan	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (%)	Sekretariat Daerah / Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
3.	Meningkatnya Akses Air Bersih	Persentase Penduduk berakses Air Bersih (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau dalam Kondisi Baik (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	Ketaatan pembangunan terhadap RTRW (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni	Rasio Permukiman Layak Huni (%)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	MISI 2	Peningkatan Produktivitas Hasil Sun Lingkungan Berkelanjutan	nber Daya Alam dan
	TUJUAN	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi B	erbasis Ekonomi Hijau
7.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB (%)	Dinas Pertanian
8.	Meningkatnya produksi pertanian	Kontribusi Pertanian dalam arti luas dalam PDRB (%)	Dinas Pertanian
9.	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan (Ton/Tahun)	Dinas Perikanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(5)
	\	(-)	
	budidaya dan tangkap		
	MISI 3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Ala	m dan Lingkungan
	TUJUAN	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidu	yang Berkelanjutan
10.	Meningkatnya Status Lingkungan Hidup	Status Mutu Air	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Meningkatnya UMKM	Jumlah Hotspot (Titik)	Dinas Lingkungan Hidup
		Luas Kebakaran (Ha)	Dinas Lingkungan Hidup
	MISI 4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Ma	nusia
	TUJUAN	Meningkatkan Daya Saing Masyarakat	Pulang Pisau
12.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Dinas Pendidikan
		TPAK – Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pulang pisau	Angka harapan hidup (Tahun)	Dinas Kesehatan
	MISI 5	Peningkatan Kesejahteraan Masyara Ekonomi Kerakyatan	akat Melalui Program
	TUJUAN	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Ke	rakyatan
14.	Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam ekonomi lokal	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap ekonomi lokal	Jumlah kunjungan wisata (Orang)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16.	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	MISI 6	Mewujudkan aparatur pemerintah ya dan profesional (Good and Clean Gove	•
	TUJUAN	Meningkatkan Tata kelola Pemerintaha	n yang Baik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(5)	
17.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap LKPD (Opini)	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
18.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-government (%)	Dinas Komunikasi dan Informatika, Stasistik dan Persandian	
19.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP (Kategori)	Sekretariat Daerah / Bagian Organisasi	
	MISI 7	Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan		
	TUJUAN	Meningkatkan peran Masyarakat Dalar	n Pembangunan	
20.	Meningkatnya peran organisasi keagamaan	Jumlah Rumah Ibadah (Unit)	Sekretariat Daerah / Bagian Kesra	
		Jumlah medali olahraga (Medali)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
21.	Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di DPRD (%)	Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	

Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

## RENCANA KINERJA TAHUN 2020 KABUPATEN PULANG PISAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	MISI 1	Percepatan Peningkatan Sara Ruang dan Permukiman	ana dan Pras	arana Wilayah, Tata
	TUJUAN	Meningkatkan sebaran infras	struktur peml	bangunan wilayah
1.	Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)	75,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Meningkatnya layanan kelistrikan	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (%)	94,20	Sekretariat Daerah / Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
3.	Meningkatnya Akses Air Bersih	Persentase Penduduk berakses Air Bersih (%)	22,56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau dalam Kondisi Baik (%)	63,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	Ketaatan pembangunan terhadap RTRW (%)	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni	Rasio Permukiman Layak Huni (%)	0,62	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	MISI 2	Peningkatan Produktivitas Ha Lingkungan Berkelanjutan		
	TUJUAN	Meningkatkan Kemandirian E	Ekonomi Berb	pasis Ekonomi Hijau
7.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB (%)	9,10	Dinas Pertanian
8.	Meningkatnya produksi pertanian	Kontribusi Pertanian dalam arti luas dalam PDRB (%)	38,50	Dinas Pertanian
9.	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan (Ton/Tahun)	24.125,42	Dinas Perikanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	budidaya dan tangkap					
	MISI 3	Peningkatan kualitas Sumbe	r Daya Alam	dan Lingkungan		
	TUJUAN	Peningkatan kualitas Lingkur	ngan Hidup y	ang Berkelanjutan		
10.	Meningkatnya Status Lingkungan Hidup	Status Mutu Air	5,00	Dinas Lingkungan Hidup		
		Indeks Kualitas Udara	84,00	Dinas Lingkungan Hidup		
11.	Meningkatnya UMKM	Jumlah Hotspot (Titik)	1.065,00	Dinas Lingkungan Hidup		
		Luas Kebakaran (Ha)	10,65	Dinas Lingkungan Hidup		
	MISI 4	Peningkatan Kualitas Sumbe	r Daya Manu			
	TUJUAN	Meningkatkan Daya Saing M	asyarakat Pu	lang Pisau		
12.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,73	Dinas Pendidikan		
		TPAK – Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
13.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pulang pisau	Angka harapan hidup (Tahun)	70,03	Dinas Kesehatan		
	MISI 5	Peningkatan Kesejahteraan I Ekonomi Kerakyatan	Masyarakat M	1elalui Program		
	TUJUAN	Meningkatkan Daya Saing El	konomi Keral	cyatan		
14.	Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam ekonomi lokal	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)	150,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
15.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap ekonomi lokal	Jumlah kunjungan wisata (Orang)	11.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
16.	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,63	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
	MISI 6	Mewujudkan aparatur pemer profesional (Good and Clean				
	TUJUAN			·		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap LKPD (Opini)	WTP	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
18.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-government (%)	81,08	Dinas Komunikasi dan Informatika, Stasistik dan Persandian
19.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP (Kategori)	CC / 60,00	Sekretariat Daerah / Bagian Organisasi
	MISI 7	Pemberdayaan organisasi ke pemuda, dan perempuan dal		
	TUJUAN	Meningkatkan peran Masyara	akat Dalam P	embangunan
20.	Meningkatnya peran organisasi keagamaan	Jumlah Rumah Ibadah (Unit)	533,00	Sekretariat Daerah / Bagian Kesra
		Jumlah medali olahraga (Medali)	30,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
21.	Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di DPRD (%)	29,00	Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 27 Maret 2020

**BUPATI PULANG PISAU,** 

ttd

#### LAMPIRAN LAPORAN KINERJA

## Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (tahun 2020)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Perangkat Daerah Penanggung jawab	TARGET TAHUN 2020	KONDISI AKHIR (2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75,98	75,98
Meningkatnya layanan kelistrikan	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (%)	Sekretariat Daerah / Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	94,20	94,20
Meningkatnya Akses Air Bersih	Persentase Penduduk berakses Air Bersih (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22,56	22,56
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau dalam Kondisi Baik (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	63,54	63,54
Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	Ketaatan pembangunan terhadap RTRW (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100,00	100,00
Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni	Rasio Permukiman Layak Huni (%)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,62	0,62
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB (%)	Dinas Pertanian	9,10	9,10
Meningkatnya produksi pertanian	Kontribusi Pertanian dalam arti luas dalam PDRB (%)	Dinas Pertanian	38,50	38,50
Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap	Produksi perikanan (Ton/Tahun)	Dinas Perikanan	24.125,42	24.125,4 2

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Perangkat Daerah Penanggung jawab	TARGET TAHUN 2020	KONDISI AKHIR (2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maningkatawa Status Lingkungan Hidun	Status Mutu Air	Dinas Lingkungan Hidup	5,00	5,00
Meningkatnya Status Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup	84,00	84,00
Meningkatnya UMKM	Jumlah Hotspot (Titik)	Dinas Lingkungan Hidup	1.065,00	1.065,00
Mennigkatnya OMKM	Luas Kebakaran (Ha)	Dinas Lingkungan Hidup	10,65	10,65
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Dinas Pendidikan	7,73	7,73
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	TPAK – Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	75,21	75,21
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pulang pisau	Angka harapan hidup (Tahun)	Dinas Kesehatan	70,03	70,03
Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam ekonomi lokal	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	150	150
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap ekonomi lokal	Jumlah kunjungan wisata (Orang)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11.000	11.000
Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,63	1,63
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap LKPD (Opini)	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP	WTP
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-government (%)	Dinas Komunikasi dan Informatika, Stasistik dan Persandian	81,08	81,08

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Perangkat Daerah Penanggung jawab	TARGET TAHUN 2020	KONDISI AKHIR (2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP (Kategori)	Sekretariat Daerah / Bagian Organisasi	CC / 60,00	CC / 60,00
Meningkatnya peran organisasi keagamaan	Jumlah Rumah Ibadah (Unit)	Sekretariat Daerah / Bagian Kesra	533,00	533,00
	Jumlah medali olahraga (Medali)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	30,00	30,00
Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di DPRD (%)	Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	29,00	29,00

Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 27 Maret 2020

**BUPATI PULANG PISAU,** 

ttd

#### LAMPIRAN LAPORAN KINERJA

## PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 KABUPATEN PULANG PISAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	MISI 1	Percepatan Peningkatan Sara Ruang dan Permukiman	ana dan Pras	arana Wilaya	h, Tata
	TUJUAN	Meningkatkan sebaran infras	truktur peml	pangunan wil	ayah
1.	Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)	75,98	65,46	86,15
2.	Meningkatnya layanan kelistrikan	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (%)	94,20	90,29	95,85
3.	Meningkatnya Akses Air Bersih	Persentase Penduduk berakses Air Bersih (%)	65,56	64,50	98,38
4.	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau dalam Kondisi Baik (%)	60,80	59,83	98,40
5.	Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	Ketaatan pembangunan terhadap RTRW (%)	100,00	98,00	98,00
6.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni	Rasio Permukiman Layak Huni (%)	0,61	0,59	96,72
	MISI 2	Peningkatan Produktivitas Ha Lingkungan Berkelanjutan		•	
	TUJUAN	Meningkatkan Kemandirian E	konomi Berb	asis Ekonom	i Hijau
7.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB (%)	9,00	8,49	94,33
8.	Meningkatnya produksi pertanian	Kontribusi Pertanian dalam arti luas dalam PDRB (%)	38,25	36,43	95,24
9.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap	Produksi perikanan (Ton/Tahun)	24.125,42	23.938,12	99,22

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Killerja	
	(=)		(1)	(5)		
	MISI 3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan				
	TUJUAN	Peningkatan kualitas Lingkur	ngan Hidup y	ang Berkelan	jutan	
	Meningkatnya	Status Mutu Air	5,00	4,29	116,55	
10.	Status Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	84,00	95,36	113,52	
11.	Meningkatnya UMKM	Jumlah Hotspot (Titik)	1.065,00	105,00	1014,29	
	-	Luas Kebakaran (Ha)	10,65	42	25,36	
	MISI 4	Peningkatan Kualitas Sumbe				
	TUJUAN	Meningkatkan Daya Saing Ma	asyarakat Pu I	lang Pisau		
12.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,77	9,18	104,68	
	masyarakat	TPAK – Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,21	72,77	96,76	
13.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pulang pisau	Angka harapan hidup (Tahun)	70,03	68,04	97,16	
	MISI 5	Peningkatan Kesejahteraan M Kerakyatan	Masyarakat M	lelalui Progra	m Ekonomi	
	TUJUAN	Meningkatkan Daya Saing Ek	konomi Kerak	yatan		
14.	Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam ekonomi lokal	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)	156,00	146,00	93,59	
15.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap ekonomi lokal	Jumlah kunjungan wisata (Orang)	11.000,00	245,00	2,23	
16.	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,63	2,63	61,98	
	MISI 6	Mewujudkan aparatur pemer profesional (Good and Clean	Governance	)	awa dan	
	TUJUAN	Meningkatkan Tata kelola Pe	merintahan y	ang Baik		
17.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap LKPD (Opini)	WTP/ 100%	WTP/ 100%	100,00	
18.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-government (%)	81,08	83,78	103,33	
19.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan	Nilai SAKIP (Kategori)	CC/ 60,00	C/ 48,21	80,35	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	pembangunan daerah				
	MISI 7	Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan			
	TUJUAN	Meningkatkan peran Masyara	akat Dalam P	embangunan	
20.	Meningkatnya peran organisasi keagamaan	Jumlah Rumah Ibadah (Unit)	533,00	517,00	97,00
21.	Meningkatnya peran pemuda dan	Jumlah medali olahraga (Medali)	30,00	0,00	0,00
21.	perempuan dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di DPRD (%)	29,00	21,00	72,41

Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 19 Februari 2021

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

## LAPORAN KINERJA Kabupaten Pulang Pisau

**TAHUN 2020** 

## LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG SAKIP TAHUN 2021

- 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
- 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
- 3. RENCANA KINERJA TAHUN 2021
- 4. RENCANA AKSI TAHUN 2021







#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.

Jabatan : Bupati Pulang Pisau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pulang Pisau, 22 Maret 2021

**BUPATI PULANG PISAU**,

ttd

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KABUPATEN PULANG PISAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	MISI 1 Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Ta Ruang dan Permukiman			
	TUJUAN	Meningkatkan sebaran infras		pangunan wilayah
1.	Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)	77,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Meningkatnya layanan kelistrikan	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (%)	94,50	Sekretariat Daerah / Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
3.	Meningkatnya Akses Air Bersih	Persentase Penduduk berakses Air Bersih (%)	66,57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau dalam Kondisi Baik (%)	61,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	Ketaatan pembangunan terhadap RTRW (%)	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni	Rasio Permukiman Layak Huni (%)	0,62	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	MISI 2	Peningkatan Produktivitas Ha Lingkungan Berkelanjutan	asil Sumber [	Daya Alam dan
	TUJUAN	Meningkatkan Kemandirian E	Ekonomi Berb	pasis Ekonomi Hijau
7.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB (%)	9,10	Dinas Pertanian
8.	Meningkatnya produksi pertanian	Kontribusi Pertanian dalam arti luas dalam PDRB (%)	38,50	Dinas Pertanian
9.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap	Produksi perikanan (Ton/Tahun)	24.339,93	Dinas Perikanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	MISI 3	Peningkatan kualitas Sumbe	r Daya Alam	dan Lingkungan
	TUJUAN	Peningkatan kualitas Lingkur	ngan Hidup y	ang Berkelanjutan
10.	Meningkatnya Status Lingkungan	Status Mutu Air	5,00	Dinas Lingkungan Hidup
10.	Hidup	Indeks Kualitas Udara	84,00	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Meningkatnya UMKM	Jumlah Hotspot (Titik)	1.105,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Luas Kebakaran (Ha)	10,50	Dinas Lingkungan Hidup
	MISI 4	Peningkatan Kualitas Sumbe		
	TUJUAN	Meningkatkan Daya Saing Ma		lang Pisau
12.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,80	Dinas Pendidikan
12.	masyarakat	TPAK – Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pulang pisau	Angka harapan hidup (Tahun)	70,76	Dinas Kesehatan
	MISI 5	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan		
	TUJUAN	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan		
14.	Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam ekonomi lokal	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)	160,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap ekonomi lokal	Jumlah kunjungan wisata (Orang)	9.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16.	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,43	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	MISI 6	Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (Good and Clean Governance)		
	TUJUAN	Meningkatkan Tata kelola Pe		
17.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap LKPD (Opini)	WTP	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-government (%)	00,00	Dinas Komunikasi dan Informatika, Stasistik dan Persandian
19.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP (Kategori)	CC / 60,00	Sekretariat Daerah / Bagian Organisasi
	MISI 7	Pemberdayaan organisasi ke pemuda, dan perempuan dal		
	TUJUAN	Meningkatkan peran Masyara	akat Dalam P	Pembangunan
20.	Meningkatnya peran organisasi keagamaan	Jumlah Rumah Ibadah (Unit)	535,00	Sekretariat Daerah / Bagian Kesra
		Jumlah medali olahraga (Medali)	20,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
21.	Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di DPRD (%)	30,00	Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

## INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(5)
	MISI 1	Percepatan Peningkatan Sarana dan P Ruang dan Permukiman	rasarana Wilayah, Tata
	TUJUAN	Meningkatkan sebaran infrastruktur pe	embangunan wilayah
1.	Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Meningkatnya layanan kelistrikan	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (%)	Sekretariat Daerah / Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
3.	Meningkatnya Akses Air Bersih	Persentase Penduduk berakses Air Bersih (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau dalam Kondisi Baik (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	Ketaatan pembangunan terhadap RTRW (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni	Rasio Permukiman Layak Huni (%)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	MISI 2	Peningkatan Produktivitas Hasil Sun Lingkungan Berkelanjutan	nber Daya Alam dan
	TUJUAN	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi B	erbasis Ekonomi Hijau
7.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB (%)	Dinas Pertanian
8.	Meningkatnya produksi pertanian	Kontribusi Pertanian dalam arti luas dalam PDRB (%)	Dinas Pertanian
9.	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan (Ton/Tahun)	Dinas Perikanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(5)
	budidaya dan		
	tangkap		
	MISI 3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Ala	ım dan Lingkungan
	TUJUAN	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidu	p yang Berkelanjutan
10.	Meningkatnya Status Lingkungan Hidup	Status Mutu Air	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Meningkatnya UMKM	Jumlah Hotspot (Titik)	Dinas Lingkungan Hidup
		Luas Kebakaran (Ha)	Dinas Lingkungan Hidup
	MISI 4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Ma	inusia
	TUJUAN	Meningkatkan Daya Saing Masyarakat	Pulang Pisau
12.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Dinas Pendidikan
		TPAK – Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pulang pisau	Angka harapan hidup (Tahun)	Dinas Kesehatan
	MISI 5	Peningkatan Kesejahteraan Masyara Ekonomi Kerakyatan	akat Melalui Program
	TUJUAN	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Ke	rakyatan
14.	Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam ekonomi lokal	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap ekonomi lokal	Jumlah kunjungan wisata (Orang)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16.	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	MISI 6	Mewujudkan aparatur pemerintah ya dan profesional (Good and Clean Gove	_
	TUJUAN	Meningkatkan Tata kelola Pemerintaha	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(5)	
17.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap LKPD (Opini)	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
18.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-government (%)	Dinas Komunikasi dan Informatika, Stasistik dan Persandian	
19.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP (Kategori)	Sekretariat Daerah / Bagian Organisasi	
	MISI 7	Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan		
	TUJUAN	Meningkatkan peran Masyarakat Dalar	n Pembangunan	
20.	Meningkatnya peran organisasi keagamaan	Jumlah Rumah Ibadah (Unit)	Sekretariat Daerah / Bagian Kesra	
		Jumlah medali olahraga (Medali)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
21.	Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di DPRD (%)	Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	

Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

## RENCANA KINERJA TAHUN 2021 KABUPATEN PULANG PISAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	MISI 1	Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman				
	TUJUAN	Meningkatkan sebaran infras	truktur peml	pangunan wilayah		
1.	Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)	77,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.	Meningkatnya layanan kelistrikan	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (%)	94,50	Sekretariat Daerah / Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		
3.	Meningkatnya Akses Air Bersih	Persentase Penduduk berakses Air Bersih (%)	66,57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
4.	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau dalam Kondisi Baik (%)	61,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
5.	Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	Ketaatan pembangunan terhadap RTRW (%)	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
6.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni	Rasio Permukiman Layak Huni (%)	0,62	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
	MISI 2	Peningkatan Produktivitas Hasil Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan				
	TUJUAN	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Ekonomi Hijau				
7.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB (%)	9,10	Dinas Pertanian		
8.	Meningkatnya produksi pertanian	Kontribusi Pertanian dalam arti luas dalam PDRB (%)	38,50	Dinas Pertanian		
9.	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan (Ton/Tahun)	24.339,93	Dinas Perikanan		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah		
(1)	(2)	(3)	(4)	Penanggung Jawab (5)		
(±)	(2)	(3)	(4)	(3)		
	budidaya dan tangkap					
	MISI 3	Peningkatan kualitas Sumbe	r Daya Alam	dan Lingkungan		
	TUJUAN	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan				
10.	Meningkatnya Status Lingkungan Hidup	Status Mutu Air	5,00	Dinas Lingkungan Hidup		
		Indeks Kualitas Udara	84,00	Dinas Lingkungan Hidup		
11.	Meningkatnya UMKM	Jumlah Hotspot (Titik)	1.105,00	Dinas Lingkungan Hidup		
		Luas Kebakaran (Ha)	10,50	Dinas Lingkungan Hidup		
	MISI 4	Peningkatan Kualitas Sumbe	r Daya Manu			
	TUJUAN	Meningkatkan Daya Saing M	asyarakat Pu	lang Pisau		
12.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,80	Dinas Pendidikan		
		TPAK – Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
13.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pulang pisau	Angka harapan hidup (Tahun)	70,76	Dinas Kesehatan		
	MISI 5	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan				
	TUJUAN	Meningkatkan Daya Saing El	konomi Kerak	kyatan		
14.	Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam ekonomi lokal	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)	160,00	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
15.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap ekonomi lokal	Jumlah kunjungan wisata (Orang)	9.000,00	000,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
16.	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,43	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
	MISI 6	Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (Good and Clean Governance)				
	TUJUAN	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
17.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap LKPD (Opini)	WTP	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
18.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-government (%)	00,00	Dinas Komunikasi dan Informatika, Stasistik dan Persandian	
19.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP (Kategori)	CC / 60,00	Sekretariat Daerah / Bagian Organisasi	
	MISI 7		mberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, muda, dan perempuan dalam pembangunan		
	TUJUAN	Meningkatkan peran Masyara	gkatkan peran Masyarakat Dalam Pembangunan		
20.	Meningkatnya peran organisasi keagamaan	Jumlah Rumah Ibadah (Unit)	535,00	Sekretariat Daerah / Bagian Kesra	
		Jumlah medali olahraga (Medali)	20,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
21.	Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di DPRD (%)	30,00	Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	

Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 22 Maret 2021

**BUPATI PULANG PISAU,** 

ttd

#### LAMPIRAN LAPORAN KINERJA

## Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (tahun 2021)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Perangkat Daerah Penanggung jawab	TARGET	KONDISI AKHIR
			2021	(2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77,50	77,50
Meningkatnya layanan kelistrikan	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (%)	Sekretariat Daerah / Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	94,50	94,50
Meningkatnya Akses Air Bersih	Persentase Penduduk berakses Air Bersih (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66,57	66,57
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau dalam Kondisi Baik (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61,10	61,10
Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	Ketaatan pembangunan terhadap RTRW (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100,00	100,00
Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni	Rasio Permukiman Layak Huni (%)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,62	0,62
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB (%)	Dinas Pertanian	9,10	9,10
Meningkatnya produksi pertanian	Kontribusi Pertanian dalam arti luas dalam PDRB (%)	Dinas Pertanian	38,50	38,50
Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan tangkap	Produksi perikanan (Ton/Tahun)	Dinas Perikanan	24.339,93	24.339,93

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Perangkat Daerah Penanggung jawab	TARGET TAHUN 2021	KONDISI AKHIR (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maninglantana Status Linglanges Hidan	Status Mutu Air	Dinas Lingkungan Hidup	5,00	5,00
Meningkatnya Status Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup	84,00	84,00
Maningly at the second State of the second Sta	Jumlah Hotspot (Titik)	Dinas Lingkungan Hidup	1.105,00	1.105,00
Meningkatnya UMKM	Luas Kebakaran (Ha)	Dinas Lingkungan Hidup	10,50	10,50
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Dinas Pendidikan	8,80	8,80
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	TPAK – Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	75,38	75,38
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pulang pisau	Angka harapan hidup (Tahun)	Dinas Kesehatan	70,76	70,76
Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam ekonomi lokal	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	160	160
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap ekonomi lokal	Jumlah kunjungan wisata (Orang)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9.000	9.000
Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,43	1,43
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap LKPD (Opini)	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP	WTP
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-government (%)	Dinas Komunikasi dan Informatika, Stasistik dan Persandian	0,00	0,00

CECEDEN	INDIVITION WINEDLE	Perangkat Daerah	TARGET	KONDISI
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Penanggung jawab	TAHUN 2021	AKHIR (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP (Kategori)	Sekretariat Daerah / Bagian Organisasi	CC / 60,00	CC / 60,00
Meningkatnya peran organisasi keagamaan	Jumlah Rumah Ibadah (Unit)	Sekretariat Daerah / Bagian Kesra	535,00	535,00
	Jumlah medali olahraga (Medali)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	20,00	20,00
Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan di DPRD (%)	Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	30,00	30,00

Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 22 Maret 2021

**BUPATI PULANG PISAU,** 

ttd

H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.

### LAPORAN KINERJA Kabupaten Pulang Pisau

**TAHUN 2020** 

### LAMPIRAN TAMBAHAN DOKUMEN PENDUKUNG





### Rekapitulasi PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019 & 2020

	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai Tahun 2019	Jumlah Pegawai Tahun 2020
1	SD	17	16
2	SMP	25	20
3	SMA/SMK	406	354
4	D-1	24	11
5	D-2	98	70
6	D-3	408	410
7	D-4	28	38
8	S-1	2136	2079
9	S-2	210	217
10	S-3	1	1
	Jumlah	3353	3216

### Rekapitulasi PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Golongan/Ruang Per Desember 2020

Ma	Duana		Gold	ongan		Jumlah
No.	Ruang	I	П	Ш	IV	Jumian
1	A	0	29	307	398	734
2	В	3	48	490	521	1062
3	С	4	147	540	26	717
4	D	11	189	503	0	703
5	Е	0	0	0	0	0
	Jumlah	18	413	1840	945	3216

BADAN KEPEGA

Pulang Pisau, **3** Februari 2021 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

AH K Kabupaten Pulang Pisau,

SARIPUDIN Pembina Utama Muda

19620304 199403 1 006 A

Lampiran II Nama Perangkat Daerah

: Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SASARAN	INDIKATOR	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KONDISI KINERJA AWAL	KINERJA TAHUN 2019	HUN 2019	KINERJA TAHUN 2020	HUN 2020	KINERJA TAHUN 2021
			RPJMD	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
Meningkatnya jaringan jalan yang handal dan terintegrasi.	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	DPUPR	71,60	74,49	72,28	75,98	65,46	77,50
Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor pertanian.	Persentase Irigasi Kabupaten Pulang Pisau Dalam Kondisi Baik	DPUPR	60,21	60,50	60,29	60,80	59,83	61,10
Meningkatnya cakupan layanan air bersih	Persentase Penduduk berakses Air Minum	DPUPR	20,00	21,52	64,29	65,56	64,50	66,57
Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	Ketaatan pembangunan terhadap RTRW	DPUPR	98,00	100,00	98,00	100,00	98,00	100,00



# STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERANGKAT DAERAH URUSAN SASARAN INDIKATOR : Wajib Dasar Perangkat Daerah Penanggung Jawab Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan AWAL RPJMD KINERJA KONDISI TARGET **KINERJA TAHUN 2019** REALISASI **KINERJA TAHUN 2020** TARGET REALISASI

4.2

Pembangunan akses masyarakat terhadap rumah layak huni

Rasio permukiman layak huni

0,59

0,61

0,59

0,61

0,59

KINERJA TAHUN

TARGET 0,62

Š

Luas Wilayah Permukiman Kumuh	Luas Wilayah Kabupaten	Luas Perkebunan	Luas Kehutanan	Luas Pertanian	Luas Wilayah Permukiman	Lampiran Data Rinci
II	11	п	11	II	II	
98 Ha	899.700,00 Ha	47.078,24 Ha	770.690,39 Ha	65.373,53 Ha	16.557,84 Ha	
SK Bupati & Pr Ha	BPS 2019	BPS 2019	BPS 2019	BPS 2019	BPS 2019	
тHа	Ha	H	Ha	Ha	Ha	
SK Bupati & Proyeksi Per Kecamata	BPS 2019	BPS 2019	BPS 2019	BPS 2019	BPS 2019	

Rumus Indikator: Luas Wilayah Permukiman Luas Wilayah Permukiman Kumuh

-x 100%

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pulang Pisau, 16 Maret 2020

NIP . 19650406 198903 1 014 EDY PURWANTO, S.Sos., M.Si Pembina Tk. I (IV/b)

Lampiran II Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Nama Perangkat Daerah **DINAS PERTANIAN** 

		Perangkat Daerah	KONDISI	KINERJA T	KINERJA TAHUN 2019	KINERJA TAHUN 2020	IHUN 2020	TAHUN 2021
SASAHAN	INDIKATOH	Penanggung jawab	AWAL RPJMD	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB (%)	Dinas Pertanian	8,95	9,00	8,49 ')	9,10	0**)	9,20
Meningkatnya produksi pertanian	Kontribusi Pertanian dalam arti luas dalam PDRB (%)	Dinas Pertanian	37,22	38,25	36,43 "	38,50	0**)	39,25
	?							

<sup>&</sup>quot;) BPS Pulang Pisau (Pulang Pisau Dalam Angka 2019) ") Angka Realisasi belum rilis dari BPS Pulang Pisau

Pulang Pisau, 16 Maret 2021

Pembina Utama Muda NIP. 19630510 199303 1 011 kab. Pulanci Pisau, ASSIGNMET ONTUNG RIYANTO H

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah RPJMD KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018-2023

Lampiran II : Target Tahunan Indikator Sasaran

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH – BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

SASARAN	INDIKATOR KINERIA	Perangkat Daerah	Cincol 4 4		
		Penanggung Jawab	KINERIA IAHUN 2020	HUN 2020	KINERIA TAHUN 2021
			TARGET	REALISASI	TARGET
Meningkatkan layanan kelistrikan	Meningkatkan layanan kelistrikan Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	Setda/ Bagian Perekonomian dan SDA	94,20	90,29	94,50

## Jumlah Anggaran Program Tahun 2020

1. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi

Rp. 65.500.000,-

( Realisasi Rp. 64.835.655,- )

### Alasan Realisasi Capaian Kinerja

Realisasi Tercapai	Realisasi Mdak Tercapai
a. Bahwa dari Anggaran Tahun 2020 pada Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi a.	Bahwa dari Kegiatan Pembuatan FS ( Feasibility Study ) dan DED ( Detail Engineering
sebesar Rp. 65.500.000,- terdiri dari kegiatan :	Design ) PLTS Terpusat pada Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi
1. Pendataan Desa-Desa yang Belum Tersentuh Jaringan Listrik PLN sebesar	sebesar Rp. 65.000.000,- tidak terlaksana karena rasionalisasi anggaran pada
Rp. 15.000.000,-	bulan Mei Tahun 2020 akibat Pandemi Covid – 19.
2. Konsultasi dan Koordinasi Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan sebesar b. Untuk	Untuk persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%) dari target Kinerja
Rp. 50.000.000,-	Tahun 2020 sebesar 94,20 terealisasi hanya 90,29. Dengan target 94,20 dan
3. Pendataan Desa-Desa untuk Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	realisasinya hanya 90,29 artinya target tidak tercapai karena dari usulan Pemerintah
sebesar Rp. 25.500.000,•	Kabupaten Pulang Pisau untuk Permohonan Bantuan LTSHE pada bulan Maret
4. Pembuatan FS ( Feasibility Study ) dan DED ( Detail Engineering Design ) PLTS Terpusat	Tahun 2020 dan 6 Agustus 2020 tidak terealisasi hanya terealisasi penambahan
sebesar Rp. 65.000.000,- ( dirasionalisasi ).	pemasangan PJU – TS sebanyak 100 titik pada Desa Pilang (50 titik) dan Desa Garung

			-	the state of	-	Rose State St	-	FF	1
***							_	,	
3. Kegiatan Pendataan Desa-Desa untuk Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru	Rp. 24.502.805,- atau 98,01 %.	anggaran akibat Pandemi Covid - 19 menjadi Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar	Terbarukan sebesar Rp. 50.000.000,- pada bulan Mei tahun 2020 karena rasionalisasi	2. Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru	Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.919.450,- atau 99,46 %.	1. Kegiatan Pendataan Desa-Desa Yang Belum Tersentuh Jaringan Listrik PLN sebesar	yaitu :	b. Dari kegiatan tersebut dapat dijelaskan bahwa hanya 3 (tiga) kegiatan yang terealisasi,	
				Tangga (35.065) sebesar 90,29 %.	Perbandingan antara Rumah Tang	Tangga Berlistrik yang semula	(delapan) Kecamatan di Kabupater	Seberang (50 titik) di Kecamatan Ja	

Terbarukan sebesar Rp. 25.500.000,- terealisasi sebesar RP. 25.413.400,- atau 99,66 %.

Sebcrang (50 titik) di Kecamatan Jabiren Raya, dimana jumlah Rumah Tangga pada 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau sebenyak 35.065 dengan Rumah Tangga Berlistrik yang semula berjumlah 31.561 menjadi 31.661 sehingga Perbandingan antara Rumah Tangga berlistrik (31.661) terhadap Jumlah Rumah Tangga (35.065) sebesar 90,29 %.

Pulang Pisau, 25 Januari 2021

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA,

DWI AGUSTINE DEWI, S. Pİ, M. Sİ. Pembina Tk. I ( IV/b ) NIP. 196808 199603 2 002

Lampiran II Nama Perangkat Daerah

: Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembagunan Daerah

: DINAS PERIKANAN

	Menigkatnya Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap		SASARAN
3	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)		INDIKATOR
	Dinas Perikanan	JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
	23.493,99	RPJMD	KONDISI KINERJA AWAL
	23.912,94	TARGET	KINERJA TAHUN 2019
	23.589,20	REALISASI	AHUN 2019
	24.125,42	TARGET	KINERJA TAHUN 2020
	23.938,12	REALISASI	AHUN 2020
	24.339,93	TARGET	KINERJA TAHUN 2021

Pulang Pisau, Februari 2021

KABUPATEN PERIKANAN
KABUPATEN PERIKANAN
KABUPATEN PERIKANAN

Ir. H. RZDUÁN SYAHRANI
ULAN Pembina Utama Muda
HEL 19620214 198901 1 001

\* DINAS PERIKANAN

-

20

Lampiran II : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pengembangan Daerah OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PULANG PISAU

10,50	42	10,65	10,67	11,05	11,05	DLH	Luas Kebakaran (Ha)	
1,105	105	1,065	6.344	1.105	1.105	DLH	Jumlah Hotspot (Titik)	hidup
84	95,36	84,00	92,47	84,00	98,6	DLH	Indeks Kualitas Udara	Meningkatnya status lingkungan
5,00	4,29	5,00	4,87	5,00	5,94	DLH	Status Mutu Air	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target		90		
Kinerja Tahun 2021	Kinerja Tahun 2020	Kinerja 1	ıun 2019	Kinerja Tahun 2019	Kondisi Kinerja Awai	Perangkat Daerah	INDIKATOR KINERJA	SASARAN

### Catatan:

- Semakin tinggi nilai indeks pencemaran, semakin rendah kategori mutu air nilai indeks pencemaran = 4,29 maka status mutu air = Cemar ringan
- Semakin tinggi nilai indeks kualitas udara (IKU), semakin tinggi klasifikasi indeks kualitas udara nilai IKU = 95,36 maka klasifikasi IKU = Unggul
- Semakin sedikit titik hotspot maka potensi luasan bencana kebakaran hutan dan lahan semakin sedikit, hotspot sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, samakin panas maka potensi kemunculan hotspot juga semakin tinggi, 1 titik hotspot menandakan areal seluas 1 grid atau 1 Km²
- semakin kecil luasan kebakaran hutan dan lahan semakin rendah tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan, hal ini dikarenakan areal yang dulu terbakar setelahnya tidak lagi terbakar karena ada intervensi kegiatan dilokasi tersebut.

Pulang pisau, Pebruari 2021



Strategi Arah Kebijakan dan Frogram Pembangunan Daerah
 Dinas Pendidikan

	-		W-20057	ALTERNATION OF THE PERSON NAMED IN
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat		Sasaran
		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun )		Indikator
		Disdik	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah
the same of the sa		7,67	Awal RPJMD	Kondisi Kinerja
		8,77	Target	Kinerja T
The same of the sa		9,18	Realisasi	Kinerja Tahun 2020
The Party of Lot		8,80	Target	Kinerja Tahun 2021

Pulang Pisau, 4 Februari 2021



Lampiran II

: Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Nama Perangkat Daerah

: DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

						Transmigrasi		
1,43	2,63	1,63	1,74	1,83	2,15	Kerja dan	Terbuka (%)	Kesejahteraan Masyarakat Terbuka (%)
						Dinas Tenaga	Tingkat Pengangguran	Meningkatnya
						Transmigrasi		
75,38	72,77	75,21	75,31	75,04	74,72	Kerja dan	Angkatan Kerja (%)	Pendidikan Masyarakat
						Dinas Tenaga	TPAK- Tingkat Partisipasi	Meningkatnya Kualitas
TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET REALISASI TARGET REALISASI	TARGET	AWAL KPJMD	Jawab		3.
					MENERAL	renanggung	INCINALON	OHOMINAIN
KINERJA TAHUN 2021	KINERJA TAHUN 2020	KINERJ 20	KINERJA TAHUN 2019	KINER.	KONDISI	Perangkat Daerah	BOTATION	GAGADAN

### Catatan

- Angka Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) diperoleh dari Jumlah Angkatan Kerja (AK) dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) dikali 100;
- Angka Tingkat Pengangguran Teruka (TPT) diperoleh dari Jumlah Pengangguran dibagi Jumlah Angkata Kerja dibagi 100.
- Target Peningkatan TPAK dan Penurunan TPT pada Tahun 2020 tidak dapat dicapai disebabkan oleh Dampak Covid 19, yang mengakibatkan Jumlah Penduduk Yang Bekerja (PYB) menurun dan Jumlah Penganggur (P) bertambah.

Pulang Makaba Januari 2021
Kepala Dinas Lenaga Kerjudad Transmigrasi

Lanus Tenuarian

Lanu

Lampiran II Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Nama Perangkat Daeral:

Dinas Kesehatan

<b>TARGET</b> 70,76	REALISASI 68,04	<b>TARGET</b> 70,03	REALISASI 67,90	<b>TARGET</b> 69,45	RPJMD 67,75	Penanggung jawab  Dinas Kesehatan	INDIKATOR Angka Harapan Hidup (Tahun)	SASARAN  Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
KINERJA TAHUN 2021	AHUN 2020	KINERJA TAHUN 2020	RJA 2019	KINERJ	KONDISI			



Lampiran II

Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Nama Perangkat Daerah

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

SASARAN	INDIKATOR	Perangkat Daerah Penanggungjawab	KONDISI KINERJA AWAL	KINERJA T	KINERJA TAHUN 2020	KINERJA TAHUN 2021
			RPJMD	TARGET	TARGET REALISASI TARGET	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam Ekonomi Lokal	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi) Disperindagkop UKM	Disperindagkop UKM	138	156	146	160

Catatan : Data Per 31 Desember 2020

Koperasi Tidak Aktif Koperasi Aktif Jumlah Koperasi

172 146 26

Pulang Pisau, Pebruari 2021

KEPALA DINAS,

U DISPERINDACKO NIP. 19681010 199009 1 002 Rehibina Utama Muda ELIESER JAYA, S.Sos

Lampiran II

: Strategi Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Nama Perangkat Daerah

: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau

Γ	E	J.P.K.	<	-	Τ	T			
	konomi Lokal		Meninokatmya						SASARAN
	1	Kunjungan wisata (Orang)	Iumlah						INDIKATOR
		DISCOURAN				JAWAB	PENANGGUNG AWAL RPJML	DAERAH	PERANGKAT
		9,914					AWAL RPJMD	KINERJA	KONDISI
		10.000.			TERGET				KINERIA
		4,496		TOTATION	REALISASI			CT07 4012	KINERIA TAHIN 2010
		11.000.		TENOLI	TEDCET			NINEKJA I	T AI G TI A T
		245		NEALISASI	DEALIGACI			NINERJA IAHUN 2020	TATION OF THE PARTY OF THE PART
		9.000.		IAKGET			<b>TAHUN 2021</b>	KINERJA	

### Catatan:

Realisasi Kinerja Tahun 2020 tidak seusai dengan target semula dikarenakan Faktor Pandemi Covid 19 yang mempengaruhi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di kabupaten pulang pisau walaupun demikian Pemerintah Daerah tetap berupaya memulihkan ekonomi sektor pariwisata di sektor pariwisata ini dengan salah satu program BTT Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid 19.

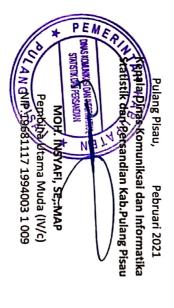


Nama Perangkat Daerah Lampiran II

: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

SASARAN	INDIKATOR	Perangkat Daerah	KONDISI	KINERJA TAHUN 2019	HUN 2019	KINERJA TAHUN 2020	HUN 2020	KINERJA TAHUN 2021
		- changeang sawas	AWAL RPJMD	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
Meningkatnnya kualitas	Persentase Perangkat Daerah yang	DISKOMINEO	<b>o</b>	6 PD/37 PD	6 PD/37 PD	30 PD/37 PD	31 PD/37 PD	31 PD/37 PD
pelayanan publik	Menerapkan e-government (%)	O NOTICE OF	ď	16.22%	16.22%	81,08%	83,78%	0,00%
Ket:								

- \* Target kinerja tahun 2020 sebanyak 30 Perangkat Daerah atau 81,08 % dari seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang berjumlah 37 Perangkat Daerah
- \* Target Realisasi tahun 2020 sebanyak 30 Perangkat Daerah atau 83,78 % dari seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang berjumlah 37 Perar
- \* Target Kinerja tahun 2021 sebanyak 31 Perangkat Daerah atau 83,78 % dari seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang berjumlah 37 Perang



Lampiran II Nama Perangkat Daerah

: Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

: SEKRETARIAT DAERAH - KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN

Meningkatkan peran organisasi keagamaan	MANAGAG	CACADAN	
Jumlah rumah ibadah (Unit)	INDINATOR	TOTAL VICTOR	
Setda	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah	
527	RPJMD	Kondisi Kinerja Awal	
533	TARGET	KINERJA .	
517	REALISASI	KINERJA TAHUN 2020	
535	TARGET	KINERJA TAHUN 2021	

## Jumlah Anggaran Proram Tahun 2020

Program peningkatan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan Rp. 20.000.000 (Realisasi Rp. 19.677.750)

Realisasi Tercapai	Realisasi Tidak tercapai
	- Adanya Rumah Ibadah yang belum terdata
	- Survey dan monitoring Rumah Ibadah yang belum menyeluruh

Pulang Pisau, Februari 2021

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Drs. SUMADI, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19650327 199303 1 006

Lampiran

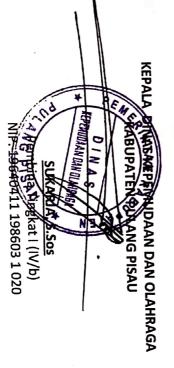
: Srategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Nama Perangkat Daerah

: DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Meningkatnya peran serta pemuda dan perempuan dalam pembangunan		Sasaran
Jumlah medali olahraga		Indikator
DISPORA	Jawab	Perangkat Daerah
60	RPJMD	Kondisi Kinerja Awal
20	Target	Kinerja Ta
14	Realisasi	Tahun 2019
30	Target	Kinerja Tahun 2020
0	Realisasi	
20	Target	Kinerja Tahun 2021
kinerja tanun 2020 realisasi duak mencapai target disebabkan keglatan Dispora banyak yang ditiadakan dikarenakan Covit-19 yang melarang pengumpulan masa/ orang.		Keterangan

Pulang Pisau, 1 Februari 2021



LAMPIRAN II : Strategi Arah Kebijakan dan Program Daerah

Nama Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	T			יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	0000000	CONTRACTOR AND	מא מבאבואר	AWA
SASARAN	INDIKATOR	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020	- 1	Kinerja
		Penanggung jawab						Tahun 2021
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
1	2	ω	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya peran	Persentase	DP3AP2KB	28	29	29	29	21	30
pemuda dan perempuan	Partisipasi							
dalam pembangunan	Perempuan di							
	DPRD (%)							

Pulang Pisau, 28 Januari 2021

Kepala Bings Pemberdayaan Perempuan
Perlindhigan Angas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berengana

San Keluarga Berengana

Languarga Berengana

RPJMD KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018-2023 BAB VI , Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah



### PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2020

CODE DEVENING	UDAIAN	ANCCADAN		REALISASI		LEDILL / (VLIDANC)
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
4	PENDAPATAN - LRA	923.801.666.037,51	0,00	902.365.343.605,45	902.365.343.605,45	(21.436.322.432,
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	46.064.147.985,51	0,00	42.513.406.893,00	42.513.406.893,00	(3.550.741.092,
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	11.248.274.320,05	0,00	9.069.779.611,50	9.069.779.611,50	(2.178.494.708,
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA	7.000.000,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	(5.840.000,
4 . 1 . 1 . 06 . 03	Losmen - LRA	7.000.000,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	(5.840.000,
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA	945.000.000,00	0,00	1.176.178.045,50	1.176.178.045,50	231.178.045,
4.1.1.07.02	Rumah Makan - LRA	30.000.000,00	0,00	16.188.260,00	16.188.260,00	(13.811.740,
4.1.1.07.05	Warung - LRA	15.000.000,00	0,00	15.388.100,00	15.388.100,00	388.100,
4.1.1.07.07	Jasa Boga/ Katering - LRA	900.000.000,00	0,00	1.144.601.685,50	1.144.601.685,50	244.601.685,
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA	10.125.000,00	0,00	2.106.500,00	2.106.500,00	(8.018.500,
4.1.1.08.05	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya - LRA	5.250.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	(3.650.000,
4 . 1 . 1 . 08 . 08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LRA	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.875.000,
4 . 1 . 1 . 08 . 09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) - LRA	1.500.000,00	0,00	406.500,00	406.500,00	(1.093.500)
4 . 1 . 1 . 08 . 10	Pertandingan Olahraga - LRA	1.500.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	(1.400.000,
4.1.1.09	Pajak Reklame - LRA	40.000.000,00	0,00	53.284.700,00	53.284.700,00	13.284.700,
4.1.1.09.01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	30.000.000,00	0,00	35.340.700,00	35.340.700,00	5.340.700
4.1.1.09.02	Reklame Kain - LRA	10.000.000,00	0,00	17.944.000,00	17.944.000,00	7.944.000
4 . 1 . 1 . 10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	3.000.000.000,00	0,00	2.925.408.929,00	2.925.408.929,00	(74.591.071,
4 . 1 . 1 . 10 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LRA	3.000.000.000,00	0,00	2.925.408.929,00	2.925.408.929,00	(74.591.071,
4.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	50.000.000,00	0,00	36.430.000,00	36.430.000,00	(13.570.000,
4.1.1.13.01	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	50.000.000,00	0,00	36.430.000,00	36.430.000,00	(13.570.000,
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	2.400.000.000,00	0,00	3.552.357.852,00	3.552.357.852,00	1.152.357.852,
4.1.1.14.12	Granit/Andesit - LRA	75.000.000,00	0,00	21.837.657,00	21.837.657,00	(53.162.343,
4.1.1.14.23	Pasir dan kerikil - LRA	2.250.000.000,00	0,00	3.450.894.705,00	3.450.894.705,00	1.200.894.705,
4 . 1 . 1 . 14 . 28	Tanah Serap (Fullers earth) - LRA	75.000.000,00	0,00	79.625.490,00	79.625.490,00	4.625.490
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	1.500.000.000,00	0,00	1.016.995.160,00	1.016.995.160,00	(483.004.840,
4 . 1 . 1 . 15 . 01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	1.500.000.000,00	0,00	1.016.995.160,00	1.016.995.160,00	(483.004.840,
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	3.296.149.320,05	0,00	305.858.425,00	305.858.425,00	(2.990.290.895
4.1.1.16.01	BPHTB - Pemindahan Hak - LRA	500.000.000,00	0,00	262.683.095,00	262.683.095,00	(237.316.905,

KODE BEKENING	UDAMAN	ANGGARAN		REALISASI		LEBUL ( ((UDANO)
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
4 . 1 . 1 . 16 . 02	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA	2.796.149.320,05	0,00	43.175.330,00	43.175.330,00	(2.752.973.990,05)
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	4.505.728.400,00	0,00	1.651.272.537,00	1.651.272.537,00	(2.854.455.863,00)
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	1.061.500.000,00	0,00	624.682.700,00	624.682.700,00	(436.817.300,00)
4.1.2.01.01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	1.061.500.000,00	0,00	624.682.700,00	624.682.700,00	(436.817.300,00)
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	148.500.000,00	0,00	19.080.000,00	19.080.000,00	(129.420.000,00)
4.1.2.02.01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LRA	148.500.000,00	0,00	19.080.000,00	19.080.000,00	(129.420.000,00)
4.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	45.500.000,00	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	(21.100.000,00)
4.1.2.05.01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	45.500.000,00	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	(21.100.000,00)
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	50.478.400,00	0,00	24.968.000,00	24.968.000,00	(25.510.400,00)
4 . 1 . 2 . 06 . 01	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LRA	17.228.400,00	0,00	2.566.000,00	2.566.000,00	(14.662.400,00)
4.1.2.06.02	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA	29.250.000,00	0,00	17.602.000,00	17.602.000,00	(11.648.000,00)
4 . 1 . 2 . 06 . 03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA	4.000.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	800.000,00
4.1.2.12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	37.500.000,00	0,00	66.695.500,00	66.695.500,00	29.195.500,00
4.1.2.12.03	Retribusi Pelayanan tera-Tera Ulang	37.500.000,00	0,00	66.695.500,00	66.695.500,00	29.195.500,00
4 . 1 . 2 . 15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	557.500.000,00	0,00	240.674.000,00	240.674.000,00	(316.826.000,00)
4.1.2.15.01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	240.000.000,00	0,00	138.259.000,00	138.259.000,00	(101.741.000,00)
4 . 1 . 2 . 15 . 03	Ruangan -LRA	77.000.000,00	0,00	48.665.000,00	48.665.000,00	(28.335.000,00)
4 . 1 . 2 . 15 . 04	Kendaraan Bermotor - LRA	240.500.000,00	0,00	53.750.000,00	53.750.000,00	(186.750.000,00)
4 . 1 . 2 . 15 . 05	Sewa Kapal - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	184.000.000,00	0,00	125.185.000,00	125.185.000,00	(58.815.000,00)
4 . 1 . 2 . 20 . 01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA	184.000.000,00	0,00	125.185.000,00	125.185.000,00	(58.815.000,00)
4.1.2.21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	17.500.000,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	(9.800.000,00)
4.1.2.21.01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LRA	17.500.000,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	(9.800.000,00)
4.1.2.22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	(11.250.000,00)
4.1.2.22.01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	(11.250.000,00)
4.1.2.24	Retribusi Penyebrangan Air - LRA	315.000.000,00	0,00	294.700.000,00	294.700.000,00	(20.300.000,00)
4.1.2.24.01	Pelayanan Penyebrangan Orang - LRA	315.000.000,00	0,00	294.700.000,00	294.700.000,00	(20.300.000,00)
4 . 1 . 2 . 25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	136.000.000,00	0,00	32.650.000,00	32.650.000,00	(103.350.000,00)
4 . 1 . 2 . 25 . 01	Penjualan Hasil Produksi Usaha - LRA	136.000.000,00	0,00	32.650.000,00	32.650.000,00	(103.350.000,00)
4.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	1.885.000.000,00	0,00	190.537.337,00	190.537.337,00	(1.694.462.663,00)
4 . 1 . 2 . 26 . 01	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan - LRA	1.885.000.000,00	0,00	190.537.337,00	190.537.337,00	(1.694.462.663,00)
4.1.2.32	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(35.000.000,00)

KODE REKENING	LIDAIAN	ANICCADANI	REALISASI			LEDILI / (VUDANO)
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
4.1.2.32.01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(35.000.000,00)
4.1.2.33	Retribusi ASDP -LRA	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(21.000.000,00)
4 . 1 . 2 . 33 . 01	Retrubusi ASDP-LRA	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(21.000.000,00)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	4.942.536.465,00	0,00	6.070.021.655,00	6.070.021.655,00	1.127.485.190,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	4.942.536.465,00	0,00	6.070.021.655,00	6.070.021.655,00	1.127.485.190,00
4.1.3.01.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	4.942.536.465,00	0,00	6.070.021.655,00	6.070.021.655,00	1.127.485.190,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	25.367.608.800,46	0,00	25.722.333.089,50	25.722.333.089,50	354.724.289,04
4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	2.000.000.000,00	0,00	2.098.267.281,41	2.098.267.281,41	98.267.281,41
4 . 1 . 4 . 03 . 01	Jasa Giro Kas Daerah - LRA	2.000.000.000,00	0,00	1.984.868.811,01	1.984.868.811,01	(15.131.188,99)
4 . 1 . 4 . 03 . 02	Jasa Giro Bendahara - LRA	0,00	0,00	113.398.470,40	113.398.470,40	113.398.470,40
4 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Bunga - LRA	1.100.000.000,00	0,00	134.366.650,00	134.366.650,00	(965.633.350,00)
4 . 1 . 4 . 04 . 01	Pendapatan Bunga Deposito LRA	1.100.000.000,00	0,00	134.366.650,00	134.366.650,00	(965.633.350,00)
4.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	0,00	76.515.714,00	76.515.714,00	76.515.714,00
4.1.4.07.03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LRA	0,00	0,00	76.515.714,00	76.515.714,00	76.515.714,00
4 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Pajak - LRA	0,00	0,00	26.354.013,00	26.354.013,00	26.354.013,00
4 . 1 . 4 . 08 . 15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	0,00	0,00	26.354.013,00	26.354.013,00	26.354.013,00
4 . 1 . 4 . 13	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	1.433.418.453,91	1.433.418.453,91	1.433.418.453,91
4 . 1 . 4 . 13 . 03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA	0,00	0,00	365.382.108,25	365.382.108,25	365.382.108,25
4 . 1 . 4 . 13 . 06	Pendapatan dari Pengembalian LHP	0,00	0,00	1.068.036.345,66	1.068.036.345,66	1.068.036.345,66
4 . 1 . 4 . 18	Pendapatan BLUD - LRA	16.267.608.800,46	0,00	16.462.790.839,00	16.462.790.839,00	195.182.038,54
4 . 1 . 4 . 18 . 01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA	16.267.608.800,46	0,00	16.462.790.839,00	16.462.790.839,00	195.182.038,54
4 . 1 . 4 . 19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	772.875.913,18	772.875.913,18	772.875.913,18
4.1.4.19.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	772.875.913,18	772.875.913,18	772.875.913,18
4.1.4.23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	6.000.000.000,00	0,00	4.717.744.225,00	4.717.744.225,00	(1.282.255.775,00)
4 . 1 . 4 . 23 . 02	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bahaur Hilir - LRA	435.450.200,00	0,00	325.992.000,00	325.992.000,00	(109.458.200,00)
4.1.4.23.03	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bahaur Tengah - LRA	375.247.970,30	0,00	272.835.300,00	272.835.300,00	(102.412.670,30)
4.1.4.23.04	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pangkoh - LRA	623.530.024,00	0,00	413.816.700,00	413.816.700,00	(209.713.324,00)
4 . 1 . 4 . 23 . 05	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Maliku - LRA	923.940.215,00	0,00	771.169.100,00	771.169.100,00	(152.771.115,00,
4.1.4.23.06	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sebangau - LRA	411.806.156,00	0,00	376.963.925,00	376.963.925,00	(34.842.231,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		LEBIH / (KURANG)
RODE RECEIVING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
4.1.4.23.07	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pulang Pisau - LRA	1.151.021.000,00	0,00	886.265.400,00	886.265.400,00	(264.755.600,00,
4 . 1 . 4 . 23 . 08	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bereng - LRA	524.012.648,00	0,00	532.079.650,00	532.079.650,00	8.067.002,00
4 . 1 . 4 . 23 . 09	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Jabiren - LRA	456.069.649,00	0,00	281.131.500,00	281.131.500,00	(174.938.149,00)
4 . 1 . 4 . 23 . 10	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bukit Rawi - LRA	400.101.042,30	0,00	343.217.900,00	343.217.900,00	(56.883.142,30,
4.1.4.23.11	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bawan - LRA	281.842.551,60	0,00	173.019.900,00	173.019.900,00	(108.822.651,60)
4 . 1 . 4 . 23 . 12	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tangkahen - LRA	66.978.543,80	0,00	28.304.400,00	28.304.400,00	(38.674.143,80)
4 . 1 . 4 . 23 . 13	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tahai - LRA	350.000.000,00	0,00	312.948.450,00	312.948.450,00	(37.051.550,00,
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	851.739.855.052,00	0,00	859.851.936.712,45	859.851.936.712,45	8.112.081.660,45
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	698.451.887.052,00	0,00	713.823.881.333,00	713.823.881.333,00	15.371.994.281,00
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - LRA	10.921.718.000,00	0,00	10.461.725.923,00	10.461.725.923,00	(459.992.077,00)
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA	7.037.754.000,00	0,00	6.620.231.184,00	6.620.231.184,00	(417.522.816,00)
4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	3.883.964.000,00	0,00	3.813.680.662,00	3.813.680.662,00	(70.283.338,00)
4.2.1.01.05	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA	0,00	0,00	27.814.077,00	27.814.077,00	27.814.077,00
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	27.662.528.000,00	0,00	48.646.876.260,00	48.646.876.260,00	20.984.348.260,00
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	5.777.376.000,00	0,00	3.834.866.696,00	3.834.866.696,00	(1.942.509.304,00)
4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	24.234.000,00	0,00	23.885.000,00	23.885.000,00	(349.000,00)
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Perikanan - LRA	1.418.361.000,00	0,00	788.276.289,00	788.276.289,00	(630.084.711,00)
4 . 2 . 1 . 02 . 12	Bagi Hasil Dari Royalti Mineral dan Batubara - LRA	20.442.557.000,00	0,00	43.999.848.275,00	43.999.848.275,00	23.557.291.275,00
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	524.333.062.000,00	0,00	521.961.404.000,00	521.961.404.000,00	(2.371.658.000,00,
4.2.1.03.01	Dana Alokasi Umum - LRA	524.333.062.000,00	0,00	521.961.404.000,00	521.961.404.000,00	(2.371.658.000,00,
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	69.839.289.000,00	0,00	65.959.430.046,00	65.959.430.046,00	(3.879.858.954,00,
4.2.1.04.04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	3.188.221.000,00	0,00	3.188.221.000,00	3.188.221.000,00	0,00
4.2.1.04.07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA	1.423.978.000,00	0,00	1.423.978.000,00	1.423.978.000,00	0,00
4.2.1.04.08	DAK Bidang Kesehatan - LRA	23.584.357.000,00	0,00	19.928.392.977,00	19.928.392.977,00	(3.655.964.023,00)
4.2.1.04.18	DAK Bidang Pendidikan - LRA	7.766.530.000,00	0,00	7.724.401.900,00	7.724.401.900,00	(42.128.100,00,
4.2.1.04.24	DAK Peugasan Bidang Irigasi	3.890.048.000,00	0,00	3.809.721.000,00	3.809.721.000,00	(80.327.000,00,
4.2.1.04.29	DAK Reguler Bidang Jalan - LRA	24.097.554.000,00	0,00	24.097.553.134,00	24.097.553.134,00	(866,00)
4 . 2 . 1 . 04 . 30	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Penurunan Stunting - LRA	176.158.000,00	0,00	165.910.100,00	165.910.100,00	(10.247.900,00,
4 . 2 . 1 . 04 . 31	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Pengendalian Penyakit - LRA	1.069.876.000,00	0,00	1.008.427.631,00	1.008.427.631,00	(61.448.369,00,
4.2.1.04.32	DAK Penugasan Bidang Pasar - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.35	DAK Penugasan Bidang Pertanian - LRA	720.000.000,00	0,00	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00
4.2.1.04.36	DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	1.376.561.000,00	0,00	1.373.223.500,00	1.373.223.500,00	(3.337.500,00,
4.2.1.04.37	DAK Penugasan Bidang Pariwisata - LRA	2.546.006.000,00	0,00	2.519.600.804,00	2.519.600.804,00	(26.405.196,00)
4.2.1.05	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	65.695.290.052,00	0,00	66.794.445.104,00	66.794.445.104,00	1.099.155.052,00

KODE BEKENING	URAIAN	ANICCADAN		REALISASI		LEDIU / (KUDANO)
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
4.2.1.05.02	DAK Tunjangan Profesi Gusu PNS Daerah (TPG PNSD) - LRA	50.874.273.000,00	0,00	50.874.273.000,00	50.874.273.000,00	0,0
4.2.1.05.03	DAK Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah (Tamsil PNSD) -	1.000.500.000,00	0,00	1.000.500.000,00	1.000.500.000,00	0,0
	LRA					
4.2.1.05.05	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak	1.997.400.000,00	0,00	1.997.400.000,00	1.997.400.000,00	0,0
4.2.1.05.06	Usia Dini (BOP PAUD) - LRA DAK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan	10.621.297.247,00	0,00	11.887.908.647,00	11.887.908.647,00	1.266.611.400,0
7.2.7.00.00	Operasional Keluarga Berencana (BOKB) - LRA	70.021.277.217,00	0,00	77.007.700.077,00	17.007.700.077,00	7.200.077.700,0
4.2.1.05.08	DAK Tunjangan Khusus Guru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.2.1.05.09	DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan	621.369.805,00	0,00	621.369.657,00	621.369.657,00	(148,0
4 . 2 . 1 . 05 . 10	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	236.400.000,00	0,00	118.200.000,00	118.200.000,00	(118.200.000,0
4 2 4 25 44	Kesetaraan (BOP Kesetaraan)	244 050 000 00	2.22	224 722 222 22	204 702 000 00	(40.05/.000/
4.2.1.05.11	DAK Pelayanan Kepariwisataan	344.050.000,00	0,00	294.793.800,00	294.793.800,00	(49.256.200,0
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	121.512.968.000,00	0,00	121.512.968.000,00	121.512.968.000,00	0,0
4.2.2.03	Dana Penyesualan - LRA	121.512.968.000,00	0,00	121.512.968.000,00	121.512.968.000,00	0,0
4 . 2 . 2 . 03 . 03	Dana Insentif Daerah - LRA	27.597.284.000,00	0,00	27.597.284.000,00	27.597.284.000,00	0,0
4 . 2 . 2 . 03 . 06	Transfer Dana Desa- LRA	93.915.684.000,00	0,00	93.915.684.000,00	93.915.684.000,00	0,0
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	31.775.000.000,00	0,00	24.515.087.379,45	24.515.087.379,45	(7.259.912.620,5
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	31.775.000.000,00	0,00	24.515.087.379,45	24.515.087.379,45	(7.259.912.620,5
4.2.3.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	4.260.436.529,82	0,00	2.814.856.134,07	2.814.856.134,07	(1.445.580.395,7
4.2.3.01.03	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.713.758.972,87	0,00	3.693.737.239,45	3.693.737.239,45	(1.020.021.733,4.
4 . 2 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor- LRA	16.638.893.813,50	0,00	11.857.677.016,64	11.857.677.016,64	(4.781.216.796,8
4.2.3.01.06	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan- LRA	29.457.099,82	0,00	6.173.408,29	6.173.408,29	(23.283.691,5
4.2.3.01.07	Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA	6.132.453.583,99	0,00	6.142.643.581,00	6.142.643.581,00	10.189.997,0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	25.997.663.000,00	0,00	0,00	0,00	(25.997.663.000,0
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	25.997.663.000,00	0,00	0,00	0,00	(25.997.663.000,00
4.3.3.03	Pendapatan Lainnya Dana BOS	25.997.663.000,00	0,00	0,00	0,00	(25.997.663.000,0
4 . 3 . 3 . 03 . 01	Pendapatan Lainnya Dana BOS	25.997.663.000,00	0,00	0,00	0,00	(25.997.663.000,00
5	BELANJA	830.776.262.798,14	0,00	745.233.989.597,25	745.233.989.597,25	(85.542.273.200,89
5 . 1	BELANJA OPERASI	592.665.379.685,56	0,00	533.461.574.436,25	533.461.574.436,25	(59.203.805.249,3
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	391.761.463.802,42	0,00	366.375.006.242,25	366.375.006.242,25	(25.386.457.560,1
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	303.291.760.131,49	0,00	279.888.444.165,25	279.888.444.165,25	(23.403.315.966,2
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	173.456.010.889,03	0,00	167.924.571.827,00	167.924.571.827,00	(5.531.439.062,0
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga	15.723.742.544,06	0,00	15.276.443.064,25	15.276.443.064,25	(447.299.479,8
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan	6.033.967.875,00	0,00	5.954.198.000,00	5.954.198.000,00	(79.769.875,0
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Belanja Tunjangan Fungsional	12.145.385.200,00	0,00	12.004.447.000,00	12.004.447.000,00	(140.938.200,0
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	1.574.991.200,00	0,00	1.453.045.000,00	1.453.045.000,00	(121.946.200,0
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Belanja Tunjangan Beras	8.199.471.508,60	0,00	7.926.581.660,00	7.926.581.660,00	(272.889.848,6

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		LEBIH / (KURANG)
RODE REKEINING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	LEDIH / (KURANG)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.202.556.170,61	0,00	925.891.704,00	925.891.704,00	(276.664.466,61
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Belanja Pembulatan Gaji	2.284.580,69	0,00	2.219.728,00	2.219.728,00	(64.852,69
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan	7.128.792.711,66	0,00	6.942.570.002,00	6.942.570.002,00	(186.222.709,66
5 . 1 . 1 . 01 . 10	Belanja Uang Paket	48.533.100,00	0,00	48.132.000,00	48.132.000,00	(401.100,00
5 . 1 . 1 . 01 . 11	Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	18.974.917,50	0,00	18.818.100,00	18.818.100,00	(156.817,50
5 . 1 . 1 . 01 . 12	Belanja Tunjangan Komisi	32.607.382,50	0,00	32.337.900,00	32.337.900,00	(269.482,50
5 . 1 . 1 . 01 . 13	Belanja Tunjangan Badan Anggaran	18.606.472,50	0,00	18.452.700,00	18.452.700,00	(153.772,50
5 . 1 . 1 . 01 . 14	Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	5.710.893,50	0,00	5.663.696,00	5.663.696,00	(47.197,50
5 . 1 . 1 . 01 . 16	Belanja Tunjangan Perumahan	2.109.030.000,00	0,00	2.091.600.000,00	2.091.600.000,00	(17.430.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 18	Belanja Uang Jasa Pengabdian	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(100.000.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	286.438.197,50	0,00	110.880.000,00	110.880.000,00	(175.558.197,50
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Daerah	65.082.511.145,75	0,00	51.143.588.983,00	51.143.588.983,00	(13.938.922.162,75
5 . 1 . 1 . 01 . 22	Tunjangan Badan Legeslasi	11.606.017,50	0,00	11.510.100,00	11.510.100,00	(95.917,50
5 . 1 . 1 . 01 . 23	luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	359.040.784,81	0,00	345.320.618,00	345.320.618,00	(13.720.166,81
5 . 1 . 1 . 01 . 24	luran Jaminan Kematian (JKM)	1.076.235.040,28	0,00	1.035.974.783,00	1.035.974.783,00	(40.260.257,28
5 . 1 . 1 . 01 . 25	Tunjangan Khusus Guru	3.964.663.500,00	0,00	2.869.197.300,00	2.869.197.300,00	(1.095.466.200,00
5 . 1 . 1 . 01 . 26	Tunjangan Reses	1.250.000.000,00	0,00	315.000.000,00	315.000.000,00	(935.000.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 27	Tunjangan Transportasi	3.460.600.000,00	0,00	3.432.000.000,00	3.432.000.000,00	(28.600.000,00
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	53.183.399.245,00	0,00	53.171.484.060,00	53.171.484.060,00	(11.915.185,00
5 . 1 . 1 . 02 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	533.160.500,00	0,00	523.750.000,00	523.750.000,00	(9.410.500,00
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Pendidik /TPP Guru	51.602.413.745,00	0,00	51.599.984.060,00	51.599.984.060,00	(2.429.685,00
5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan Penghasilan Guru	1.047.825.000,00	0,00	1.047.750.000,00	1.047.750.000,00	(75.000,00
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta	2.205.750.000,00	0,00	2.190.000.000,00	2.190.000.000,00	(15.750.000,00
5 . 1 . 1 . 03 . 01	KDH/WKDH Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.905.750.000,00	0,00	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	(15.750.000,00
5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 05	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	526.414.625,00	0,00	287.250.000,00	287.250.000,00	(239.164.625,00
5 . 1 . 1 . 05 . 01	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	526.414.625,00	0,00	287.250.000,00	287.250.000,00	(239.164.625,00
5 . 1 . 1 . 06	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	398.306.610,85	0,00	13.353.500,00	13.353.500,00	(384.953.110,85
5 . 1 . 1 . 06 . 01	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LRA	398.306.610,85	0,00	13.353.500,00	13.353.500,00	(384.953.110,85
5 . 1 . 1 . 07	Belanja Uang Lembur	495.073.000,00	0,00	444.437.440,00	444.437.440,00	(50.635.560,00
5 . 1 . 1 . 07 . 01	Belanja Uang Lembur PNS	443.073.000,00	0,00	408.840.440,00	408.840.440,00	(34.232.560,00
5 . 1 . 1 . 07 . 02	Belanja Uang Lembur Non PNS	52.000.000,00	0,00	35.597.000,00	35.597.000,00	(16.403.000,00
5 . 1 . 1 . 09	Honorarium PNS	7.211.612.883,00	0,00	6.982.135.668,00	6.982.135.668,00	(229.477.215,00
5.1.1.09.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.651.753.550,00	0,00	3.423.335.668,00	3.423.335.668,00	(228.417.882,00

WODE DEVENING	UDAMAN	ANICCADANI		REALISASI		LEBUL ( (VIIDANO)
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
5 . 1 . 1 . 09 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Jgn dipakai - Hubungi Joni)	0,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00
5 . 1 . 1 . 09 . 04	Honorarium PNS Lainnya	3.559.859.333,00	0,00	3.539.000.000,00	3.539.000.000,00	(20.859.333,00)
5 . 1 . 1 . 10	Honorarium Non PNS	24.449.147.307,08	0,00	23.397.901.409,00	23.397.901.409,00	(1.051.245.898,08)
5 . 1 . 1 . 10 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Jgn dipakai-Hubungi Joni)	0,00	0,00	29.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00
5 . 1 . 1 . 10 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.449.147.307,08	0,00	23.368.601.409,00	23.368.601.409,00	(1.080.545.898,08)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	184.027.392.198,09	0,00	160.401.438.870,00	160.401.438.870,00	(23.625.953.328,09)
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.926.322.140,70	0,00	6.674.021.367,00	6.674.021.367,00	(252.300.773,70)
5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.711.832.380,13	0,00	3.591.954.709,00	3.591.954.709,00	(119.877.671,13)
5 . 1 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	485.352.300,00	0,00	470.362.555,00	470.362.555,00	(14.989.745,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	253.227.750,00	0,00	231.673.000,00	231.673.000,00	(21.554.750,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.004.624.716,57	0,00	978.651.902,00	978.651.902,00	(25.972.814,57)
5 . 1 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	973.536.000,00	0,00	945.621.401,00	945.621.401,00	(27.914.599,00)
5.1.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	25.930.000,00	0,00	21.555.000,00	21.555.000,00	(4.375.000,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 09	Belanja Peralatan/Perlengkapan Makan Minum (sendok, garpu, piring, dll)	158.114.500,00	0,00	153.680.000,00	153.680.000,00	(4.434.500,00)
5.1.2.01.10	Belanja Peralatan Mesin (busi, baut, slang, dll)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.1.2.01.11	Belanja Alat Medis Habis Pakai	307.204.494,00	0,00	274.022.800,00	274.022.800,00	(33.181.694,00)
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	4.747.114.985,60	0,00	4.506.764.314,00	4.506.764.314,00	(240.350.671,60)
5.1.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	269.795.000,00	0,00	248.592.230,00	248.592.230,00	(21.202.770,00)
5.1.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	30.000.000,00	0,00	29.896.000,00	29.896.000,00	(104.000,00)
5.1.2.02.04	Belanja Bahan obat-obatan	4.120.669.985,60	0,00	3.958.462.532,00	3.958.462.532,00	(162.207.453,60)
5 . 1 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	41.800.000,00	0,00	40.652.600,00	40.652.600,00	(1.147.400,00)
5.1.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	36.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	(24.000.000,00)
5.1.2.02.07	Belanja Bahan untuk Bantuan Sosial	20.000.000,00	0,00	19.986.375,00	19.986.375,00	(13.625,00)
5 . 1 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Percontohan	228.850.000,00	0,00	197.174.577,00	197.174.577,00	(31.675.423,00)
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.199.434.756,42	0,00	21.636.104.162,00	21.636.104.162,00	(2.563.330.594,42)
5.1.2.03.01	Belanja Telepon	67.898.778,13	0,00	50.538.773,00	50.538.773,00	(17.360.005,13)
5 . 1 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	291.041.423,00	0,00	222.139.412,00	222.139.412,00	(68.902.011,00)
5.1.2.03.03	Belanja Listrik	4.636.628.200,79	0,00	4.212.920.231,00	4.212.920.231,00	(423.707.969,79)
5.1.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	639.822.125,00	0,00	606.815.000,00	606.815.000,00	(33.007.125,00)
5.1.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.729.099.407,50	0,00	1.647.085.770,00	1.647.085.770,00	(82.013.637,50)
5.1.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3.200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	(3.150.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	56.000.000,00	0,00	49.552.560,00	49.552.560,00	(6.447.440,00)
5.1.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	12.800.000,00	0,00	10.970.000,00	10.970.000,00	(1.830.000,00)
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	190.450.000,00	0,00	72.251.600,00	72.251.600,00	(118.198.400,00)
			3,00			(

KODE DEKEMBA	IIDAAAN	ANICCADAN		REALISASI		LEDILL / ////DANO
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
5 . 1 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	47.425.000,00	0,00	38.425.000,00	38.425.000,00	(9.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 14	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.190.647.730,00	0,00	6.911.466.600,00	6.911.466.600,00	(279.181.130,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 15	Belanja Publikasi	3.297.697.192,00	0,00	3.070.178.846,00	3.070.178.846,00	(227.518.346,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.584.874.900,00	0,00	4.308.313.980,00	4.308.313.980,00	(1.276.560.920,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Medis	420.750.000,00	0,00	420.440.480,00	420.440.480,00	(309.520,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Administrasi Perijinan	2.100.000,00	0,00	2.081.910,00	2.081.910,00	(18.090,00,
5 . 1 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/ Sampah Medis	29.000.000,00	0,00	12.874.000,00	12.874.000,00	(16.126.000,00,
5 . 1 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.753.400.199,64	0,00	4.361.831.022,00	4.361.831.022,00	(391.569.177,64)
5 . 1 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.050.746.350,00	0,00	932.196.614,00	932.196.614,00	(118.549.736,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.492.768.549,21	0,00	1.406.142.147,00	1.406.142.147,00	(86.626.402,21)
5 . 1 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.891.385.000,43	0,00	1.809.386.361,00	1.809.386.361,00	(81.998.639,43)
5 . 1 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	184.500.300,00	0,00	119.178.500,00	119.178.500,00	(65.321.800,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	128.000.000,00	0,00	94.927.400,00	94.927.400,00	(33.072.600,00)
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.413.663.628,00	0,00	3.153.472.548,00	3.153.472.548,00	(260.191.080,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.328.154.753,00	0,00	1.202.887.073,00	1.202.887.073,00	(125.267.680,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.085.508.875,00	0,00	1.950.585.475,00	1.950.585.475,00	(134.923.400,00)
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	137.540.000,00	0,00	120.990.000,00	120.990.000,00	(16.550.000,00)
5.1.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	121.575.000,00	0,00	105.800.000,00	105.800.000,00	(15.775.000,00)
5.1.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.965.000,00	0,00	13.190.000,00	13.190.000,00	(775.000,00,
5.1.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Mobilitas		-,	,		-,
5 . 1 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	106.600.000,00	0,00	92.350.000,00	92.350.000,00	(14.250.000,00,
5 . 1 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	102.600.000,00	0,00	88.350.000,00	88.350.000,00	(14.250.000,00)
5.1.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.1.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
5.1.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	155.600.000,00	0,00	142.075.000,00	142.075.000,00	(13.525.000,00)
5.1.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	33.550.000,00	0,00	31.145.000,00	31.145.000,00	(2.405.000,00)
5 . 1 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer dan Printer	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	55.450.000,00	0,00	52.380.000,00	52.380.000,00	(3.070.000,00)
5 . 1 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Stand Pameran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian	31.800.000,00	0,00	23.750.000,00	23.750.000,00	(8.050.000,00)
5 . 1 . 2 . 10 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE DEKEMING	LIDALANI	ANCCADAN		REALISASI		LEBUL / (VUDANC)
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.757.060.269,00	0,00	10.035.201.575,00	10.035.201.575,00	(721.858.694,00)
5.1.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	4.328.783.700,00	0,00	4.136.514.350,00	4.136.514.350,00	(192.269.350,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	912.298.250,00	0,00	795.334.250,00	795.334.250,00	(116.964.000,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.636.225.714,00	0,00	1.617.962.075,00	1.617.962.075,00	(18.263.639,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	54.990.000,00	0,00	54.990.000,00	54.990.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	15.150.000,00	0,00	15.113.000,00	15.113.000,00	(37.000,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	52.559.705,00	0,00	50.535.000,00	50.535.000,00	(2.024.705,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.757.052.900,00	0,00	3.364.752.900,00	3.364.752.900,00	(392.300.000,00)
5 . 1 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	657.675.000,00	0,00	632.147.700,00	632.147.700,00	(25.527.300,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 01	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	98.000.000,00	0,00	97.000.000,00	97.000.000,00	(1.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	56.500.000,00	0,00	40.036.000,00	40.036.000,00	(16.464.000,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	386.825.000,00	0,00	379.045.700,00	379.045.700,00	(7.779.300,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	16.350.000,00	0,00	16.316.000,00	16.316.000,00	(34.000,00)
5 . 1 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	75.000.000,00	0,00	74.750.000,00	74.750.000,00	(250.000,00)
5 . 1 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	551.490.000,00	0,00	548.740.700,00	548.740.700,00	(2.749.300,00)
5 . 1 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	551.490.000,00	0,00	548.740.700,00	548.740.700,00	(2.749.300,00)
5 . 1 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.222.556.000,00	0,00	1.197.471.700,00	1.197.471.700,00	(25.084.300,00)
5 . 1 . 2 . 14 . 01	Belanja Pakaian KORPRI	20.433.000,00	0,00	19.950.000,00	19.950.000,00	(483.000,00)
5 . 1 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian adat daerah	137.500.000,00	0,00	130.635.000,00	130.635.000,00	(6.865.000,00)
5 . 1 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	711.610.000,00	0,00	696.718.000,00	696.718.000,00	(14.892.000,00)
5 . 1 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	353.013.000,00	0,00	350.168.700,00	350.168.700,00	(2.844.300,00)
5 . 1 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.583.264.490,88	0,00	32.812.411.507,00	32.812.411.507,00	(1.770.852.983,88)
5 . 1 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.911.576.037,33	0,00	15.103.410.854,00	15.103.410.854,00	(808.165.183,33)
5 . 1 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.671.688.453,55	0,00	17.709.000.653,00	17.709.000.653,00	(962.687.800,55)
5 . 1 . 2 . 18	Belanja Pemeliharaan	23.166.298.684,39	0,00	22.756.816.354,00	22.756.816.354,00	(409.482.330,39)
5 . 1 . 2 . 18 . 02	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	1.605.202.000,00	0,00	1.485.243.329,00	1.485.243.329,00	(119.958.671,00)
5 . 1 . 2 . 18 . 03	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	4.090.329.613,86	0,00	3.998.762.360,00	3.998.762.360,00	(91.567.253,86)
5 . 1 . 2 . 18 . 04	Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.446.247.070,53	0,00	6.295.464.215,00	6.295.464.215,00	(150.782.855,53)
5 . 1 . 2 . 18 . 05	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	11.024.520.000,00	0,00	10.977.346.450,00	10.977.346.450,00	(47.173.550,00)
5 . 1 . 2 . 19	Belanja Jasa Konsultansi	1.748.045.000,00	0,00	1.733.803.000,00	1.733.803.000,00	(14.242.000,00)
5 . 1 . 2 . 19 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	810.545.000,00	0,00	808.045.000,00	808.045.000,00	(2.500.000,00)
5.1.2.19.04	Belanja Jasa Konsultan Lainnya	937.500.000,00	0,00	925.758.000,00	925.758.000,00	(11.742.000,00)
5 . 1 . 2 . 20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.488.137.294,00	0,00	29.972.153.713,00	29.972.153.713,00	(515.983.581,00)
5 . 1 . 2 . 20 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	26.591.132.994,00	0,00	26.192.919.713,00	26.192.919.713,00	(398.213.281,00)
5 . 1 . 2 . 20 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	3.897.004.300,00	0,00	3.779.234.000,00	3.779.234.000,00	(117.770.300,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		LEBIH / (KURANG)
RODE REREITING	UKAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
5 . 1 . 2 . 23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	392.221.000,00	0,00	334.422.600,00	334.422.600,00	(57.798.400,00)
5 . 1 . 2 . 23 . 01	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	184.600.000,00	0,00	152.023.600,00	152.023.600,00	(32.576.400,00)
5 . 1 . 2 . 23 . 02	Belanja Sosialisasi	47.621.000,00	0,00	46.099.000,00	46.099.000,00	(1.522.000,00)
5 . 1 . 2 . 23 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	160.000.000,00	0,00	136.300.000,00	136.300.000,00	(23.700.000,00)
5 . 1 . 2 . 23 . 04	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.24	Belanja Honorarium Non Pegawai	158.300.000,00	0,00	101.730.000,00	101.730.000,00	(56.570.000,00)
5 . 1 . 2 . 24 . 01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	158.300.000,00	0,00	101.730.000,00	101.730.000,00	(56.570.000,00)
5.1.2.27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.403.250.000,00	0,00	1.381.000.000,00	1.381.000.000,00	(22.250.000,00)
5 . 1 . 2 . 27 . 01	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	38.250.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	(22.250.000,00)
5 . 1 . 2 . 27 . 02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	1.365.000.000,00	0,00	1.365.000.000,00	1.365.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 28	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	3.105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.105.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 28 . 01	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	3.105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.105.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 29	Belanja Barang Dana BOS	11.385.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(11.385.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	11.385.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(11.385.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 30	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan	3.687.809.949,00	0,00	2.952.524.997,00	2.952.524.997,00	(735.284.952,00)
5 . 1 . 2 . 30 . 01	Nasional Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	3.687.809.949,00	0,00	2.952.524.997,00	2.952.524.997,00	(735.284.952,00)
5 . 1 . 2 . 31	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.267.608.800,46	0,00	15.241.406.611,00	15.241.406.611,00	(1.026.202.189,46)
5 . 1 . 2 . 31 . 01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.267.608.800,46	0,00	15.241.406.611,00	15.241.406.611,00	(1.026.202.189,46)
5.1.5	Belanja Hibah	5.232.900.000,00	0,00	4.576.412.100,00	4.576.412.100,00	(656.487.900,00)
5 . 1 . 5 . 04	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	2.510.400.000,00	0,00	2.479.700.000,00	2.479.700.000,00	(30.700.000,00)
5 . 1 . 5 . 04 . 02	Belanja Hibah BOP PAUD	2.274.000.000,00	0,00	2.265.300.000,00	2.265.300.000,00	(8.700.000,00)
5 . 1 . 5 . 04 . 04	Belanja Hibah BOP Kesetaraan	236.400.000,00	0,00	214.400.000,00	214.400.000,00	(22.000.000,00)
5 . 1 . 5 . 05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	2.722.500.000,00	0,00	2.096.712.100,00	2.096.712.100,00	(625.787.900,00)
5 . 1 . 5 . 05 . 02	Belanja Hibah Kepada KONI	100.000.000,00	0,00	99.843.850,00	99.843.850,00	(156.150,00)
5 . 1 . 5 . 05 . 04	Belanja Hibah Kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5 . 1 . 5 . 05 . 05	Belanja Hibah Kepada KORPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 5 . 05 . 06	Belanja Hibah Kepada BNK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 5 . 05 . 07	Belanja Hibah Kepada Lembaga Keagamaan	2.397.500.000,00	0,00	1.771.868.250,00	1.771.868.250,00	(625.631.750,00)
5 . 1 . 5 . 05 . 08	Belanja Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 5 . 05 . 10	Belanja Hibah Kepada Karang Taruna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 5 . 05 . 13	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kepramukaan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5 . 1 . 5 . 05 . 17	Belanja Hibah Kepada APKASI	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5 . 1 . 5 . 05 . 18	Belanja Hibah Kepada FORSESDASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 5 . 05 . 19	Belanja Hibah Kepada Dewan Adat Dayak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE DEKEMING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		LEDIU / (VUDANO)
KODE REKENING	URATAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
5.1.5.05.21	Belanja Hibah Kepada Organisasi Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.5.05.24	Belanja Hibah Kepada Pewarta Warga Indonesia (PPWI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 . 1 . 5 . 05 . 25	Belanja Hibah Kepada KNPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 . 1 . 5 . 05 . 26	Belanja Hibah Kepada Ikatan Wartawan Online (IWO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 . 1 . 5 . 05 . 27	Belanja Hibah Kepada RAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 . 1 . 5 . 05 . 28	Belanja Hibah Kepada GRANAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 . 1 . 5 . 05 . 29	Belanja Hibah Kepada National Paralympic Committee (NPC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 . 1 . 5 . 05 . 31	Belanja Hibah Kepada DPD FORDAYAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	11.643.623.685,05	0,00	2.108.717.224,00	2.108.717.224,00	(9.534.906.461,0
5 . 1 . 6 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 . 1 . 6 . 01 . 09	Bantuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.1.6.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	11.643.623.685,05	0,00	2.108.717.224,00	2.108.717.224,00	(9.534.906.461,0
5.1.6.02.01	Belanja Bantuan Sosial kepada	11.643.623.685,05	0,00	2.108.717.224,00	2.108.717.224,00	(9.534.906.461,0
5.2	BELANJA MODAL	208.322.395.085,40	0,00	195.285.001.516,00	195.285.001.516,00	(13.037.393.569,4
5.2.1	Belanja Modal Tanah	550.000.000,00	0,00	548.652.000,00	548.652.000,00	(1.348.000,0
5.2.1.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain	550.000.000,00	0,00	548.652.000,00	548.652.000,00	(1.348.000,0
5.2.1.10.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Penggalian	550.000.000,00	0,00	548.652.000,00	548.652.000,00	(1.348.000,0
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.681.769.825,80	0,00	27.277.192.382,00	27.277.192.382,00	(7.404.577.443,8
5.2.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,0
5.2.2.03.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,0
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5.2.2.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan	8.409.525.285,40	0,00	7.806.956.060,00	7.806.956.060,00	(602.569.225,4
5.2.2.04.01	Darat Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.206.000.060,00	0,00	2.183.716.060,00	2.183.716.060,00	(22.284.000,0
5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	2.418.000.000,00	0,00	2.395.000.000,00	2.395.000.000,00	(23.000.000,0
5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	395.000.000,00	0,00	395.000.000,00	395.000.000,00	0,
5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.918.725.225,40	0,00	2.365.440.000,00	2.365.440.000,00	(553.285.225,4
5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	471.800.000,00	0,00	467.800.000,00	467.800.000,00	(4.000.000,
5 . 2 . 2 . 04 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
5.2.2.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		LEBIH / (KURANG)
RODE REKEINING	UKAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	LEDIH / (KOKANO)
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.06.02	Apung Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	25.000.000,00	0,00	24.970.000,00	24.970.000,00	(30.000,00
5.2.2.11.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	25.000.000,00	0,00	24.970.000,00	24.970.000,00	(30.000,00
5.2.2.11.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.12.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan	25.000.000,00	0,00	23.730.950,00	23.730.950,00	(1.269.050,00
5.2.2.13.01	Tanaman/Alat Penyimpan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	20.000.000,00	0,00	18.740.000,00	18.740.000,00	(1.260.000,00
5.2.2.13.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	5.000.000,00	0,00	4.990.950,00	4.990.950,00	(9.050,00
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.195.215.500,00	0,00	1.169.766.050,00	1.169.766.050,00	(25.449.450,00
5.2.2.14.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.2.14.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	61.750.000,00	0,00	61.260.450,00	61.260.450,00	(489.550,00
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.108.465.500,00	0,00	1.083.505.600,00	1.083.505.600,00	(24.959.900,00
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.692.952.276,40	0,00	2.624.538.492,00	2.624.538.492,00	(68.413.784,40
5.2.2.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.645.506.676,40	0,00	1.604.418.950,00	1.604.418.950,00	(41.087.726,40
5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	11.050.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	(550.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	654.672.850,00	0,00	649.211.242,00	649.211.242,00	(5.461.608,00
5 . 2 . 2 . 15 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	65.284.000,00	0,00	63.106.000,00	63.106.000,00	(2.178.000,00
5.2.2.15.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	312.438.750,00	0,00	294.802.300,00	294.802.300,00	(17.636.450,00
5.2.2.15.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.506.279.280,00	0,00	3.411.279.737,00	3.411.279.737,00	(94.999.543,00
5.2.2.16.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	122.000.000,00	0,00	120.488.000,00	120.488.000,00	(1.512.000,00

KODE BEKENING	LIDALAN	ANCCADAN		REALISASI		LEDILI / /VUDANO
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
5.2.2.16.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	2.003.931.500,00	0,00	1.936.460.637,00	1.936.460.637,00	(67.470.863,00)
5.2.2.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	39.976.500,00	0,00	39.976.500,00	39.976.500,00	0,00
5.2.2.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	380.371.280,00	0,00	355.154.600,00	355.154.600,00	(25.216.680,00)
5.2.2.16.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	960.000.000,00	0,00	959.200.000,00	959.200.000,00	(800.000,00)
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	232.500.000,00	0,00	231.559.600,00	231.559.600,00	(940.400,00)
5.2.2.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	19.000.000,00	0,00	18.910.000,00	18.910.000,00	(90.000,00)
5.2.2.17.02	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	20.700.000,00	0,00	20.512.800,00	20.512.800,00	(187.200,00)
5.2.2.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	131.800.000,00	0,00	131.406.800,00	131.406.800,00	(393.200,00)
5.2.2.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	61.000.000,00	0,00	60.730.000,00	60.730.000,00	(270.000,00)
5.2.2.17.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	291.023.500,00	0,00	283.783.591,00	283.783.591,00	(7.239.909,00)
5.2.2.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	227.750.000,00	0,00	221.223.591,00	221.223.591,00	(6.526.409,00)
5.2.2.18.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	63.273.500,00	0,00	62.560.000,00	62.560.000,00	(713.500,00)
5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	190.510.000,00	0,00	188.750.000,00	188.750.000,00	(1.760.000,00)
5.2.2.19.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	190.510.000,00	0,00	188.750.000,00	188.750.000,00	(1.760.000,00)
5.2.2.19.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.20.10	Pemancar Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	11.321.635.884,00	0,00	11.073.107.902,00	11.073.107.902,00	(248.527.982,00)
5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	11.321.635.884,00	0,00	11.073.107.902,00	11.073.107.902,00	(248.527.982,00)
5.2.2.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat	6.252.128.100,00	0,00	0,00	0,00	(6.252.128.100,00)
5.2.2.24.11	Peraga/Praktek Sekolah Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 24 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	6.252.128.100,00	0,00	0,00	0,00	(6.252.128.100,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		LEBIH / (KURANG)
KODE REKENTING	UKATAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
5.2.2.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	500.000.000,00	0,00	398.750.000,00	398.750.000,00	(101.250.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Fisika Nuklir / Elektronika Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply	500.000.000,00	0,00	398.750.000,00	398.750.000,00	(101.250.000,00)
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 35 . 01	dan Perlindungan Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.231.742.122,60	0,00	42.026.005.627,00	42.026.005.627,00	(4.205.736.495,60)
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	44.817.517.122,60	0,00	40.659.555.204,00	40.659.555.204,00	(4.157.961.918,60)
5.2.3.01.01	Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	6.714.278.000,00	0,00	6.584.666.000,00	6.584.666.000,00	(129.612.000,00)
5.2.3.01.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	263.595.000,00	0,00	260.950.000,00	260.950.000,00	(2.645.000,00)
5.2.3.01.06	Gudang Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	13.984.797.456,60	0,00	13.912.600.000,00	13.912.600.000,00	(72.197.456,60)
5 . 2 . 3 . 01 . 08	Kesehatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	486.600.000,00	0,00	485.070.000,00	485.070.000,00	(1.530.000,00)
5.2.3.01.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.458.100.000,00	0,00	1.438.500.804,00	1.438.500.804,00	(19.599.196,00)
5.2.3.01.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.664.027.377,00	0,00	7.730.365.400,00	7.730.365.400,00	(933.661.977,00)
5.2.3.01.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	2.214.739.267,00	0,00	2.146.217.000,00	2.146.217.000,00	(68.522.267,00)
5.2.3.01.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	140.140.000,00	0,00	116.200.000,00	116.200.000,00	(23.940.000,00)
5.2.3.01.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	406.750.022,00	0,00	395.450.000,00	395.450.000,00	(11.300.022,00)
5.2.3.01.18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	77.490.000,00	0,00	0,00	0,00	(77.490.000,00)
5.2.3.01.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.407.000.000,00	0,00	7.589.536.000,00	7.589.536.000,00	(2.817.464.000,00)
5.2.3.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	794.525.000,00	0,00	750.710.423,00	750.710.423,00	(43.814.577,00)
5.2.3.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	141.525.000,00	0,00	141.160.000,00	141.160.000,00	(365.000,00)
5.2.3.02.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	53.000.000,00	0,00	52.850.000,00	52.850.000,00	(150.000,00)
5 . 2 . 3 . 02 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama	600.000.000,00	0,00	556.700.423,00	556.700.423,00	(43.299.577,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEDIN / (KIIDANC)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
5.2.3.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	482.200.000,00	0,00	478.650.000,00	478.650.000,00	(3.550.000,00)
5 . 2 . 3 . 04 . 02	Bersejarah Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Adat	482.200.000,00	0,00	478.650.000,00	478.650.000,00	(3.550.000,00)
5 . 2 . 3 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	137.500.000,00	0,00	137.090.000,00	137.090.000,00	(410.000,00)
5 . 2 . 3 . 05 . 02	Tugu Peringatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tuqu Pembangunan	50.000.000,00	0,00	49.700.000,00	49.700.000,00	(300.000,00)
5.2.3.05.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	87.500.000,00	0,00	87.390.000,00	87.390.000,00	(110.000,00)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	124.746.067.137,00	0,00	123.347.452.350,00	123.347.452.350,00	(1.398.614.787,00)
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	94.825.062.392,00	0,00	93.966.612.000,00	93.966.612.000,00	(858.450.392,00)
5 . 2 . 4 . 01 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	72.905.168.957,00	0,00	72.314.761.000,00	72.314.761.000,00	(590.407.957,00)
5 . 2 . 4 . 01 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	18.064.593.435,00	0,00	17.841.966.000,00	17.841.966.000,00	(222.627.435,00)
5 . 2 . 4 . 01 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	3.855.300.000,00	0,00	3.809.885.000,00	3.809.885.000,00	(45.415.000,00)
5 . 2 . 4 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	4.497.085.000,00	0,00	4.449.850.000,00	4.449.850.000,00	(47.235.000,00)
5 . 2 . 4 . 02 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	3.961.820.000,00	0,00	3.925.050.000,00	3.925.050.000,00	(36.770.000,00)
5 . 2 . 4 . 02 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	535.265.000,00	0,00	524.800.000,00	524.800.000,00	(10.465.000,00)
5.2.4.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan	4.047.848.000,00	0,00	3.966.461.000,00	3.966.461.000,00	(81.387.000,00)
5.2.4.03.03	Air Irigasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	4.047.848.000,00	0,00	3.966.461.000,00	3.966.461.000,00	(81.387.000,00)
5 . 2 . 4 . 03 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 4 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan	10.569.809.350,00	0,00	10.382.172.350,00	10.382.172.350,00	(187.637.000,00)
5.2.4.05.03	Air Rawa Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa	10.569.809.350,00	0,00	10.382.172.350,00	10.382.172.350,00	(187.637.000,00)
5.2.4.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan	1.590.000.000,00	0,00	1.585.746.000,00	1.585.746.000,00	(4.254.000,00)
5 . 2 . 4 . 06 . 04	Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan	1.590.000.000,00	0,00	1.585.746.000,00	1.585.746.000,00	(4.254.000,00)
5.2.4.06.05	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	45.000.000,00	0,00	44.550.000,00	44.550.000,00	(450.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEDIN / (KIIDANO)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
5.2.4.07.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	45.000.000,00	0,00	44.550.000,00	44.550.000,00	(450.000,00
5 . 2 . 4 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	3.557.056.000,00	0,00	3.492.019.000,00	3.492.019.000,00	(65.037.000,00
5.2.4.08.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	3.060.000.000,00	0,00	2.998.469.000,00	2.998.469.000,00	(61.531.000,00
5 . 2 . 4 . 08 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	497.056.000,00	0,00	493.550.000,00	493.550.000,00	(3.506.000,00
5.2.4.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	5.057.262.000,00	0,00	4.911.360.000,00	4.911.360.000,00	(145.902.000,00
5.2.4.09.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.919.262.000,00	0,00	1.873.360.000,00	1.873.360.000,00	(45.902.000,00
5 . 2 . 4 . 09 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	3.138.000.000,00	0,00	3.038.000.000,00	3.038.000.000,00	(100.000.000,00
5.2.4.11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air	50.000.000,00	0,00	49.907.000,00	49.907.000,00	(93.000,00
5.2.4.11.05	Minum/Air Bersih Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	50.000.000,00	0,00	49.907.000,00	49.907.000,00	(93.000,00
5 . 2 . 4 . 16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi	6.762.500,00	0,00	0,00	0,00	(6.762.500,00
5 . 2 . 4 . 16 . 01	Gardu Listrik Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk	6.762.500,00	0,00	0,00	0,00	(6.762.500,00
5 . 2 . 4 . 21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	500.181.895,00	0,00	498.775.000,00	498.775.000,00	(1.406.895,00
5.2.4.21.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	440.181.895,00	0,00	438.776.700,00	438.776.700,00	(1.405.195,00
5 . 2 . 4 . 21 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	60.000.000,00	0,00	59.998.300,00	59.998.300,00	(1.700,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.112.816.000,00	0,00	2.085.699.157,00	2.085.699.157,00	(27.116.843,00
5 . 2 . 5 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.04.02	Kebudayaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.04.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga	37.826.000,00	0,00	37.450.000,00	37.450.000,00	(376.000,00
5.2.5.05.04	Lainnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	37.826.000,00	0,00	37.450.000,00	37.450.000,00	(376.000,00
5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap	2.074.990.000,00	0,00	2.048.249.157,00	2.048.249.157,00	(26.740.843,00
5.2.5.08.01	Renovasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	2.074.990.000,00	0,00	2.048.249.157,00	2.048.249.157,00	(26.740.843,00

KODE DEKEMING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBUL / //LIDANICS
KODE REKENING			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	29.788.488.027,18	0,00	16.487.413.645,00	16.487.413.645,00	(13.301.074.382,18)
5.3.1	Belanja Tak Terduga	29.788.488.027,18	0,00	16.487.413.645,00	16.487.413.645,00	(13.301.074.382,18)
5.3.1.01	Belanja Tak Terduga	29.788.488.027,18	0,00	16.487.413.645,00	16.487.413.645,00	(13.301.074.382,18)
5.3.1.01.02	Belanja Tak Terduga Bencana Alam	1.000.000.000,00	0,00	200.226.325,00	200.226.325,00	(799.773.675,00)
5.3.1.01.03	Belanja Tak Terduga Luar Biasa Lainnya	28.788.488.027,18	0,00	16.287.187.320,00	16.287.187.320,00	(12.501.300.707,18)
6	TRANSFER	156.146.532.800,00	0,00	155.170.877.059,00	155.170.877.059,00	(975.655.741,00)
6.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	638.000.000,00	0,00	638.000.000,00	638.000.000,00	0,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	638.000.000,00	0,00	638.000.000,00	638.000.000,00	0,00
6.1.1.01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	638.000.000,00	0,00	638.000.000,00	638.000.000,00	0,00
	Kabupaten/Kota					
6 . 1 . 1 . 01 . 03	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	638.000.000,00	0,00	638.000.000,00	638.000.000,00	0,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	155.508.532.800,00	0,00	154.532.877.059,00	154.532.877.059,00	(975.655.741,00)
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	495.000.000,00	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	(250.000.000,00)
6.2.1.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	495.000.000,00	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	(250.000.000,00)
6.2.1.01.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	495.000.000,00	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	(250.000.000,00)
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	154.478.805.400,00	0,00	153.768.715.527,00	153.768.715.527,00	(710.089.873,00)
6.2.2.01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	154.478.805.400,00	0,00	153.768.715.527,00	153.768.715.527,00	(710.089.873,00)
6.2.2.01.02	ADD	55.000.000.000,00	0,00	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00
6 . 2 . 2 . 01 . 03	TPAPD	228.000.000,00	0,00	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00
6 . 2 . 2 . 01 . 04	Tunjangan Kehormatan BPD/LKMK	655.200.000,00	0,00	327.600.000,00	327.600.000,00	(327.600.000,00)
6 . 2 . 2 . 01 . 05	Insentif Damang dan Sekretaris Damang	343.680.000,00	0,00	343.680.000,00	343.680.000,00	0,00
6 . 2 . 2 . 01 . 06	Premi Askes Untuk Masyarakat	2.830.211.400,00	0,00	2.474.721.527,00	2.474.721.527,00	(355.489.873,00)
6 . 2 . 2 . 01 . 07	Mantir Adat	1.506.030.000,00	0,00	1.479.030.000,00	1.479.030.000,00	(27.000.000,00)
6 . 2 . 2 . 01 . 08	Dana Desa	93.915.684.000,00	0,00	93.915.684.000,00	93.915.684.000,00	0,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	534.727.400,00	0,00	519.161.532,00	519.161.532,00	(15.565.868,00)
6.2.3.01	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	534.727.400,00	0,00	519.161.532,00	519.161.532,00	(15.565.868,00)
6.2.3.01.01	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	534.727.400,00	0,00	519.161.532,00	519.161.532,00	(15.565.868,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(63.121.129.560,63)	0,00	1.960.476.949,20	1.960.476.949,20	65.081.606.509,83
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65.121.129.560,63	0,00	70.789.947.317,76	70.789.947.317,76	5.668.817.757,13
7.1.1	Penggunaan SiLPA	65.121.129.560,63	0,00	70.789.947.317,76	70.789.947.317,76	5.668.817.757,13
7.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	65.121.129.560,63	0,00	0,00	0,00	(65.121.129.560,63)
7.1.1.01.01	Pajak Daerah	65.121.129.560,63	0,00	0,00	0,00	(65.121.129.560,63)
7.1.1.08	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	70.789.947.317,76	70.789.947.317,76	70.789.947.317,76
7.1.1.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	70.789.947.317,76	70.789.947.317,76	70.789.947.317,76
		3,00	3,00	2		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	- LEBITY (KOKANO)
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
7.2.2.02	Penyertaan Modal pada BUMD	2.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
7.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada BUMD	2.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	63.121.129.560,63	0,00	69.789.947.317,76	69.789.947.317,76	6.668.817.757,13
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	71.750.424.266,96	71.750.424.266,96	71.750.424.266,96

